



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SEPAKBOLA DAN POLITIK:  
POLITISASI PERSATUAN SEPAKBOLA INDONESIA  
BANDUNG (PERSIB) OLEH DADA ROSADA PADA  
PEMILUKADA KOTA BANDUNG 2008**

**IRHAM PRADIPTA FADLI  
0806346760**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU POLITIK  
PADA PROGRAM ILMU POLITIK REGULER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM ILMU POLITIK  
DEPOK  
MEI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Irham Pradipta Fadli**

**NPM : 0806346760**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 30 Mei 2012**

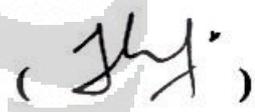
## HALAMAN PENGESAHAN

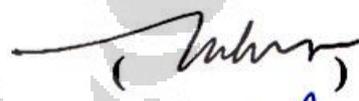
Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Irham Pradipta Fadli  
 NPM : 0806346760  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Judul Skripsi : **Sepakbola dan Politik: Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) oleh Dada Rosada pada Pemilu Kota Bandung 2008**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik Reguler, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing Skripsi : Ikhsan Darmawan, S.Sos, M.Si (  )

Penguji : R. Siti Zuhro, MA, DR (  )

Ketua Sidang : Cecep Hidayat, S.IP, IMRI (  )

Sekretaris Sidang : Hurriyah, S.Sos, IMAS (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Mei 2012

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaannirrahim,*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nyachingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Sepakbola dan Politik: Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) dalam Kemenangan Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008**, sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi bertemakan sepakbola dan politik, memang berdasarkan minat penulis terhadap sepakbola. Selain itu ada beberapa hal yang menjadi alasan penulisan skripsi ini. **Pertama**, Penulis telah menggeluti sepakbola semenjak duduk di bangku sekolah dasar dan sangat merasa bahagia bisa menulis tentang sepakbola dalam ruang lingkup Ilmu Politik. **Kedua**, Persib merupakan tim sepakbola lokal yang saya dukung. Dukungan terhadap Persib merupakan sebuah "budaya" yang diturunkan oleh almarhum Kakek saya. **Ketiga**, masih sedikitnya tulisan tentang sepakbola dan politik menjadi pemicu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap akan ada banyak lagi penulis-penulis yang menulis tentang sepakbola atau olahraga dan politik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia sadar bahwa sepakbola pada khususnya dan olahraga pada umumnya adalah sebuah kebanggaan Bangsa. Hal lainnya adalah mampu mendefinisikan hubungan sepakbola/olahraga dengan politik/politisi yang ideal. Pada dasarnya setiap warga negara berhak berkontribusi terhadap kemajuan sepakbola/olahraga daerahnya dan nasional, termasuk politisi. Agar pada akhirnya relasi yang terjadi tidak hanya sekedar politisasi sepakbola/olahraga oleh politisi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari pembaca. Semoga skripsi ini mampu berkontribusi terhadap kemajuan sepakbola dan olahraga serta kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penulisan Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan moril maupun materiil, doa, inspirasi, serta sumbangan pikiran. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih secara khusus yang sedalam-dalamnya untuk:

1. Iman Chaerudin dan Riana Suwardi, orang tua tersayang, juga Adrian Pradipta Raedi, adik kandung penulis. Terimakasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan kesabaran yang tiada batas.
2. Informan yang bersedia saya wawancarai, Pak Yossi Irianto, Kang Tisna Sanjaya, Pak Toharudin, Om Farhan, Pak Herru Djoko, Kang Indra Perwira, Pak Ishak Soemantri, dan Pak Tata Wirasasmita.
3. Cecep Hidayat, S.IP, IMRI. selaku Ketua Program Sarjana Reguler Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang memberikan banyak sekali bantuan hingga terselesaikannya Skripsi ini.
4. Ikhsan Darmawan S.Sos, M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan sangat sabar dan ikhlas membimbing penulis.
5. R. Siti Zuhro, MA, DR, selaku penguji sidang skripsi yang sudah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi yang penulis buat.
6. Hurriyah, S.Sos, IMAS., selaku sekretaris program yang sudah banyak membantu penulis.
7. Seluruh Dosen Ilmu Politik FISIP UI yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
8. Rosa Badrul Munir (Kang Oca), yang merupakan penulis skripsi pertama dengan tema sepakbola dan politik di jurusan Ilmu Politik UI, terima kasih atas segala saran dan masukan serta dorongan semangat untuk menulis tentang sepakbola dan politik.
9. Pak Herru Djoko, Ibu, Dumbq, Mungki, Aqwam, Beler, Toga, Ceper, Cecep, Vidi, Riphani, Inuk, Wildan dan seluruh teman-teman Viking Persib Fans Club yang meski baru berkenalan tetapi telah banyak membantu dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
10. Teman-teman junior dan senior di Ilmu Politik, di Fisip, serta UI secara keseluruhan, terutama Yarra Regita (Politik 2006) yang telah "membuka"

- jalan penulis baik karier organisasi di UI, juga karier di luar Kampus, kehidupan, hingga akhirnya penulisan skripsi sepakbola dan politik ini.
11. Teman-teman dan almuni-alumni di Persatuan Sepakbola UI (PSUI), Melika, Tiara, Dyzi, Bang Ajo, Bang Afit dan di Komunitas Sepakbola Fisip (KBF), Bang Kal, Bang Windra, Ucup, Bobby, Bagus, Bedul, dan Anis yang telah menjadi teman setia penulis dalam mencurhakan hobi bermain sepakbola.
  12. Teman-teman Ilmu Politik 2008, Alvin, Curut, Beringin, Hanif, Dicky, Ardi, Dana, Billy, Aida, Boim, Even, Diba, Zuzu, Hilman, Fariz, Tami, Uli, Eros, Izul, Rendi, Heru, Adip, Azzuri, Ryan, Riri, Santi, Lita, Siska, Debie, Efri, Dila, Bowo, Asti, Ibed, Rizqan, Mas Isto, Galih, fian, dan Jule yang selalu berbagi semangat, suka dan duka selama ini, you are a few selected people.
  13. *Last but not least*, Rica Amelia, terima kasih untuk terus memberi semangat dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Demikian karya ini penulis buat. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi semua orang. Terima kasih.

Depok, 30 Mei 2012

Irham Pradipta Fadli

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIK KARYA ILMIAH  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : **Irham Pradipta Fadli**  
**NPM** : **0806346760**  
**Program Studi** : **Ilmu Politik**  
**Departemen** : **Ilmu Politik**  
**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Jenis Karya** : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty – Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Sepakbola dan Politik: Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) oleh Dada Rosada pada Pemilu Kota Bandung 2008**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 30 Mei 2012

Yang Menyatakan,

  
(**Irham Pradipta Fadli**)

**ABSTRAK**

Nama : Irham Pradipta Fadli  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul : Sepakbola dan Politik: Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) oleh Dada Rosada pada Pemilu Kota Bandung 2008

Skripsi ini menulis tentang politik lokal di Kota Bandung tepatnya pada Pemilu Kota Bandung 2008. Dada Rosada sebagai calon *incumbent* dalam kampanyenya menggunakan simbol-simbol tim sepakbola Bandung, yaitu Persib. Penulis melihat peristiwa ini dalam konsep politisasi, yaitu Dada Rosada menjadikan Persib sebagai modal sosialnya. Politisasi Persib dikarenakan Persib merupakan identitas masyarakat Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya. Persib mampu mengumpulkan simpul-simpul masyarakat (pendukung Persib) yang menarik bagi politisi. Persib juga memiliki sejarah panjang dengan dinamika politik yang ada di Kota Bandung. Posisi Dada Rosada ketika itu yang menjabat sebagai Ketua Umum Persib semakin memudahkan politisasi tersebut. Penggunaan simbol-simbol Persib ini menandakan pemanfaatan untuk menarik simpul-simpul masyarakat Kota Bandung. Pada akhirnya politisi dalam meraih dan mempertahankan akan melakukan segala cara dalam hal ini politisasi Persib oleh Dada Rosada.

Kata kunci: Sepakbola, Pemilu, Politisasi

## ABSTRACT

Name : Irham Pradipta Fadli  
Majoring : Political Science  
Title : Football and Politics: Politicization of Bandung Indonesian Football Union (Persib) by Dada Rosada in Bandung Mayor Election 2008

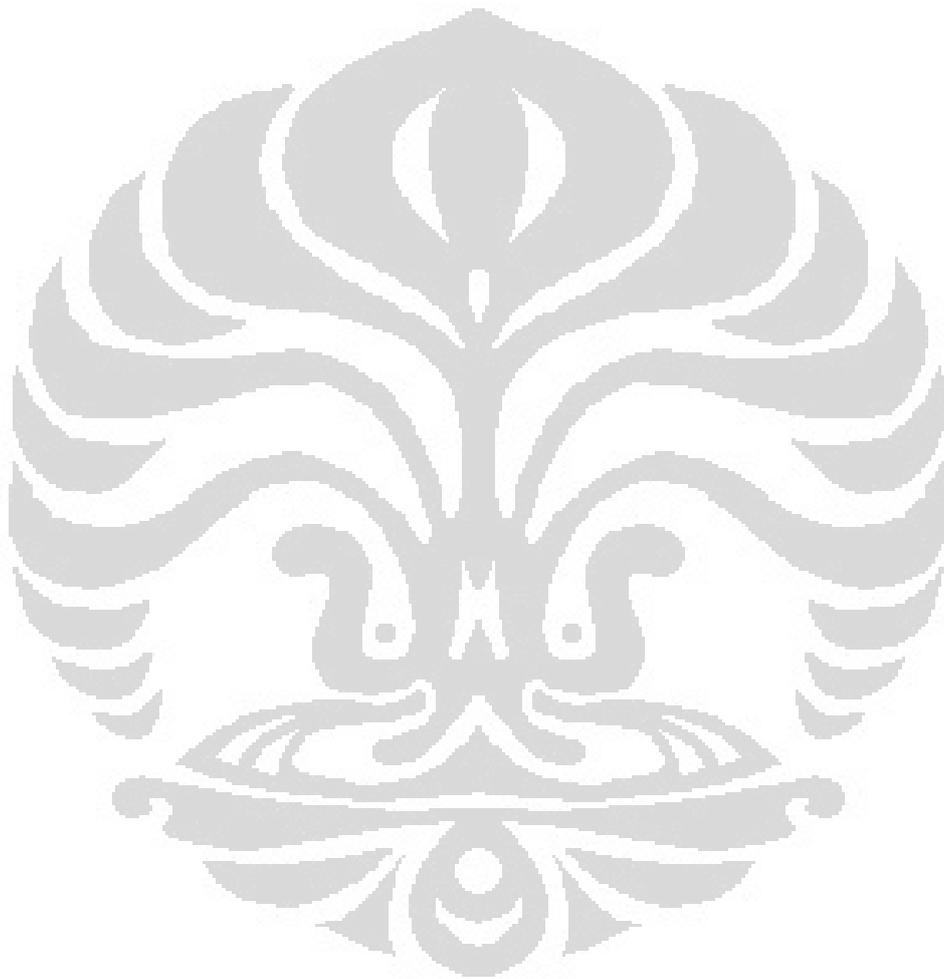
This thesis discusses local politics in Bandung, exactly in Bandung Mayor Election 2008. Dada Rosada as incumbent candidate, used Persib's symbol in some of his campaign attributes. Author using the concept of politicization, which Dada Rosada was using Persib as his social capital. Politicization of Persib causes by Persib as the identity of Bandung people in particular and West Java people in general. Persib nodes capable of collecting people or societies (Persib supporters) that attract politician attention. In Addition, Persib has a long history that intersecting with Bandung's political dynamics. Dada Rosada was the Chief of Persib which easier for politicization of Persib. Persib symbol was used by Dada Rosada as the sign to attract Bandung people. At the end, politicians would use all the way to retaining and seizing the power, in this case politicization of Persib by Dada Rosada.

Key words: Football, Local Election, Politicization

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIK KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>1.PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	9
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	9
1.4 Tinjauan Pustaka .....	12
1.5 Kerangka Konsep.....	18
1.6. Alur Berpikir .....	21
1.7 Metode Penelitian.....	22
1.8 Sistematika & Kendala Penulisan .....	25
<b>2.GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
2.1 Sejarah dan Suporter Persib .....	27
2.1.1 Sejarah Persib.....	27
2.1.2 Suporter Persib .....	30
2.2 Profil Dada Rosada .....	32
2.2.1 Karir Dada Rosada di Birokrasi dan Politik Praktis.....	33
2.2.2 Karir Dada Rosada di Persib.....	37
2.3 Pemilukada Kota Bandung 2008.....	40
<b>3.PERSIB SEBAGAI IDENTITAS MASYARAKAT KOTA BANDUNG DAN DINAMIKA POLITIK YANG DIHADAPINYA.....</b>	<b>47</b>
3.1 Persib sebagai Identitas Masyarakat Kota Bandung.....	47
3.2 Interaksi Persib dengan Dinamika Politik di Kota Bandung .....	54
3.2.1 Persib di Era Awal Berdirinya hingga Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 .....	55
3.2.2 Persib di Era Awal Kemerdekaan dan Rezim Orde Lama.....	56
3.2.3 Persib di Era Orde Baru .....	59
3.2.4 Persib di Era Reformasi .....	63
<b>4.POLITISASI PERSIB OLEH DADA ROSADA DENGAN MENJADIKAN PERSIB SEBAGAI MODAL SOSIAL PADA PEMILUKADA KOTA BANDUNG 2008 .....</b>	<b>67</b>
4.1 Dada Rosada Membangun Modal Sosial di Persib.....	67

4.2 Ketertarikan Aktor Politik Lain di Bandung terhadap Persib .....	70
4.3 Faktor-faktor Kemenangan Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008.....	74
4.4 Politisasi Persib oleh Dada Rosada .....	80
4.5 Kebijakan Dada Rosada sebagai Walikota Bandung 2008-2013 untuk Persib .....	87
<b>5.KESIMPULAN.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

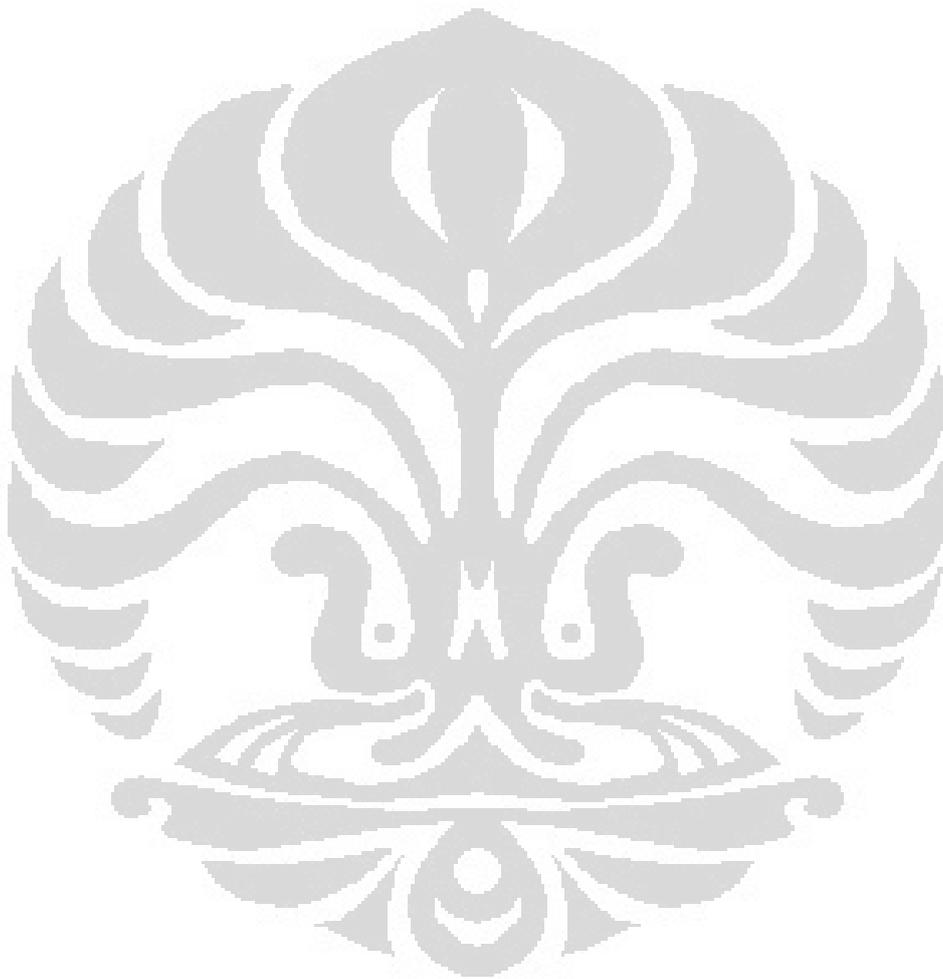


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Narasumber yang Berhasil Diwawancarai oleh Penulis .....	24
Tabel 2.1 Prestasi Juara yang Pernah Diraih Persib Di Berbagai Kompetisi Sepakbola Indonesia .....	28
Tabel 2.2 Karir Dada Rosada di Partai Politik .....	35
Tabel 2.3 Komposisi Jumlah Kursi Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bandung 1999-2004 .....	36
Tabel 2.4 Hasil Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Bandung Periode 2003-2008.....	36
Tabel 2.5 Komposisi Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2004-2009 .....	41
Tabel 3.1 Daftar Nama Ketua Umum Persib yang Merupakan Walikota Bandung .....	61
Tabel 3.2 Keterlibatan Para Pemimpin Daerah Dalam Pembinaan Sepakbola di Indonesia setelah era Orde Baru (periode 1999-2000-an) .....	64
Tabel 4.1 Anggaran Hibah Pemkot Bandung yang Diduga Kuat Terindikasi <i>Pork Barrel</i> Dada Rosada.....	76

**DAFTAR GAMBAR SKEMA BAGAN**

Skema Bagan 1.1	
Skema Alur Berpikir .....	22
Gambar 2.1	
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilu pada Kota Bandung 2008 .....	45



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sepakbola kini bukan lagi sekedar olahraga permainan atau prestasi, tetapi sudah menjadi sebuah industri. Kepopuleran sepakbola yang telah mengakar di masyarakat dunia,<sup>1</sup> mempunyai implikasi jelas dalam konteks sosio-historisnya, termasuk implikasi politik di dalamnya. Sepakbola telah menjadi sebuah identitas dalam masyarakat, dengan kata lain sepakbola menjadi pembeda dengan masyarakat lainnya.<sup>2</sup> Pada tataran dunia internasional, sepakbola mampu menjadi sebuah pembeda dengan bangsa lain serta simbol harkat dan martabat bangsanya dengan bangsa lainnya, terlebih lagi jika dikaitkan dengan pemahaman *post-colonialism*. Child dan Williams berpendapat bahwa *post-colonialism* terjadi ketika adanya kemungkinan untuk terjadinya dialog dan pembahasan terkait permasalahan rasial dan kebudayaan yang berbeda-beda, meski caranya bisa positif atau negatif/destruktif.<sup>3</sup>

Prestasi negara-negara *post-colonialism* yang diwakili oleh Asia dan Afrika dalam ajang sepakbola internasional, bisa dikatakan berbanding lurus dengan nasib mereka setelah terjajah. Meski banyak negara maju di Asia, tetapi tetap saja sulit bagi negara-negara Asia dan Afrika bersaing dengan negara Eropa dalam sepakbola. Negara-negara Amerika Selatan yang juga dapat dianggap negara *post-colonialism* bisa dikatakan menjadi pengecualian atau sebuah kasus karena sepakbola mereka juga mampu bersaing dengan Eropa. Perhatian kemudian adalah ketika negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan melihat apa yang terjadi di persepakbolaan Eropa, mereka masih jauh tertinggal dari segi teknologi, infrastruktur, dan sebagainya. Sepakbola dianggap mampu

---

<sup>1</sup> David Rowe, *Media Information Australia : Sport! Changing The Angle*, Nort Ryde: Southwood Press, 1995, hlm. 3.

<sup>2</sup> Sepakbola bisa menjadi alat pemersatu ataupun seketika bisa menjadi alat pembeda yang sangat ekstrim dengan kelompok masyarakat lainnya. Oleh Jon Sugden, *Political Football*, dalam jurnal *Fourtnight*, No. 317 (May, 1993) hlm. 36-37.

<sup>3</sup> John Sugden and Alan Tomlinson, "Football and FIFA in the Postcolonial World", dalam John Bale and Mike Cronin, *Sport and Postcolonialism*, Oxford: Berg, 2003, hlm. 175-195.

mengangkat harkat martabat bangsa, rasanya sepakbola telah menjadi alat peningkatan kehidupan bangsa. Nasionalisme itu pun dianggap hanya nasionalisme semu 90 menit di lapangan hijau, akan tetapi inilah yang terkadang dimanfaatkan politisi di tingkat nasional atau lokal di mana sepakbola bukan lagi menjadi sekedar olahraga, tapi kebudayaan. Unsur elemen politik praktis mulai merasuk ke dalamnya, dengan politisi coba merangkul sepakbola dan kelompok penggemar sepakbola untuk mendukung mereka, di situlah para politisi mengharapkan adanya dukungan yang besar kepada mereka.<sup>4</sup>

Di Afrika Selatan, sepakbola merupakan sebuah bentuk Afrikanisasi. Sepakbola digunakan untuk menyatakan simbol Afrika Selatan, yang telah bebas dari penjajahan Bangsa Inggris. Permasalahan ini terjadi karena pada masa penjajahan Inggris di Afrika Selatan, Inggris lebih sering mengembangkan olahraga kriket dan *rugby* yang sangat melambangkan kedigdayaan kulit putih, sementara masyarakat Afrika Selatan yang mayoritas berkulit hitam lebih senang bermain sepakbola.<sup>5</sup> Kelanjutan dari keterikatan sepakbola dan masyarakat Afrika Selatan ini adalah sepakbola menjadi sebuah alat perjuangan dan pembentukan identitas perjuangan melawan penjajahan Inggris.<sup>6</sup> Begitu kuatnya keterikatan ini, para politisi/tokoh-tokoh negara Afrika Selatan, menggunakannya sebagai sebuah simbol kebebasan dan kemajuan Afrika Selatan, termasuk ketika kampanye anti-rasisme di Afrika Selatan tahun 1960-an, dimana sepakbola adalah salah satu wadahnya.<sup>7</sup> Bergeser ke Timur Tengah, yaitu sepakbola di Iran. Olahraga populer di Iran sebenarnya adalah gulat. Sepakbola mulai berkembang di Iran pada awal 1900-an, yang diperkenalkan oleh Inggris yang menjajah di Iran ketika itu. Intervensi politik di Iran terhadap sepakbola di mulai ketika Iran di bawah kepemimpinan Muhammad Reza Shah, di mana ketika itu 1941 Ayatollah Kashani, tokoh Islam di Iran merasa keberatan dengan kebijakan merubuhkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Dari Peter Alegi, "A History of South African Football: Laduma! Soccer, Politics and Society in South Africa", dikutip oleh Michael G. Schatzberg, dalam Jurnal *Journal of Southern African Studies*, Vol. 33, No. 1, 2007, hlm. 217.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

mesjid dengan menggantinya dengan lapangan sepakbola.<sup>8</sup> Seiring berjalannya waktu, ketika rezim Republik Islam Iran berkuasa semenjak 1978, sepakbola Iran merasakan dampaknya, seperti dilarang bertanding dengan Israel, dan pelarangan perempuan datang ke stadium sepakbola menonton pertandingan sepakbola semenjak 1981.<sup>9</sup> Meski akhirnya pada 9 Oktober 1984 terjadi kerusuhan besar dalam sejarah pertandingan sepakbola di Iran, salah satunya akibat protes dari pendukung sepakbola dari kaum perempuan, rezim Republik Islam Iran menyadari bahwa tidak bisa sepakbola ditentang terlalu keras, karena itu adalah kebijakan yang sangat tidak populer.<sup>10</sup>

Melihat kiblat sepakbola dunia saat ini, yaitu daratan Eropa, meski terlihat sepakbola sudah menjadi sebuah industri besar dalam olahraga, sepakbola Eropa tidak lepas dari pengaruh politik yang ada di dalamnya.<sup>11</sup> Adanya pemimpin Pemerintahan yang juga menjadi pemilik klub sepakbola di Italia, yaitu mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi yang memiliki klub sepakbola dari kota Milan, yaitu AC Milan. Di Inggris, masalah kerusuhan suporter klub sepakbola sudah menjadi permasalahan bagi siapa saja yang menjadi perdana menteri Inggris. Di Inggris, masalah ini dikenal dengan istilah Hooliganisme, di mana kecintaan seseorang pada tim sepakbola kesayangannya akan begitu teramat sangat, bahkan pertumpahan darah merupakan bukti kesetiaan mereka.<sup>12</sup> Lain lagi dengan di Spanyol, perseteruan antara dua tim sepakbola terkenalnya, yaitu Barcelona dan Real Madrid sekarang ini, juga ternyata tidak lepas dari sejarah politik Spanyol itu sendiri yang akhirnya mempengaruhi perseteruan ini.<sup>13</sup>

Di Brazil sepakbola seperti agama dalam kehidupan. Melihat permasalahan sepakbola dan politik yang sangat bersinggungan, maka harus melihat apa yang terjadi di Brazil. Menjalankan politik secara prosedural lewat

<sup>8</sup> H. E. Chehabi, "A Political History of Football in Iran", dalam jurnal *Iranian Studies*, Vol. 35, No. 4, Sports and Games, 2002, hlm. 383.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 393.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dapat dilihat dalam Gary Armstrong dan Jon P. Mitchell, *Global and Local Football: Politics and Europeanisation on the Fringe of the EU*, London: Routledge, 2008.

<sup>12</sup> Stephen Wagg, "Fat city? British Football and the Politics of Social Exclusion at the Turn of the Twenty-first Century", dalam Stephen Wagg, *British Football and Social Exclusion*, London: Routledge, 2004, hlm. 9.

<sup>13</sup> Franklin Foer, *Melihat Dunia Lewat Sepakbola*, Jakarta: Marjin Kiri, 2006.

pemilihan umum, di sanalah sepakbola dijadikan sebagai sebuah komoditas yang harus diperebutkan untuk menuju salah satu jalan ke kursi kekuasaan di Brazil.

Merujuk pada kejadian tahun 1982 di mana ketika itu tim sepakbola asal Sao Paulo, *Corinthians* sedang mengadakan pemilihan Presiden tim sepakbola tersebut. Ada dua kubu yang bertarung memperebutkan posisi ini, yaitu kubu *Order and Truth* dengan kubu *Corinthian Democracy*.<sup>14</sup> Kelompok *Order and Truth* adalah kelompok pengusaha dan politisi yang berasal dari luar kubu tim ini dan sangat konservatif, yaitu merujuk pada sistem lama di Brazil yang berdasar pada oligarki kekuasaan ketika itu.. Kubu lainnya adalah *Corinthian Democracy* adalah kubu yang sangat berikatan dengan liberalisasi yang sedang terjadi di Brazil ketika itu, dan yang menarik adalah kubu ini dipimpin oleh seorang pemain *Corinthians* itu sendiri yang bernama Socrates. Singkat cerita akhirnya *Corinthian Democracy* berhasil memenangkan pemilihan presiden klub, dengan mengusung seorang sosiolog sebagai presidennya. Hal ini tak lepas dari kerja keras Socrates menggalang kekuatan dan dana, serta janji yang mengatakan bahwa dia akan berhenti sebagai pemain sepakbola jika *Order and Truth* yang menang dalam pemilihan presiden klub, karena menurutnya kelompok lawan hanya menggunakan *Corinthians* sebagai alat atau batu loncatan untuk karir politik mereka.<sup>15</sup> Kejadian ini memperlihatkan sebuah kasus dari banyak kasus persinggungan antara sepakbola dan politik di Brazil.

Melihat keterkaitan antara sepakbola dan politik di Indonesia, maka di awal sejarah berkembangnya sepakbola di Indonesia, tidak lepas dari pengaruh politik saat itu. Di awal 1900-an sepakbola mulai berkembang di Indonesia, terutama di tanah Jawa.<sup>16</sup> Ketika itu sepakbola digunakan oleh masyarakat nusantara sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap Belanda lewat

<sup>14</sup> Matthew Shirts, "Playing Soccer in Brazil: Socrates, Corinthians, and Democracy", dalam jurnal *The Wilson Quarterly* (1976-), Vol. 13, No. 2, 1989, hlm. 119.

<sup>15</sup> Salah satu tim lainnya di Sao Paulo, yaitu Sao Paulo FC, dipimpin oleh seorang politisi yang akhirnya juga maju dan menang sebagai Pemimpin Daerah Sao Paulo ketika itu, *ibid.*, hlm. 120.

<sup>16</sup> UU Agraria 1870 membuka keran liberalisasi dan kapitalisme global ke tanah jajahan Hindia Belanda. Lewat undang-undang tersebut maka banyak orang-orang Barat ataupun Tionghoa datang ke Nusantara untuk berinvestasi. Kedatangan mereka tidak hanya membawa masalah ekonomi semata tetapi juga kebudayaan atau kebiasaan, yaitu olahraga lewat sepakbola. Dari para warga asing inilah, masyarakat bumiputera mulai menganal sepakbola, terutama bagi mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing ketika itu. Dilihat dari Srie Agustina Palupi, *Politik dan Sepakbola: di Jawa 1920-1942*, Jogjakarta: Ombak, 2004, hlm. 21-32.

persekutuan sepakbolanya, padahal awalnya hanya merupakan ajang untuk melepas penat dan juga sebagai lahan profesionalisme olahraga sebagai sebuah pekerjaan.<sup>17</sup>

Pada 19 April 1930, lahirlah organisasi sepakbola Indonesia, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), sebagai sebuah bentuk bersatunya perkumpulan *bond-bond* Indonesia yang tidak setuju dengan pengelolaan sepakbola di Nusantara oleh NIVB (*Nederlandsch Indische Voetbal Bond*).<sup>18</sup> Dua tahun setelah berdirinya PSSI, tepatnya di tahun 1932, merupakan puncak perlawanan insan sepakbola nusantara terhadap NIVB, dengan cara memboikot peliputan berita pertandingan liga sepakbola NIVB oleh pers, yang dimotori oleh pers Tionghoa, karena mereka sadar kepentingan nasional lebih utama dari pada kepentingan penjajah.<sup>19</sup> Pemerintah Kolonial Belanda pun menyadari bahwa pemberian ruang bagi sepakbola Indonesia tak ubahnya seperti pemberian ruang bagi berkembangnya ide-ide kemerdekaan Indonesia, sehingga setelah itu banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial dengan membatasi atau bahkan melarang pertandingan PSSI.<sup>20</sup>

Di Indonesia sekarang ini, ruang untuk masuknya elemen politik praktis pada dunia sepakbola ada ketika rezim Orde Baru telah berganti menjadi rezim Reformasi.<sup>21</sup> Era Reformasi dianggap sebagai titik balik untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang dinilai terlalu berpusat pada pemerintah pusat atau sentralistik. Desentralisasi merupakan jawaban atas ketidakpuasan proses pengurusan negara di tingkat pusat. Membuat pemerintahan lokal yang mengurus seluk beluk permasalahan, kepentingan, dan urusan lokal merupakan tujuan dari desentralisasi. Proses desentralisasi di Indonesia pasca jatuhnya Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, ditandai dengan disahkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Adanya pengesahan atas undang-undang ini menandai babak baru sistem pemerintahan di

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>18</sup> Eddi Elison, *PSSI: Alat Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Mullya Angkasa, hlm. 25 – 58.

<sup>19</sup> Srie Agustina Palupi, *Op. Cit.*, hlm. 79-80.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>21</sup> Dinamika sepakbola dan politik di masa Orde Baru tidak sedinamis sekarang ini. Hal ini dikarenakan ketika Orde Baru tidak ada pemilihan kepala daerah langsung. Ketika waktu itu pula, setiap tim sepakbola daerah di Indonesia dimiliki oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi setempat, sehingga kepala daerah secara otomatis menjabat sebagai ketua tim sepakbola setempat.

Indonesia, yaitu pelimpahan kekuasaan yang lebih kepada pemerintah daerah atau lokal dari pemerintah pusat.

Perjalanan desentralisasi dalam era Reformasi terus mengalami dinamika. Pada tahun 2004, DPR RI mengesahkan UU No. 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Hal utama yang membuat wajah perpolitikan Indonesia berubah dari situasi di Orde Baru adalah dalam Undang-undang ini diatur bahwa dalam memperkuat atau mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya, maka pemimpin daerah sampai tingkat II haruslah dipilih langsung oleh masyarakat. Pemimpin Daerah dipilih langsung dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada),<sup>22</sup> dari sebelumnya yang dipilih dalam sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pertengahan tahun 2005 adalah pertanda sebagai dimulainya era di Indonesia sebagai salah satu bentuk diimplementasikannya UU No. 32 tahun 2004.<sup>23</sup>

Terlepas dari kontroversi dan permasalahan pro-kontra terhadap pelaksanaan Pemilukada di Indonesia, kini sumber atas pilihan kekuasaan menjadi tersebar, kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih, bukan hanya segelintir elit di Parlemen Daerah (DPRD). Setiap calon kepala daerah, haruslah berpikir keras bagaimana merebut hati para pemilih untuk memilih mereka. Bersafari, berkeliling, atau mengunjungi daerah pemilihan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh para calon kepala daerah. Masyarakat yang memiliki hak pilih haruslah mengenal calon mana saja yang akan bertarung merebutkan kekuasaan tertinggi di daerah tersebut.

Konsolidasi atau lobi politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah kepada partai politik yang diharapkan dukungannya, memang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan utama lolos sebagai calon kepala daerah. Setiap

---

<sup>22</sup> Lewat UU no.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka singkatan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Pemilukada, bukan lagi Pilkada. Hal ini berkaitan dengan kewilayahan dimana Pilkada bersifat kedaerahan sementara Pemilukada bersifat secara nasional dan satu paket dengan rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Hayatullah, "Sebutan Pilkada jadi Pemilukada", diunduh dari <http://theglobejournal.com/kategori/politik/sebutan-pilkada-jadi-pemilukada.php>, pada 19 Februari 2012, pukul 20.54 WIB.

<sup>23</sup> Pemilihan kepala daerah langsung yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia sebagai implementasi dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dilaksanakan di Kutai Negara, Kalimantan Timur pada tahun 2005 untuk memilih Kepala Daerah Kutai Negara.

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus didukung dengan minimal 15% dari suara partai di DPRD.<sup>24</sup> Format pemilihan langsung kepala daerah ini, mau tidak mau membuat para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah berpikir keras bagaimana mengenalkan diri mereka masing-masing kepada masyarakat calon pemilih. Lobi ke partai politik hanya menjadi langkah awal formal dalam menuju perebutan tampuk kekuasaan tertinggi di daerah, tetapi pertarungan sebenarnya ada di tataran *grass root*.

Para calon pemimpin daerah akan mencari cara untuk mendapatkan suara dari berbagai macam bentuk atau instansi yang mampu membuat simpul-simpul kerumunan orang atau massa. Mendapatkan suara *grass root* salah satunya mempolitisasi sepakbola dengan menjadikannya sebagai sebuah modal sosial, selain bentuk-bentuk modal sosial lainnya seperti organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan, misalkan. Hal inilah yang terjadi di Pemilukada Kota Bandung 2008.<sup>25</sup> Latar belakang sejarah, menjadikan Persib kini mendarah daging bagi setiap penduduk Kota Bandung. Sepakbola yang diwakili oleh Persib bukan lagi menjadi sebuah tim sepakbola semata, tetapi menjadi identitas diri sebagai pengenal atas kebudayaan kota Bandung/budaya Sunda. Hal yang kemudian juga perlu dilihat kenapa Persib bisa menjadi objek yang menarik untuk dipolitisasi oleh calon-calon kepala daerah yang bertarung di Bandung dan Jawa Barat. Politisasi yang terjadi dalam kasus ini adalah menjadikan Persib sebagai modal sosial dan menunjukkannya pada waktu kampanye. Dada Rosada Walikota Bandung 2003-2013, telah berurusan dengan Persib semenjak 1988. Investasi sosial yang telah dibangunnya atas Persib menjadi begitu besar, sehingga hal ini memberikan sebuah *symbolic power* atas legitimasinya sebagai pemilik kekuasaan Persib.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Pasal 56 ayat 2, UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

<sup>25</sup> Penulis tidak menganggap kasus yang peneliti angkat merupakan kejadian khusus yang hanya terjadi di Kota Bandung. Penulis menemui hambatan untuk mencari karya-karya ilmiah untuk membandingkan dinamika sepakbola dan politik di daerah lainnya, sehingga penulis sulit untuk mencantumkan di mana lagi terjadi persinggungan antara sepakbola dan politik di daerah lain, terutama menjelang pemilukada.

<sup>26</sup> Bourdieu mengatakan bahwa *symbolic power* lahir dari sebuah perjuangan untuk mendapat posisi dalam kekuasaan. Ketika akhirnya seseorang mendapat posisi kekuasaan, apalagi merangkap jabatan, berarti dia telah mengatur legitimasi atas kekuasaannya. Pierre Bourdieu,

Persib yang memiliki kelompok suporter Bobotoh dengan penjabaran jelas tentang keanggotaannya, AD/ART, serta pengakuan dari pihak lain yang lain. Hal lainnya adalah kelompok ini memiliki basis massa yang fanatik secara kualitas besar secara kuantitas. Di sisi lain, harus dilihat bahwa memiliki modal sosial bukan berarti dapat dimiliki secara instan, tapi harus ada proses pembangunan kepercayaan, membuat relasi sosial, dan berkontribusi sebagai seorang tokoh dalam modal sosial yang dibentuknya. Hal ini yang sudah dilakukan oleh Dada Rosada, di mana beliau sudah menjadi Ketua Umum Persib dari tahun 2003 hingga dibentuknya PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB) di awal tahun 2009 sebagai tanda berakhir masa tugasnya. Durasi waktu yang cukup panjang sebagai Ketua Umum Persib, berarti ada modal sosial yang dibangun oleh Dada Rosada di dalam Persib. Meskipun di era pengurusan Dada Rosada, Persib belum pernah lagi menjadi juara sepakbola Liga Indonesia, animo para Bobotoh terhadap Persib tetap besar.

Pada Pemilu Kota Bandung tahun 2008, Dada Rosada, Walikota Bandung 2003-2013, memenangkannya, bertarung dengan status *incumbent*. Dada Rosada yang berpasangan dengan Ayi Viviananda mampu meraih kemenangan 64.98% suara.<sup>27</sup> Di saat yang sama, Dada Rosada menjadi Ketua Umum Persib. Simbol-simbol Persib, digunakan oleh Dada Rosada ketika itu dalam atribut kampanyenya. Di sinilah penulis melihat bahwa kuantitas dan loyalitas para pendukung Persib atau kita sebut Bobotoh, merupakan daya tarik bagi para calon Walikota, terutama bagi Dada Rosada yang bertarung di Pemilu Kota Bandung, untuk diperebutkan. Adanya hal ini menjadikan bukti lapangan bahwa klub sepakbola menjadi objek politisasi dalam pemilu kota di Indonesia.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pengalaman penulis, Dada Rosada banyak menggunakan lambang atau simbol-simbol Persib dalam atribut-atribut kampanyenya. Hal ini menjadi bukti baru adanya keterkaitan antara sepakbola sebagai sebuah tim

---

“Social Space and Symbolic Power”, American Sociological Association, dalam jurnal *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1, 1989, hlm. 14-25

<sup>27</sup> KPUD Kota Bandung, “Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2008”, diunduh dari <http://kpud-bandungkota.go.id/index.php?pilih=hal&id=16>, pada 30 November 2011, pukul 20.59 wib.

sepakbola dengan politik di Indonesia, terutama di Kota Bandung, yaitu dalam pemilihan kepala daerah. Keterkaitan ini menjadi sebuah politisasi di mana tim sepakbola dijadikan modal sosial dalam pemilihan kepala daerah. Modal sosial sebagai penguatan dukungan suara di Pemilukada adalah sebuah hal yang lumrah. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, bahwa bentuk umum dari modal sosial yang ada di masyarakat untuk akumulasi dukungan kepada calon kepala daerah diantaranya adalah organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan sebagainya. Merujuk pada pembahasan sebelumnya, penulis akan coba menguraikan permasalahan penelitian pada pembahasan selanjutnya secara lebih mendalam. Pertama, penulis mencoba untuk mendapatkan jawaban langsung dari pelaku atau aktor politik, yaitu Dada Rosada dan tim suksesnya mengenai politisasi Persib pada Pemilukada Kota Bandung 2008. Kedua, penulis nantinya akan menjelaskan Persib sebagai sebuah identitas masyarakat Kota Bandung. Ketiga, penulis mencoba mencari apakah terdapat timbal balik bagi Persib atas kemenangan Dada Rosada.

Penulisan dalam latar belakang serta permasalahan penelitian telah menjelaskan secara garis besar, masalah apa yang penulis coba ungkap jawabannya. Pemilukada, Persib, dan modal sosial, mewakili berbagai disiplin aspek di dalamnya, sehingga pertanyaan penelitian akan sangat membantu mengarahkan penelitian ini. Adapun pertanyaan utama dalam penulisan ini adalah: *“Faktor-faktor apa saja yang membuat Dada Rosada mempolitisasi Persib pada Pemilukada Kota Bandung 2008?”*

### **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Melakukan sebuah penelitian yang merupakan sebuah kewajiban, tidak hanya bertujuan untuk memenuhi sebuah prasyarat tertentu, di dalamnya dipastikan harus terdapat sebuah tujuan penulisan yang bersifat secara teoritis maupun praktis. Secara teori, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa dalam merebutkan atau mempertahankan kekuasaan, pegnгуasa atau politisi dapat menggunakan berbagai macam cara, salah satunya politisasi. Adanya politisasi dilakukan untuk menarik sesuatu yang tidak terkait dengan politik tetapi mampu mengumpulkan simpul-simpul massa. Bentuk dari politisasi yang terjadi dalam

kasus ini adalah menarik Persib sebagai modal sosial dalam kampanye Dada Rosada pada Pemilu Kota Bandung tahun 2008. Persib sebagai institusi olahraga merupakan bentuk lain dari modal sosial yang biasanya berbentuk organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan sebagainya.

Terjadinya keragaman atas bentuk modal sosial dari modal sosial lainnya yang biasa dilihat ada sebuah hal yang lumrah, asalkan irisan dengan kerangka pemikiran yang digunakan mampu terlihat. Bentuk modal sosial tidaklah selalu kaku dalam konstelasi politik, dengan penelitian ini diharapkan bahwa adanya sebuah fenomena atas bentuk modal sosial yang diperebutkan dalam sebuah pemilu di Indonesia dapat terjadi, dan Pemilu Kota Bandung 2008 merupakan pembuktian secara teoritis.

Penulisan skripsi ini merupakan sebuah kejadian di lapangan di mana ternyata fenomena politik praktis telah merambah ke dunia-dunia atau segmen-segmen yang tidak pernah diajarkan sebelumnya di mata kuliah-kuliah di Departemen Ilmu Politik UI. Persib dan Dada Rosada di Kota Bandung ini merupakan sebuah fenomena yang mungkin sebenarnya juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, tetapi mungkin belum atau masih sedikit yang terdokumentasi atau diteliti sebelumnya. Penulis merasa bahwa penulisan ini lahir atas sebuah fenomena baru di Indonesia. Belum atau masih sedikitnya dokumentasi dan penelitian atas fenomena sepakbola dan politik inilah yang kemudian juga menjadi salah satu kesulitan bagi penulis untuk mencari pembandingnya. Harapannya ke depan semoga nanti akan ada penelitian lanjutan yang menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur signifikansi atas ke dua hal ini. Ada kelanjutan atas penulisan skripsi ini dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu melihat pengaruh, dengan metode kuantitatif. Harapannya akan lebih mengetahui pengaruh dari politisasi tim sepakbola sebagai modal sosial dalam membawa kemenangan di pemilihan kepala daerah, dibanding modal-modal sosial yang lainnya.

Secara praktis, hal yang menjadi perhatian bahwa ada kenyataan mesin-mesin partai kadang tidak berjalan dengan baik menghadapi pemilihan kepala daerah. Kurang efektifnya mesin-mesin partai, membuat tim sukses lebih mengoptimalkan modal-modal yang dimiliki oleh para calon kepala daerah, salah

satunya adalah modal sosial. Saran selanjutnya masih pada realita lapangan, yaitu hubungan antara politisi dan masyarakat yang dipimpinnya, dalam hal ini masyarakat sepakbola. Hubungan politisi dengan sepakbola haruslah terjalin dengan sangat baik dan berkontribusi. Politisi seharusnya sudah pernah mengembangkan atau ikut membantu prestasi sepakbola tersebut lewat cara-cara yang profesional bukan mengandalkan APBD. Kontribusi lainnya adalah membantu pengembangan pemain muda dan juga membangun infrastruktur olahraga misalkan. Kontribusi yang telah diberikan oleh politisi jauh sebelum Pemilu 2009 seharusnya tidak perlu dipolitisasi ketika kampanye. Penarikan institusi yang tidak berhubungan dengan politik secara struktur dalam Pemilu 2009 mengesankan pemanfaatan saja. Politisasi atas pencitraan semata dengan datang ke stadion memakai atribut-atribut tim sepakbola tersebut hanya menjelang dan di saat kampanye untuk Pemilu 2009.

Hal lainnya adalah dengan adanya penelitian ini membuka peluang atau lebih mampu menarik peneliti-peneliti lainnya untuk meneliti lebih banyak kajian tentang Sepakbola dengan Politik. Hal ini akan menjadi lahan baru dan lebih luas bagi para akademisi politik sebagai *field of research*. Hal lainnya adalah masyarakat lewat penelitian-penelitian seperti ini diharapkan lebih mampu mengetahui posisi-posisinya dalam konstelasi politik lewat pemetaan-pemetaan modal sosial, sehingga posisi *feed back* antara yang dipilih dan memilih lebih memiliki keterikatan, dan *political will* akan terbangun di masyarakat. Secara khusus, signifikansi penulisan ini adalah membuka sebuah kasus baru atas dinamika politik yang ada di awal tahun 2000-an di Indonesia. Kini telah hampir satu dekade terlewat, dan penulis merasa bahwa tema ini harus dihidupkan kembali sebagai sebuah penelitian Ilmu Politik. Secara umum signifikansinya adalah penulis ingin mencoba melihat dan memperjelas bahwa secara teori, hubungan antara olahraga, terutama sepakbola dengan politik begitu kuat dan saling mempengaruhi.

Masuknya unsur politik dalam olahraga memang tidak terelakan. Perlu dipahami lebih lanjut dan diteliti lebih mendalam adalah efek dari masuknya politik dalam olahraga yang berekses secara negatif atau positif. Di beberapa kasus, penguasa politik atau politisi bisa berhasil membawa prestasi kepada tim

olahraga (sepakbola) dalam perjalanannya.<sup>28</sup> Politisi membutuhkan olahraga sebagai sebuah simbol atau pernyataan atas sikap politiknya. Sementara itu di sisi lainnya olahraga diharapkan ketika dipegang oleh orang yang dekat dengan sumber kebijakan kekuasaan akan mendapat kemudahan dan keuntungan dalam menjalani program-programnya. Konsepnya adalah mempertanyakan/meneliti lebih lanjut bahwa politik lewat para politisinya diharapkan mampu memberi efek positif terhadap olahraga atau tim olahraga yang dimasukinya.<sup>29</sup>

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Penulisan skripsi ini, menggunakan beberapa skripsi sebagai tinjauan pustaka. Skripsi-skripsi ini dikeluarkan oleh Departemen Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, dengan tema yang sama, yaitu hubungan antara olahraga dan politik. Berikut ulasan tentang tinjauan pustaka pada penulisan skripsi ini.

Tinjauan pustaka untuk menjelaskan konsep modal sosial menggunakan karya Andi Rahman. Andi Rahman mengatakan model dari modal sosial dapat berupa organisasi sosial yang mendukung seseorang ketika dibutuhkan, karena orang-orang tersebut telah membantu mereka atau telah membangun jaringan sosial dengan mereka semenjak lama.<sup>30</sup> Bentuk-bentuk modal sosial dalam dinamika politik di daerah di Indonesia, dicontohkan oleh Andi, seperti yang terlihat di Banten, yaitu yang dimiliki oleh dua kubu (Golkar dan PKS) yang paling berpengaruh atas kekuasaan di Banten ketika penelitian tersebut dilakukan. Modal sosial yang dimiliki oleh Golkar-Jawara dan PKS-Tarbiyah menurut Andi Rahman berbeda basisnya. Golkar-Jawara mempunyai jaringan lokal dan nasional, di mana jaringan lokalnya adalah kyai, kepala desa, pejabat birokrasi,

<sup>28</sup> Silvio Berlusconi, mantan PM Italia (1994-1996; 2001-2011) yang juga Presiden/Pemilik tim Sepakbola AC Milan di Italia (1986-2008), berhasil membawa AC Milan menjuarai 7 kali juara Serie A Liga Italia. 5 kali juara Liga Champions Eropa, 1 kali juara Coppa Italia, 6 kali juara Super Coppa Italia, 5 kali juara Piala Super Eropa, 2 kali juara Piala Interkontinental, 1 kali juara Piala Dunia Antarklub, dan 3 kali juara Trofeo TIM. Diolah dari berbagai sumber.

<sup>29</sup> Terry Monnington, "Politicians and Sport: Uses and Abuses", dalam Allison Lincoln (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 125-127.

<sup>30</sup> Tesis oleh Andi Rahman Alamsyah, *Bantenisasi Demokrasi: Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan (Studi tentang Demokratisasi Serang, Banten. Demokratisasi Serang, Banten, Pasca-Soeharto, Tahun 2004-2006)*, Depok: FISIP UI, 2007, hlm. 81-87 hlm. 93.

pengusaha, tentara, polisi, LSM, mahasiswa, akademisi, dan organisasi-organisasi kepemudaan (terutama organisasi jawara terpenting, yaitu Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia dan Tjimande, Tarik Kolot, Djeruk, Hilir); sementara jaringan nasionalnya adalah politisi, pengusaha, polisi, dan militer. PKS-Tarbiyah berbasis pada jaringan orang-orang berpendidikan di perkotaan seperti mahasiswa, pelajar, pedagang, buruh, LSM, ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok pengajian di perumahan, kampung, pabrik, dan perkantoran, terutama melalui tarbiyah.<sup>31</sup>

Tulisan selanjutnya yang menjadi tinjauan pustaka adalah karya Rosa Badrul Munir, yang berjudul, *Terpilihnya Kembali Walikota Kediri H.A. Maschut Untuk Periode 2004-2009 dan Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri*. Skripsi ini berisi tentang bagaimana H.A. Maschut, yang ketika itu menjabat sebagai Walikota Kediri, terpilih kembali menjadi Walikota Kediri untuk periode berikutnya. Rosa selaku penulis menangkap bagaimana dinamika yang terjadi di dalam DPRD Kota Kediri ketika pemilihan berlangsung.

Faktor yang unik diangkat dari permasalahan ini adalah, Rosa mencoba melihat bahwa posisi H.A. Maschut sebagai Ketua Umum tim sepakbola Persik, merupakan salah satu faktor terpilihnya kembali menjadi Walikota Kediri. Rosa melihat hal ini terjadi karena ternyata banyak anggota DPRD yang menjadi anggota/pengurus Persik, sehingga hal ini memuluskan jalan kemenangan beliau.

Persik ternyata ketika itu menjadi sebuah ikon Kota Kediri, selain Gudang Garam. Keberhasilan Persik menjuarai Ligin (Liga Indonesia) IX tahun 2003, mengangkat pamor Persik di mata warga Kediri. Keberhasilan besar ini menjadi terasosiasi dengan keberhasilan pengurus di bawah pimpinan H. A. Maschut yang juga Walikota Kediri. Dari keterkaitan ini Rosa mendalami tentang hubungan Persik dan dinamika politik Kota Kediri ketika itu.

Dilihat sekilas berbagai kejadian yang diangkat oleh Rosa dalam skripsinya, hampir sama dengan kejadian yang penulis teliti dalam skripsi ini. Hal-hal tersebut adalah politik lokal, pemilihan kepala daerah, tim sepakbola lokal sebagai faktor lain dalam dinamika politik Indonesia, dan ketua tim sepakbola lokal adalah walikota daerah tersebut. Banyaknya kesamaan ini, tentu saja harus

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

membuat penulis mampu membedakan secara signifikan atas penelitian yang dilakukan.

Perbedaan yang mencolok antara skripsi yang dibuat oleh Rosa dan skripsi penulis adalah lokasi kejadian, yaitu Rosa di Kediri, sementara penulis di Bandung. Hal pembeda lainnya adalah dalam pemilihan walikota di Kediri tahun 2004 dipilih oleh anggota DPRD Kota Kediri atau dikatakan secara tidak langsung. Di Bandung, Pemilukada Kota Bandung tahun 2008, dilaksanakan secara langsung atau dengan kata lain, masyarakat Bandung-lah yang memilih walikota-wakil walikotanya sendiri. Di sinilah penulis harus melakukan penelitian yang lebih mendalam, karena di Kediri, pengikat antara walikota dan anggota DPRD yang memilih walikota adalah bersama-sama mengurus Persik. Di Bandung penulis harus melihat berapa besarkah pengikat antara masyarakat Kota Bandung dan Walikota *incumbent*, Dada Rosada, lewat Persib itu sendiri.<sup>32</sup>

Karya tulis lainnya yang menjadi tinjauan pustaka adalah milik Petra Hahijary, yang berjudul, Keterlibatan Elit Politik dalam Organisasi Olahraga di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Perserikatan *Baseball* dan *Softball* Amatir Seluruh Indonesia. Skripsi ini mencoba melihat berbagai kasus organisasi olahraga, dengan contoh Organisasi Perserikatan *Baseball* dan *Softball* Amatir di Indonesia yang ternyata banyak diketuai atau diurus oleh para elit politik. Olahraga seharusnya murni dari berbagai kepentingan kelompok atau politik. Olahraga kemudian untuk mendukung berjalannya roda profesionalisme dalam mengikuti kompetisi olahraga, maka olahraga haruslah berbentuk sebuah organisasi. Dengan berbentuk organisasi, maka olahraga akan lebih mudah mengatur segala keperluan dan dalam proses berjalannya olahraga itu sendiri. Harapan akhir dengan adanya organisasi olahraga yang profesional, akan mendorong olahraga menjadi sebuah industri yang menjanjikan dari segi ekonomi.

Orang-orang yang pernah bergelut di bidang olahragalah yang dianggap pantas mengurus organisasi olahraga. Petra yang meneliti penelitian ini, memberikan fakta lain, ternyata banyak dari pengurus atau ketua organisasi

---

<sup>32</sup> Skripsi yang ditulis oleh Rosa Badrul Munir, *Terpilihnya Kembali Walikota Kediri H.A Maschut Untuk Periode 2004-2009 dan Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri*, Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Depok, 2006.

olahraga di Indonesia bukanlah mantan olahragawan atau mantan atlet, tetapi para elit politik. Hal ini terjadi karena olahraga dianggap sebagai sebuah hal yang sangat populis yang mampu mencitrakan para elit politik yang peduli dengan olahraga. Pemanfaatan ini mengundang kritik karena olahraga diurus bukan karena kesenangan atas membangun organisasi olahraga, tetapi untuk kepentingan elit politik yang bersangkutan.

Petra menuliskan bahwa tidak semata-mata bahwa masuknya elit politik dalam organisasi olahraga, hanya menguntungkan elit politik saja dan organisasi olahraganya tidak diurus. Organisasi olahraga, menurut Petra, bisa dikatakan cukup nyaman dengan diketuai oleh elit politik yang mempunyai banyak sumber pendanaan. Tak dipungkiri bahwa dalam menjalankan roda organisasi olahraga dan mencapai prestasi olahraga membutuhkan dana. Elit politik yang menduduki jabatan politik inilah yang dianggap oleh organisasi olahraga merupakan sumber pendanaan yang tepat, sehingga anggapannya ketika itu hubungan antara elit politik dan organisasi olahraga adalah sebuah hubungan atau simbiosis mutualisme.

Penulis melihat bahwa dari skripsi Petra ini memberikan sebuah gambaran lain atas hubungan antara elit politik dan organisasi olahraga. Dalam kasus yang penulis teliti, mencoba melihat bahwa adanya hubungan antara elit politik dan organisasi olahraga, yaitu Dada Rosada, Walikota Bandung 2003-2013 yang juga Ketua Umum Persib, menggunakan Persib sebagai modal sosial pada Pemilu Kota Bandung 2008. Pemilu Kota Bandung 2008, dilaksanakan secara langsung, atau dipilih oleh rakyat. Perbedaan dengan penulisan skripsi ini, penulis mencoba melihat bagaimana dalam pemilihan umum kepala daerah di Bandung, elit politik dalam hal ini Dada Rosa menggunakan organisasi olahraga, Persib, untuk dipolitisasi dengan dijadikan modal sosial, sebagai cara mendapat legitimasi kekuasaan dari rakyat Kota Bandung.<sup>33</sup>

Olahraga secara umum kini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu olahraga perseorangan dan olahraga untuk kebutuhan tontonan. Olahraga secara perseorangan berarti tidak adanya gesekan kepentingan. Olahraga tersebut hanya

---

<sup>33</sup> Skripsi yang ditulis oleh Petra Hahijary, *Keterlibatan Elit Politik dalam Organisasi Olahraga di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Depok, 1988.

dilakukan untuk kepentingan pribadi dan tujuan yang ingin dicapai yaitu memelihara kesehatan jasmani dan rohani serta untuk mengisi waktu luang. Bentuk olahraga tontonan, merupakan olahraga yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kategori ini dikarenakan olahraga tersebut melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya, mulai dari media, hingga pemerintah setempat.<sup>34</sup>

Pembahasan mengenai olahraga dan politik secara praktis bisa dikatakan tidak dapat dilakukan, hal ini jika mengacu pada *Olympic Charter* (Pedoman Olimpiade), yang menyatakan bahwa olahraga harus bersih dari berbagai intervensi dan permasalahan politik.<sup>35</sup> Melihat pada kenyataan di lapangan, ternyata penggambaran atas intervensi politik dalam dunia olahraga tidak dapat dipandang sebelah mata.<sup>36</sup> Oleh karenanya, dalam kerangka ilmu pengetahuan, studi lintas ilmu antara Ilmu Olahraga dan Ilmu Politik, berusaha menjawab permasalahan ini.

Sepakbola (olahraga) dan politik sebenarnya bukan sebuah studi lintas ilmu yang baru dalam Ilmu pengetahuan. Di Amerika Serikat misalkan, adalah hal yang sudah menjadi biasa ketika calon-calon kepala daerah di sana menggunakan olahraga sebagai sebuah daya tarik bagi para calon pemilihnya, dan hal ini telah menjadi sebuah tulisan ilmiah.<sup>37</sup> Lain halnya dengan Franklien Foer, seorang wartawan sepakbola yang berkeliling dunia mengunjungi beberapa negara yang dianggap sebagai kiblat sepakbola, di mana terdapat relasi antara sepakbola dan kehidupan sosial, budaya, dan politik.<sup>38</sup> Sepakbola mampu menjadi sebuah

---

<sup>34</sup> M.F. Siregar, *Peranan Olahraga dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Prisma, 1978, hlm. 45-62.

<sup>35</sup> Dijelaskan bahwa nilai-nilai Olimpiade harus bebas dari masalah, intervensi, serta diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender. Dapat dilihat dalam International Olympic Committee, *Olympic Charter*, Lausanne, 2011, hlm. 11.

<sup>36</sup> Olahraga menjadi sebuah instrumen politik secara nasional ataupun internasional bagi sebuah negara. Olahraga kini bukan hanya sekedar pertandingan, tetapi banyak sekali instrumen-instrumen politik yang ada di dalamnya, dan jelas hal ini harus diteliti lebih jauh oleh ilmu pengetahuan sebagai sebuah *field study*. Martin Barry Vinokur, *More Than a Game: Sports and Politics*, New York: Greenwood Press, 1988, hlm. 17.

<sup>37</sup> Jay Coakley, *Sport in Society: Issues and Controversies (Seventh Edition)*, New York: McGraw-Hill, 2001, hlm. 392.

<sup>38</sup> Sebuah buku tentang perjalanan seorang wartawan berkeliling dunia dan melihat bagaimana sepakbola bukan semata sebuah pertarungan 90 menit di atas lapangan hijau. Sepakbola ternyata

identitas bagi masyarakatnya sebagai pembeda dengan masyarakat lainnya, serta sebagai proses identifikasi dari kecintaan masyarakat terhadap tim kesayangannya, baik bersifat kedaerahan di kancah nasional, atau identifikasi atas rasa nasionalisme di kancah internasional.<sup>39</sup> Di Indonesia studi-studi tentang permasalahan olahraga dan sepakbola dengan politik masih jarang ditemukan. Penulis menemukan ulasan tentang ideologi Pancasila sebagai dasar kebijakan olahraga di Indonesia, ditulis oleh Ian Adams (2003).<sup>40</sup>

Sepakbola di Indonesia dari awal sejarahnya tak lepas dari permasalahan politik.<sup>41</sup> Keterkaitan itu pula yang juga terjadi di Bandung, seperti yang telah dibahas di dalam latar belakang. Persib yang merupakan institusi olahraga, dipolitisasi oleh Dada Rosada dengan dijadikan sebagai sebuah modal sosial dalam Pemilukada Kota Bandung 2008, sehingga Persib ikut masuk dalam dinamika politik yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung. Politisasi atas Persib dikarenakan Persib masuk ke dalam kategori olahraga hiburan yang mampu menarik perhatian masyarakat dan membuat simpul-simpul massa. Hal ini juga diutarakan oleh Marx bahwa sebenarnya olahraga bisa bersinggungan dengan politik jika diliput oleh dari media massa layaknya institusi-institusi masyarakat lainnya. Adanya peluang ini, membuat politisi mengambil celah untuk didekatkan dengan institusi olahraga yang menarik perhatian massa

---

diberbagai belahan dunia memberikan dampak atas segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik. Baca Franklien Foer, *op. cit.*

<sup>39</sup> *Centre Natinal de la Recherche Scientifique*, dikutip oleh, Arief Natakusumah, *Drama itu Bernama Sepakbola: Gambaran Silang Sengkarut Olahraga, Politik, dan Budaya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hlm. ix.

<sup>40</sup> Ian Adams, dalam tulisannya ini memberi gambaran deskriptif bagaimana sejarah olahraga Indonesia dengan asas Pancasilanya. Beberapa hal yang dibahas adalah bagaimana sikap Indonesia yang selalu menolak untuk bertanding melawan Israel. Ada juga pembahasan tentang refleksiologi Pancasila dalam dunia olahraga internasional, atas peran Indonesia sebagai salah satu penggagas the Games of the Newly Emerging Forces (GANEFO) tahun 1963. GANEFO adalah sebuah organisasi olahraga internasional yang mengumpulkan negara-negara berkembang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh International Olympic Committee (IOC). Pembentukan GANEFO ini adalah respon Soekarno atas dikeluarkannya Indonesia sebagai anggota IOC pada saati itu karena menolak bertanding melawan Isreal, yang oleh Pancasila dianggap melawan hak-hak dasar manusia untuk merdeka karena terus menyerang Palestina. Dapat dilihat di Iain Adams, "Pancasila: Sport and the Building of Indonesia—Ambitions and Obstacles", dalam J.A. Mangan dan Fan Hong, *Sport in Asian Society: Past and Present*, London: Frank Cass, 2003, hlm. 240-257.

<sup>41</sup> Baca Srie Agustina Palupi, *op. cit.*

tersebut lewat media.<sup>42</sup> Berkaitan dengan peikiran Marx tersebut, penulis melihatnya ketika Dada Rosada menggunkann simbol-simbol Persib dalam atribut-atribut kampanyenya sebagai legitimasi atas dukungan Persib sebagai salah satu modal sosialnya.

### 1.5 Kerangka Konsep

Penulis mencoba menelaah terjadinya politisasi Persib oleh Dada Rosada pada Pemilu Kota Bandung 2008. Merujuk pada kamus Oxford, politisasi adalah *to make somebody/something become more involved in politics*,<sup>43</sup> yang berarti membuat seseorang atau sesuatu menjadi lebih terlibat dalam dinamika politik. Dada Rosda sebagai seorang agen, mempolitisasi Persib dengan menggunakannya sebagai modal sosial.

Pemahaman tentang modal sosial haruslah diketahui sedemikian rupa sehingga dapat mengaitkan sepakbola ke dalam sebuah fenomena sosial politik. Mengaitkan kembali sepakbola sebagai modal sosial, penulis melihat dengan konsep modal sosial yang disampaikan oleh Bourdieu. Penekanan bahwa modal sosial adalah aset bersama atas sebuah kelompok yang jelas asalnya, batasan keanggotaannya dan diakui oleh kelompok lain, merupakan teori yang mampu atau paling mendekati dengan fenomena yang dibahas ini.<sup>44</sup>

Nan Lin seorang sosiolog, pernah menulis buku tentang modal sosial yang berjudul *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Modal Sosial menurut Nan Lin itu sendiri adalah sebuah hubungan atau relasi sosial yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang agar tercapai tujuannya.<sup>45</sup> Modal sosial berawal dari adanya relasi sosial. Pembangunan relasi sosial sebenarnya dan seharusnya berbasis pada kualitasnya. Oleh karena itu perlu diingat bahwa modal sosial harus dilihat dari penguatan relasi sosial secara

<sup>42</sup> Levon Chorbajian, "Toward A Marxist Sociology of Sport: An Assessment and A Preliminary Agenda", dalam Ander Yiannakis, Merril J. Melnick, Thomas D McIntyre, *Sport Sociology: Contemporary Themes (Fourth Edition)*, Iowa: Kendall/Hunt, 2002, hlm. 60.

<sup>43</sup> A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 1122.

<sup>44</sup> Michael Grenfell, *Pierre Bourdieu Agent Provocateur*, London: Continuum, 2004, hlm. 28.

<sup>45</sup> Dapat dilihat di Nan Lin, *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

kualitas bukan sekedar kuantitas.<sup>46</sup> Modal sosial coba dibedakan dengan modal politik untuk penjelasan lebih lanjut. Modal politik secara jelas adalah dukungan dari institusi politik, dalam hal ini partai politik peserta pemilu. Mendapat modal politik, berarti pasangan calon kepala daerah mendapatkan dukungan dari partai pemilu yang berarti signifikan terhadap akumulasi terhadap total dukungan suara dalam presentasi untuk mencapai suara dukungan minimum dalam legalitas keikutserataan dalam pemilukada. Bepindah ke modal sosial, berarti pasangan calon mendapatkan dukungan dari kelompok sosial masyarakat untuk mendukung mereka.<sup>47</sup>

Bourdieu berpendapat bahwa modal sosial adalah aset bersama yang dibagikan kepada tiap-tiap anggota grup, dari sini dilihat bahwa dia lebih menekankan modal sosial yang dimiliki oleh sekelompok orang. Kelompok yang dimaksud oleh Bourdieu adalah kelompok yang jelas dari segala aspek seperti dari mana asal kelompok tersebut, obligasi kelompok, dan pengakuan dari kelompok lainnya.<sup>48</sup> Tambahannya, Boerdieu menyatakan bahwa modal sosial nantinya akan mempengaruhi secara materi maupun simbolik, di mana dalam perjalanannya modal sosial akan saling menguntungkan bagi hubungan individu dan kelompok untuk memperlihatkan sebuah kekuasaan yang membuat karakter sosial.<sup>49</sup>

Menurut Boerdieu, sebenarnya modal sosial tak ubahnya seperti modal ekonomi, di mana ketika materi yang terhitung secara ekonomi telah terakumulasi dan dapat digunakan. Modal sosial lahir dari relasi sosial yang dibentuk sebelumnya. Relasi sosial akan menjadi modal sosial ketika yang telah terbentuk dan dapat digunakan atau diakumulasikan untuk kepentingan individu tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa nantinya sang individu harus sadar bahwa anggota

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Tesis oleh Andi Rahman Alamsyah, *Op.,cit Bantenisasi Demokrasi: Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan (Studi tentang Demokratisasi Serang, Banten, Pasca-Soeharto, Tahun 2004-2006)*, Depok: FISIP UI, 2007, hlm. 81-87.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Simbolik yang dimaksud di sini adalah jika modal sosial, digabung atau juga dipunyai oleh seseorang dengan modal budaya dan modal ekonomi, maka ketiga modal tersebut akan membentuk yang disebut dengan *symbolic power*. Dario Castiglone, "Introduction: Conceptual Issues in Social Capital Theory", dalam Dario Castiglone, Jan W. Van Deth and Guglielmo Wolleb, *The Hand Book of Social Capital*, Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 3.

kelompok dalam modal sosialnya dapat meminta keuntungan atas hasil investasi modal sosial yang telah dilakukan.<sup>50</sup>

Mengkategorikan olahraga maupun istitusi olahraga dalam sebuah modal sosial dalam sebuah pemilukada ada pada tataran konsep. Pelaksanaan dalam masa kampanye atau sosialisasi pengenalan sebagai calon-calon yang bertarung dalam pemilihan umum, dalam hal ini Pemilukada Kota Bandung, perlu ada pengenalan kepada calon pemilih. Situasi seperti ini terkadang dalam praktiknya dilakukan lewat simbol-simbol atau atribut dari modal-modal sosial dan modal-modal politik yang merekrutnya.<sup>51</sup> Olahraga adalah salah satu bentuk modal sosial dalam hal ini, maka simbol-simbol olahraga (Persib) digunakan dalam atribut kampanye Dada Rosasa. Hal ini karena olahraga merupakan sebuah simbol legitimasi atas kekuasaan.<sup>52</sup> Persib adalah tim olahraga atau simbol olahraga yang digunakan oleh Dada Rosada dalam kampanyenya. Sebagai sebuah tim olahraga kebanggaan orang Bandung, maka dipastikan ini akan memberikan pengaruh bagi masyarakat dan para calon pemilih.<sup>53</sup>

Memenangkan pemilihan umum, maka diperlukan sebuah strategi. Konsep pemenangan pemilihan umum, terutama di daerah, harus memperhatikan berbagai faktor, mulai dari konsolidasi partai, sampai dengan pencitraan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh calon kepala daerah dalam pemilihan umum di daerah adalah adanya sebuah budaya kedaerahan yang menjadi sebuah simbol atau keterwakilan di daerah tersebut.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Mark E. Warren, *The Nature and Logic of Bad Social Capital*, dalam *ibid*, hlm. 124.

<sup>51</sup> Yang penulis maksud adalah ketika berlangsungnya masa kampanye dalam pemilihan kepala daerah, banyak papan pengumuman, spanduk, baliho, poster dan sebagainya digunakan oleh para calon kepala daerah. Tidak hanya foto para calon dan wakilnya, banyak simbol-simbol organisasi sosial dan partai politik yang mendukung, dipampang dalam satu frame.

<sup>52</sup> Diambil dari skripsi Reynold V, *Op. Cit.*, hlm. 22.

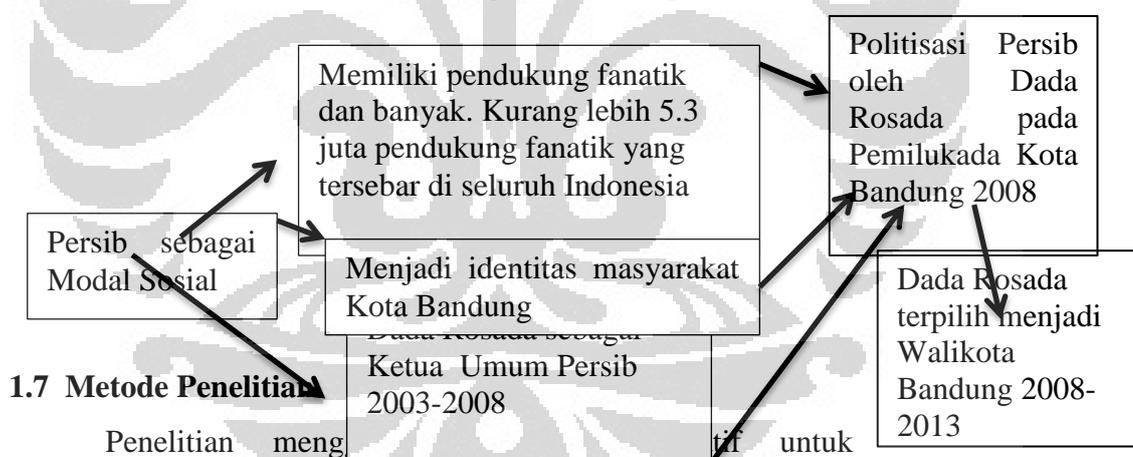
<sup>53</sup> Simbol tim olahraga atau jenis olahraga kebangsaan suatu negara atau daerah akan sangat berpengaruh pada masyarakat. Keterikatan yang mendalam sebagai simbol negara atau daerah diwakilkan oleh negara tersebut. Pengertiannya adalahh olahraga tersebut adalah simbol atas negara atau daerahnya. Allison Lincoln (ed.), *The Changing Politics of Sports*, Manchester: Manchester University Press, 1993, hlm. 70-71.

<sup>54</sup> Chay Florentini (ed.), *How To Win An Election*, Manila: ASG-CSP 2006, hlm. 15-17.

## 1.6 Alur Berpikir

Sepakbola dalam praktik politik sekarang ini dimungkinkan lewat adanya desentralisasi di Indonesia. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemlikuda) secara langsung adalah ajangnya. Salah satunya di Kota Bandung pada Pemilukada Walikota Kota Bandung tahun 2008. Meski Dada Rosada memiliki banyak modal sosial, tetapi tetap mempolitikasi Persib dalam Pemilukada Kota Bandung 2008. banyak menggunakan simbol-simbol Persib sebagai tim sepakbola kebanggaan Kota Bandung bahkan juga warga Jawa Barat. Politisasi Persib ini karena Persib seperti identitas masyarakat Kota Bandung yang tidak bisa dilupakan begitu saja dalam dinamika yang ada di Kota Bandung. Hasilnya adalah Dada Rosada terpilih pada Pemilukada langsung pertama kali di Kota Bandung tahun 2008. Dada Rosada dengan hasil ini berhak untuk menjabat sebagai Walikota Bandung periode 2008-2013. Untuk lebih jelasnya akan coba digambarkan lewat diagram di bawah ini.

**Bagan 1.1**  
**Skema Bagan Alur Berpikir**



## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian mengidentifikasi untuk menjawab pertanyaan awal penelitian dan menjadi rujukan untuk langkah apa yang harus diambil untuk menyikapi data yang didapat. Hal lainnya, metode kualitatif digunakan karena dapat mencoba masuk lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.<sup>55</sup> Metode kualitatif yang digunakan untuk memberikan/mencari penjelasan atas alasan mengapa ada permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data penelitian didapatkan dengan cara langsung

<sup>55</sup> Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice*, London: SAGE Publications, 2003, hlm. 47-75.

terjung ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan *field of reseacrh*, di mana penulis berkomunikasi langsung dengan sumber data atau narasumber.<sup>56</sup> Konsep - konsep yang ada dalam kerangka pemikiran nantinya akan digunakan sebagai pedoman penelitian, bukan sebagai uji konsep. Pada dasarnya, penggunaan metode kualitatif dalam metode penelitian penulisan ini, berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaannya mengharuskan penulis mencari jawaban dari sumber primer karena sudah menggambarkan siapa yang akan menjadi sumber utamanya. Penelitian ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pencarian penjelasan atas bagaimana kekuasaan politik di raih, dan hal ini sebaiknya menggunakan metode kualitatif.<sup>57</sup>

Pelaksanaan metode kualitatif ini akan menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi mengenai Persib sebagai modal sosial dalam Pemilu 2008. Menurut Burns, wawancara untuk menemukan data kualitatif yang lebih mendalam, bisa digunakan dengan menggunakan kategori *wawancara tak terstandarisasi*.<sup>58</sup> Penentuan narasumber ini pada dasarnya sudah ditentukan sebelumnya karena penulis sudah mengetahui narasumber utama yang mampu memberikan jawaban pertanyaan penelitian ini. Metode *snowballing sampling*, di mana satu informan yang dihubungi dapat memberi rujukan terhadap informan lain sehingga informasi yang didapat lebih mendalam dan menyeluruh, digunakan lebih kepada untuk mencari akses menuju sampel utama. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif ini adalah deskriptif, di mana penelitian berusaha menggali lebih jauh penjelasan tentang permasalahan,<sup>59</sup> yaitu dipolitisasinya Persib oleh Dada

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 19.

<sup>57</sup> Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 109.

<sup>58</sup> Menurut Burns, *wawancara tak-terstandarisasi* adalah, "percakapan yang mengalir bebas, bergantung pada kualitas interaksi sosial antara investigator dan informan, yang dapat diluruskan kembali oleh pewawancara jika percakapan menjadi menyimpang dari tema studi riset.", dikutip dari R.B. Burns, "Introduction to Research Methods", 4th edn, London: Sage, 2000, hlm. 425, dalam Lisa Harrison, *ibid.*, hlm. 106.

<sup>59</sup> Pemilihan pendekatan deskriptif ini karena penulis merasa harus lebih jauh lagi menjelaskan permasalahan yang ada berdasar pada pertanyaan permasalahan secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh variabel terpisah, merujuk pada Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992, hlm. 21.

Rosada di Pemilukada Kota Bandung 2008. Beberapa hal yang akan dijadikan alur wawancara adalah:

1. Pengenalan pewawancara dengan informan serta konteks dan tujuan wawancara
2. Pemahaman informan terhadap Persib
3. Pendalaman informasi mengenai seberapa besar kemampuan Persib sebagai dipolititsasi untuk menarik massa terutama penggunaan simbol-simbol Persib sebagai atribut dalam kampanye
4. Pengetahuan informan mengenai kebijakan bagi Persib oleh Dada Rosada sebagai pemenang Pemilukada Kota Bandung 2008.
5. Saran untuk lebih mengeksplorasi penelitian-penelitian tentang sepakbola dan politik, serta saran untuk menjaga relasi antara sepakbola dan politik sehingga tidak terjadi lagi persepsi pemanfaatan sepakbola untuk politik.

Oleh karena itu, dibutuhkan narasumber-narasumber yang dianggap mampu memberi masukan. Narasumber-narasumber yang telah ditemui oleh penulis untuk wawancara mendalam adalah:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Narasumber yang Berhasil Diwawancarai oleh Penulis**

No	Narasumber	Latarbelakang	Alasan Dijadikan Narasumber
1	Toharudin	Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS DPP Kota Bandung	Mengetahui strategi kampanye PKS di Pemilukada Kota Bandung 2008
2	Indra Perwira	Dosen Fakultas Hukum UNPAD	Mantan Bakal Calon Walikota Bandung ini mengetahui berbagai dinamika yang terjadi Ketika Pemilukada Kota Bandung 2008

3	M Farhan	Direktur Marketing PT. Persib Bandung Bermartarabat	Mengetahui sejarah Persib dan dinamika Persib di Kota Bandung
4	Tisna Sanjaya	Dosen Fakultas Seni Rupa ITB	Mendalami kebudayaan Sunda, termasuk politik dan Persib di dalamnya
5	Herru Djoko	Ketua Viking Persib Fans Club	Sering berinteraksi dengan Dada Rosada sebagai perwakilan suporter Persib
6	Yossi Irianto	Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung	Manajer Persib 2005-2007, merupakan kerabat dekat Dada Rosada
7	Ishak Soemantri	Dosen Fakultas Ekonomi UNPAR	Ketua Tim Sukses Non-parpol Dada-Ayi, memberikan banyak informasi bagaimana Dada Rosada ampu memenangi Pemilukada Kota Bandung 2008
8	Tata Wirasasmita	Sekjen Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika	Melakukan berapa survei terkait Pemilukada di Kota Bandung dan Jawa Barat

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menemui beberapa kendala. Dari beberapa kendala tersebut hampir semuanya bisa diselesaikan untuk memperoleh data. Hambatan yang dimaksud ini adalah tidak bertemunya penulis dengan narasumber utama, yaitu Dada Rosada. Tidak mampunya menyelesaikan hambatan ini karena posisi Dada Rosada sebagai Walikota Bandung 2008-2013, yang juga maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat 2013-2018 dari Partai Demokrat. Penulis sebenarnya sudah bertemu dengan dua orang terdekat Dada Rosada yang juga merupakan narasumber lainnya, yaitu Yossi Irianto dan Heru Joko. Tetapi mengingat padat dan banyaknya kegiatan yang diikuti oleh Dada Rosada setiap harinya, dua orang tersebut belum bisa mempertemukan penulis dengan Dada Rosada. Hambatan berikutnya adalah sulitnya mencari buku atau

karya ilmiah yang menuliskan atau meneliti tentang dinamika sepakbola dan politik, terutama yang berkaitan dengan pemilukada di daerah-daerah. Sulitnya menemukan karya-karya ilmiah tersebut, membuat penulis sulit untuk membandingkan atau memberi contoh lain mengenai dinamika sepakbola dan politik di Indonesia di era pasca jatuhnya Rezim Orde Baru. Merujuk pada beberapa informasi yang diberikan oleh informan, dinamika sepakbola dan politik di Indonesia apalagi menjelang Pemilukada memang terjadi di beberapa daerah, tetapi tidak terdokumentasi dengan baik.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 bab yang masing-masing nantinya akan terdiri dari beberapa sub-bab.

**Bab 1** yang berjudul Pendahuluan. Pada Bab ini dituliskan tentang kasus-kasus sepakbola dan politik di dunia internasional dan juga sejarah sepakbola dan politik di Indonesia. Adanya dua hal tersebut yang menjadi gambaran atas kasus sepakbola dan politik yang penulis angkat, yaitu politisasi Persib oleh Dada Rosada. Penulis juga menuliskan konsep apa yang akan dipakai untuk menganalisis kasus ini, serta metode apa yang dipakai.

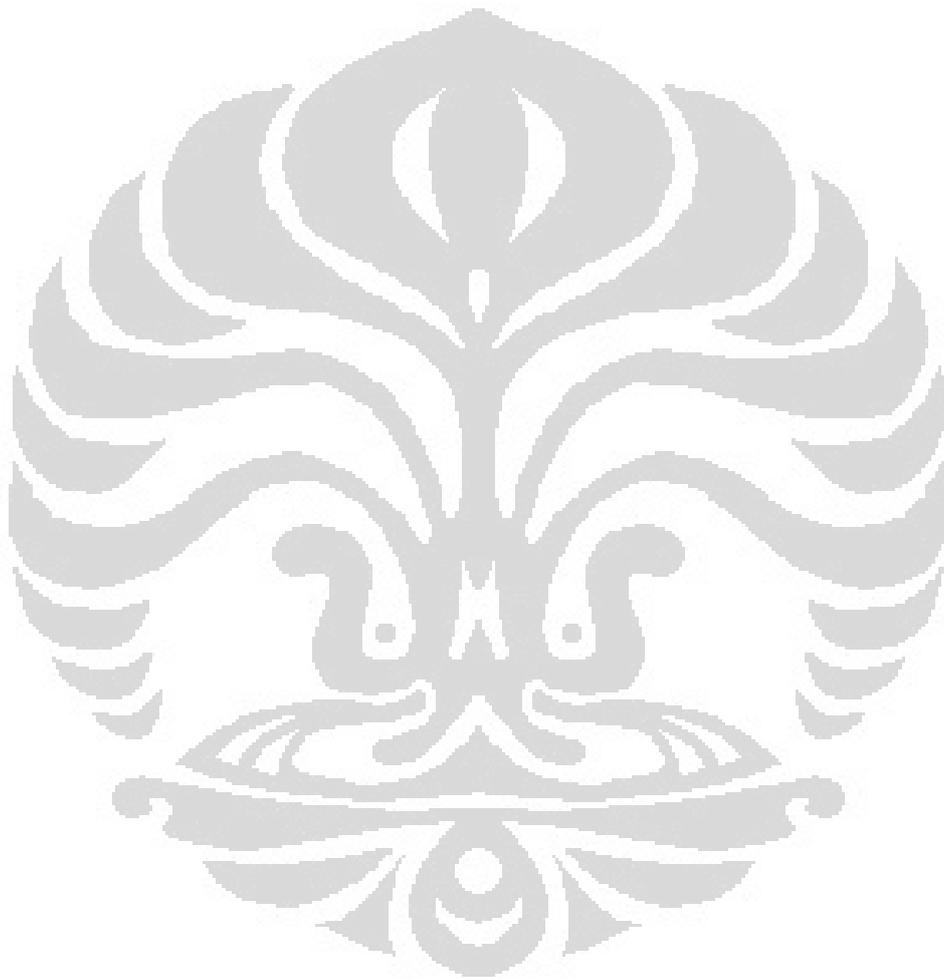
**Bab 2**, berjudul Gambaran Umum Objek Penelitian. Ada tiga hal utama yang dibahas dalam Bab ini. Pertama adalah tentang sejarah Persib secara sekilas. Kedua, penulis mencoba memberi informasi singkat tentang riwayat Dada Rosada, baik di birokrasi, di partai politik, dan juga di Persib. Bab 2 dibuat agar lebih mengetahui data-data awal dalam menganalisa kasus politisasi Persib oleh Dada Rosada.

**Bab 3**, berjudul Persib sebagai Identitas Masyarakat Kota Bandung. Bab tiga berisi tentang Persib secara keseluruhan, mulai dari sejarah berdirinya, dinamika politik yang dihadapinya, serta pendukung perempuan yang ada di dalamnya. Penulis membuat Bab ini agar dapat mengetahui penyebab Persib menjadi sebuah identitas masyarakat Kota Bandung.

**Bab 4**, berjudul Politisasi Persib oleh Dada Rosada dengan Menjadikan Persib sebagai Modal Sosial pada Pemilukada Kota Bandung 2008. Isi dari Bab 4 adalah melihat analisa-analisa yang dibangun oleh penulis tentang praktik-praktik

politisasi Persib oleh Dada Rosada ketika itu. Adanya Bab ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.

**Bab 5**, adalah Penutup. Bab terakhir ini berisi rangkuman serta jawaban penelitian. Kesimpulan secara keseluruhan juga ada dalam Bab ini.



## BAB 2 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada Bab 2 ini penulis akan membahas dan memberi deksripsi sekilas tentang Persib, Dada Rosada dan Pemilukada Kota Bandung. Deskripsi ini diperlukan agar nantinya pada bab-bab selanjutnya lebih memahami tentang analisis yang dibahas. Analisis yang dibangun akan berdasarkan data-data yang ada pada Bab 2.

### 2.1 Sejarah dan Suporter Persib

#### 2.1.1 Sejarah Persib

Persib merupakan tim sepakbola kota Bandung yang pada awal terbentuknya tergabung dalam sebuah perkumpulan liga atau kompetisi perserikatan di bawah PSSI. Istilah perserikatan ini timbul dari fakta bahwa tim sepakbola di Indonesia lahir bukan otonomi pemilik, tetapi adanya persetujuan bersama untuk berserikat antar tim sepakbola yang lingkupnya lebih kecil, untuk membentuk tim sepakbola yang ruang lingkupnya lebih besar dalam wilayah administratif kotamadya atau kabupaten. Lahirnya perserikatan sepakbola daerah atau *bond*, dimulai pada tahun 1923-1924, ketika lahirnya Perserikatan Sepakbola Surakarta (*Vorststenlandshe Voetbal Bond*), dan diikuti oleh lahirnya beberapa perserikatan sepakbola daerah di Surabaya, Jakarta, Madiun, Lamongan, Semarang, Banjarmasin, juga di Bandung.<sup>60</sup>

Tim sepakbola perserikatan di Bandung yang dimaksud dan satu-satunya adalah Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung atau yang disingkat sebagai Persib. Tim berjuduk *Maung Bandung*, merupakan tim sepakbola kota Bandung yang didirikan pada tahun 1933, tetapi dari berbagai literatur terkait sejarah Persib, sebenarnya sebelum menetapkan 1933 sebagai tahun kelahirannya, tim ini belum memiliki nama seperti saat ini. Tahun 1923, ada tim sepakbola dengan sebutan BIVB (*Bandoeng Indische Voetbal Bond*). Tim BIVB ini beberapa kali

---

<sup>60</sup> Tesis yang disusun oleh Yosef Hilarius Timu Pera, *Peran Negara dan Swasta Dalam Pengelolaan Olahraga Daerah di era Otonomi: Peran Pemerintah Kota Kediri dan Perusahaan Gudang Garam Dalam Mengembangkan Klub Persik Kediri*, Program Pasca Sarjana Sosiologi, FISIP UI, Depok, 2009, hlm. 1.

mengadakan pertandingan di luar kota, seperti Yogyakarta dan Jatinegara, Jakarta. Pada 19 April 1930, BIVB bersama dengan VIJ Jakarta, SIVB (Persebaya), MIVB (sekarang PPSM Magelang), MVB (PSM Madiun), VVB (Persis Solo), PSM (PSIM Yogyakarta) turut membidani kelahiran PSSI dalam pertemuan yang diadakan di Societeit Hadiprojo Yogyakarta. BIVB kemudian menghilang, dan muncul dua perkumpulan lain, yakni PSIB (Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung) dan NVB (National Voetbal Bond). Pada 14 Maret 1933, kedua perkumpulan itu sepakat melakukan fusi dan lahirlah perkumpulan yang bernama Persib (Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung). Selama kompetisi perserikatan, Persib tercatat pernah menjadi juara sebanyak lima kali, yaitu pada 1961, 1986, 1990, 1995, di mana satu di antaranya direbut pada kompetisi PSSI sebelum Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1937. Selain itu Persib berhasil menjadi tim peringkat kedua pada 1950, 1959, 1966, 1983, dan 1985.<sup>61</sup>

**Tabel 2.1**  
**Prestasi Juara yang Pernah diraih Persib Di Berbagai Kompetisi Sepakbola Indonesia**

No	Tahun	Kejuaraan
1	1937	Juara Perserikatan
2	1957	Juara Persib-Persija-Persebaya
3	1965	Juara HUT ke-XX P.N Postel
4	1978	Juara Piala Walikota Bogor
5	1961	Juara Perserikatan
6	1986	Juara Perserikatan
7	1989/1990	Juara Perserikatan
8	1993/1994	Juara Perserikatan
9	1994/1995	Juara Liga Indonesia I
10	2010	Juara LSI U-21

*Sumber telah diolah oleh penulis*

Terlepas dari berbagai prestasi tersebut, bukan berarti Persib tidak mempunyai saingan di Kota Bandung itu sendiri dalam Liga Indonesia di bawah

<sup>61</sup> Koran Jakarta, "Persib Bobotoh dan Miliaran Rupiah", diunduh dari <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/74096>, pada 1-11-2011, pukul 12.06 wib.

PSSI. Pada tahun 1978, PSSI membentuk kompetisi atau liga semi profesional yang diberi nama Galatama (Liga Sepakbola Utama).<sup>62</sup> Peserta dari Galatama adalah tim-tim sepakbola di luar perserikatan atau dengan kata lain, tim sepakbola yang lahir oleh peran para pengusaha swasta di Indonesia. Tujuan dari PSSI membentuk Galatama adalah agar terciptanya iklim profesionalisme dalam sepakbola di Indonesia, karena ketika itu tim-tim sepakbola perserikatan merupakan perwujudan atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah setempat. Ada beberapa tim dari Bandung yang berlaga di Galatama, yaitu Sari Bumi Raya, Tempo Utama, dan Bandung Raya.<sup>63</sup>

Lahirnya kompetisi Galatama ketika itu di persepakbolaan nasional menunjukkan bahwa ada upaya membawa tim sepakbola yang ada bergantung kepada keuangan daerah. Dengan dimodali oleh para pengusaha, maka tim-tim sepakbola Galatama menjadi lebih baik dari segi finansial, dan berpengaruh kepada materi pemain, termasuk tim Galatama di Bandung. Dari 3 tim Galatama asal Bandung, hanya tim Bandung Raya yang bisa dikatakan berprestasi. Hal ini terbukti ketika akhirnya pamor Galatama menurun, dan dileburkannya Galatama dengan Liga Perserikatan di tahun 1994. Musim kompetisi 1994/1995 dinamakan Liga Indonesia I, di mana Persib dan Bandung Raya berkompetisi bersama. Pada kompetisi Liga Indonesia I ini Persib menjadi Juara, sedangkan di musim berikutnya, Liga Indonesia II, giliran Bandung Raya yang menjadi Juara. Bandung Raya hanya bertahan hingga Liga Indonesia musim 1996/1997 dan membubarkan diri karena alasan finansial.

Meski hanya berumur jagung, Bandung Raya tetap meninggalkan kesan bagi warga Bandung, lewat bintang-bintang sepakbola yang bermain di dalamnya.<sup>64</sup> Sayangnya banyaknya pemain-pemain bintang, serta sokongan finansial yang baik, tidak mampu membuat Bandung Raya bertahan lebih lama. Pada akhirnya hingga kini, para pendukung Persib yang disebut Bobotoh, tetaplah

---

<sup>62</sup> Eddi Elison, *Op. Cit.*, hlm. 781.

<sup>63</sup> Data diperoleh dari Situs Resmi PSSI, yang dikutip dalam tesis yang dibuat oleh, Yosef Hilarius Timu Pera, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>64</sup> Bandung Raya pernah diperkuat Pemain-pemain seperti Herry Kiswanto, Peri Sandria, Dejan Gluscevic dan Olinga Atangana. Pelatihnya saat itu adalah Henk Wullems. Ketika menjuarai Liga Indonesia (Ligina) II, pemain Bandung Raya, Dejan Gluscevic menjadi pencetak gol terbanyak Ligina II, dengan 30 golnya.

identik sebagai pendukung setia Persib, bukan tim sepakbola lainnya dari Bandung. Bobotoh-lah yang selalu mendukung Persib bertanding ketika Persib menjadi tuan rumah di Bandung, ataupun ketika Persib harus dijamu tim lawan di luar Bandung.

### 2.1.2 Suporter Persib

Bobotoh<sup>65</sup> adalah sebutan atau panggilan bagi seseorang yang menjadi pendukung Persib. Dalam Kamus Basa Sunda yang telah diterbitkan oleh Lembaga Basa jeung Sastra Sunda, Bobotoh adalah *purah ngagedean hate atawa ngahudang sumanget ka nu rek atawa keur ngadu jajaten*. Arti dari bahasa Sunda tersebut adalah “yang berperan membesarkan hati atau membangun semangat bagi mereka yang akan atau sedang berlomba”.<sup>66</sup>

Dari arti kata tersebut, Bobotoh akhirnya identik dengan istilah kepada para pendukung Persib. Bobotoh Persib, kini berjumlah jutaan, yang tersebar di seluruh Nusantara, tetapi paling banyak berdomisili di Jawa bagian Barat. Lewat survei yang dilakukan oleh PT. PBB (PT. Persib Bandung Bermartabat), Bobotoh Persib terbanyak tersebar di daerah Jawa bagian Barat, seperti Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat itu sendiri. Diperkirakan terdapat 5,3 juta orang yang terdata lewat survei sebagai Bobotoh. Meski berasal dari Bandung, ternyata Bobotoh paling banyak berasal dari Cianjur dengan 637.263 jiwa, lalu Garut dengan 627.240 jiwa, Bandung di tempat ketiga dengan 506.774 jiwa, di tempat keempat adalah di Jakarta dengan 260.056 jiwa, dan Bobotoh di Surabaya berada di posisi kelima dengan jumlah 93.965 jiwa.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Penulisan Bobotoh sebagai sebuah istilah, tidak ditulis miring. Hal ini dikarenakan Bobotoh telah masuk sebagai kata resmi dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Tim Penyusun, 10, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 202.

<sup>66</sup> Bobotoh diartikan dalam Basa Sunda sebagai sebuah kata sifat, sementara dalam KBBI, Bobotoh adalah kata kerja. Adanya perbedaan pemkanaan ini, sebenarnya tidak akan terlalu bermasalah jika ada revisi selanjutnya dari KBBI itu sendiri. Terlepas dari masalah tersebut bahwa ada hal positif karena adanya penyerapan bahasa daerah menjadi bahasa nasional, tetapi para Bobotoh Persib harus bersiap jika Bobotoh dalam KBBI hanya berarti mendukung tim sepakbola, karena nantinya bisa saja Bobotoh digunakan untuk menyatakan ke tim sepakbola selain Persib. Nandang R. Pamungkas, “Bobotoh” diunduh dari <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/359288/>, pada 29 Maret 2012, pukul 11.13 WIB.

<sup>67</sup> Rivan Mandala Putra, “Bobotoh di Jakarta Lebih Banyak Dibanding Surabaya”, diunduh dari <http://m.inilah.com/read/detail/1840253/bobotoh-di-jakarta-lebih-banyak-dibanding-surabaya>, pada 24 Maret 2012, pukul 5.38 WIB

Pengertian masyarakat umum di luar Bandung atau Jawa Barat, lebih banyak yang mengenal pendukung Persib sebagai *Viking*. Perlu diketahui bahwa *Viking* adalah kumpulan supporter atau Bobotoh Persib yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi yang terstruktur, atau dalam bahasa Inggris disebut *Fans Club*. Bobotoh Persib tersebar pada beberapa *fans club*, seperti *Viking*, *Bomber* (Bobotoh Maung Bandung Bersatu), *Balad Persib*, *Jurig*, *Stone Lovers*, *ABCD*, dan lain sebagainya.<sup>68</sup> Perkumpulan - perkumpulan Bobotoh tersebut lebih bersifat organisasi dan mempunyai hirarki serta AD/ART yang jelas dalam menjalankan organisasinya, termasuk dalam pengerahan anggotanya ketika akan menonton pertandingan Persib di Bandung atau ketika Persib sedang dijamu tim lawan di luar Bandung. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak semua perkumpulan Bobotoh menjadi besar. Hanya beberapa perkumpulan Bobotoh yang terdengar besar saat ini karena mempunyai anggota yang cukup banyak di Kota Bandung, salah satunya yaitu *Viking*.

*Viking* mempunyai nama resmi, *Viking Persib Fans Club*, dan berdiri pada 17 Juli 1993. Eksistensi *Viking*, mulai terlihat pada Liga Indonesia tahun 1993, di mana *Viking*, menempati tribun Selatan stadion Siliwangi. Bergulirnya waktu, *Viking* yang tadinya hanya perkumpulan para Bobotoh fanatik, kini telah menjadi sebuah wadah yang sangat besar dan kreatif dalam mendukung Persib lewat berbagai aktifitasnya, mulai dari berdirinya Viking Persib Fan Shop yang terletak di Jl. Banda no. 5, Bandung, beserta dua bus yang menjual berbagai macam atribut *Viking* Persib, hingga kegiatan sosial, budaya, dan politiknya.<sup>69</sup> Secara Hirarki, Viking diketuai oleh Ketua Umum, Heru Joko, mempunyai Panglima, yaitu Ayu Beutik, serta seorang Sekertaris Umum, Yoedi Baduy. Ketua Umum dan Panglima dianggap sebagai posisi yang tidak tergantikan hingga sesuatu hal membuat kedua orang tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya masing – masing.<sup>70</sup> Panglima *Viking* bertugas mengayomi para anggota terutama tataran *grass root*, Sekertaris Umum mengurus dan mengkoordinir segala bentuk

<sup>68</sup> Diambil dari skripsi yang dibuat oleh Yunia Riswati, *Nilai-nilai Kohesivitas dan Fanatisme Suporter Tim Sepakbola Indonesia (Studi Pada Perilaku The Jakmania Vs Viking Bandung Dalam Film Romeo Juliet)*, Program Sarjana Ekstensi Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Depok, 2011, hlm. 57.

<sup>69</sup> *Viking* kini mempunyai divisi propaganda yang bertujuan untuk mengangkat isu-isu politik yang sedang terjadi di Kota Bandung serta pada tubuh Persib itu sendiri.

<sup>70</sup> Yunia Riswati, *op. cit.*, hlm. 56.

kegiatan secara administratif, sementara itu Ketua Umum menjalankan hubungan eksternal ke berbagai unsur di dalam atau pun di luar Kota Bandung, termasuk elit politik di dalamnya. Tercatat anggota *Viking* kini berjumlah 40.000 orang, yang tersebar di berbagai distrik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti *Viking* Jepang, *Viking* Singapura, dan lainnya.

Pemilihan kelompok supporter Persib, bukan tanpa alasan. *Viking* ini memiliki anggota yang banyak dan terorganisir. Adanya kumpulan massa atau kelompok yang berkumpul, secara logika politik, akan menjadi sebuah magnet bagi praktisi politik untuk mencoba merebut dukungan dari kelompok tersebut.<sup>71</sup> Sementara itu *Viking*, lewat Ketua Umumnya, Heru Joko, merupakan sosok yang dianggap mempunyai jaringan eksternal yang sangat luas, termasuk berjejaring dengan para elit politik Kota Bandung. Beberapa hal yang telah disebutkan, merupakan sebuah penilaian mengapa dari sekian banyak kelompok supporter Persib, hanya *Viking* yang diberi penjelasan deskriptif lebih banyak. *Viking* dianggap secara kualitas dan kuantitas, lebih banyak bersinggungan atau berinteraksi dengan dinamika politik di Kota Bandung, termasuk dalam Pemilukada Kota Bandung 2008, terutama dengan Dada Rosada

## 2.2 Profil Dada Rosada

Walikota Bandung 2008-2013, Dada Rosada, menjadi Walikota Bandung untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya menjadi Walikota Bandung pada periode 2003-2008. Dada Rosada yang baru saja mengambil formulir untuk menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat 2013-2018 dari Partai Demokrat,<sup>72</sup> pada Pemilukada Kota Bandung 2008, merupakan kader dari Partai Golkar. Dinamika perubahan dalam karir politik Dada Rosada bukan merupakan bukti bahwa ternyata Dada Rosada merupakan seorang kader Partai Politik dalam memulai, melainkan dimulai dari jabatan birokratis, sehingga menjadi Walikota adalah posisi tertinggi yang pernah diraih oleh Dada Rosada sebagai seorang Birokrat di

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Toharudin, Ketua Badan Pemenanga Pemilu (Bapilu) DPP PKS Kota Bandung. Wawancara dilakukan pada 17 Maret 2012, pukul 12:58 WIB, bertempat di Kantor DPD PKS Kota Bandung, Jl. Jendral Katamso No. 19 Bandung.

<sup>72</sup> Ade Bayu Indra, *Dede dan Dada Siap Bersaing*, Harian Pikiran Rakyat, edisi 8 Maret 2012.

wilayah kerja Kota Bandung. Perjalanan Dada Rosada sebagai seorang birokrat dan politikus, akan dijabarkan dalam beberapa bagian penulisan berikutnya.

### **2.2.1 Karir Dada Rosada di Birokrasi dan Politik Praktis**

Dada Rosada, memulai karirnya sebagai seorang birokrat pada tahun 1973. Berpangkat Honor Daerah yang ditetapkan pada 15 Februari 1973, beliau menempati posisi sebagai *Investment Board* (Bagian Penanaman Modal) di Pemerintah Kotamadya D.T II Bandung. Bekerja pada Bidang Penanaman modal, yang ada pada lingkaran ilmu ekonomi, sesuai dengan apa yang pernah dipelajari beliau di tingkat perkuliahan meski tidak selesai.<sup>73</sup> Menjadi Sarjana Hukum di tahun 1983, Dada Rosada saat itu sudah menjadi seorang Pegawai Negeri dengan Pangkat Pengatur (golongan II/c), dengan jabatan sebagai Bendaharawan KOPRI pada Sub Unit Kantor Pemerintah Kotamadya D.T II Bandung.

Dada Rosada terus menggeluti karirnya di birokrasi Kota Bandung hingga mampu mencapai golongan tertinggi dari karir sebagai pegawai negeri, yaitu Golongan VI. Meraih Golongan IV a di tahun 1997, setahun kemudian Dada Rosada berhasil menyelesaikan studi master-nya di Program Pasca Sarjana S2, BKU (Bidang Kajian Umum) Kebijakan Publik, UNPAD, pada tanggal 15 Mei 1998. Berjalan dua tahu setelah memperoleh gelar masternya, pria kelahiran Bandung, 29 April 1947, sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung, tepatnya dilantik pada 5 April 2000 dan menyelesaikan jabatan Sekretaris Daerah pada 25 Oktober 2002.

Di tahun 2003, Dada Rosada sudah berpangkat IV/d, atau disebut dengan Pembina Madya. Ini adalah pangkat tertinggi dari golongan IV, dan merupakan pangkat dari puncak karir seorang pegawai negeri. Setelah menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kota Bandung di tahun 2002, kemudian berturut-turut menjadi PLT (Pelaksana Tugas) Walikota Bandung, dan Staf Ahli Walikota Bandung. Tepat pada 1 Mei 2003, Dada Rosada pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>73</sup> Dada Rosada, semenjak lulus dari SMA III Bandung tahun 1967, pernah dua kali berpindah kuliah, yaitu di Fakultas Pertanian UNPAD, kemudian pindah ke Fakultas Ekonomi UNPAD tahun 1962, hingga pindah lagi ke Fakultas Hukum UNINUS pada tahun 1974, dan lulus sebagai Sarjana Hukum di tahun 1983. Diambil dari Daftar Iwayat Hidup Dada Rosada yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, pada 17 April 2012.

Mundurinya Dada Rosada ketika itu untuk maju sebagai calon Walikota Bandung periode 2003-2008.

Maju sebagai Walikota Bandung, berarti Dada Rosada harus mempunyai dukungan dari Anggota DPRD Kota Bandung saat itu. Dukungan dari Anggota DPRD Kota Bandung menjadi penting, karena saat itu pemilihan Walikota masih wewenang dari DPRD. Pengalaman dan karir Dada Rosada sebagai birokrat di Pemerintah Kota Bandung, tidak serta merta membuat Anggota DPRD Kota Bandung akan memilihnya. Butuh dukungan politik dari para Anggota DPRD Kota Bandung, yang terdiri dari beberapa fraksi atas representasi Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Bandung periode 1999-2004. Dada Rosada dicalonkan oleh Fraksi Partai Golkar untuk menjadi calon Walikota Bandung periode 2003-2008. Diusungnya Dada Rosada bukanlah hal yang baru. Selama karirnya sebagai pegawai negeri, Dada Rosada juga meniti karir sebagai anggota dari partai politik, yaitu sebagai anggota Partai Golkar.

Berselang tujuh tahun setelah menjadi Pegawai Honor Daerah di Badan Penanaman Modal, Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, tepatnya di tahun 1980, Dada Rosada masuk menjadi anggota Partai Golkar, dan menjadi Wakil Sekertaris DPD Golkar tingkat II Kotamadya D.T. II Bandung. Setelah dua kali periode menjabat sebagai Wakil Sekertaris DPD Golkar tingkat I Jawa Barat, yaitu pada periode 1988 s/d 1993, dan periode 1993 s/d 1998, Dada Rosada menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat pada periode 2004 s/d 2009.

**Tabel 2.2**  
**Karir Dada Rosada di Partai Politik**

No	Kedudukan di Partai	Jabatan	Periode
1	DPD Golkar Tk. II Kotamadya D.T. II Bandung	Wakil Sekertaris	1980-1985
2	DPD Golkar Tk. I Jawa Barat	Wakil Sekertaris	1988-1993
3	DPD Golkar Tk. I Jawa Barat	Wakil Sekertaris	1993-1998
4	DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat	Ketua Dewan Penasehat	2009-2010
5	Partai Demokrat	Anggota	2010-sekarang

*Sumber: Dokumen Pemerintah Kota Bandung*

Jabatan Dada Rosada pada tahun 2003 di Partai Golkar adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Jabatan di tataran birokrasi adalah mantan Staf Ahli Walikota Bandung, Aa Tarmana dan kemudia pensiun pada 1 Mei 2003. Posisi strategisnya di Partai Golkar serta di Pemerintahan Kota Bandung, membuat Fraksi Partai Golkar mengusung Dada Rosada berpasangan dengan Josef Purwasuganda dari Fraksi PDIP, untuk merebut posisi Walikota dan Walikota Bandung 2003-2008. Dada Rosada bersaing dengan dua pasangan lainnya, yaitu pasangan Aa Tarmana - Hilman Djuani, dan pasangan H.R.M. Sugih Wiramikarta - Iwan Abdurahman. Adanya dua calon pasangan lainnya, maka pemilihan Walikota - Wakil Walikota Bandung periode 2003 - 2008 diikuti oleh tiga pasangan calon. Berikut daftar calon pasangan serta komposisi kursi yang dimiliki partai-partai politik di DPRD Kota Bandung yang selanjutnya menyelenggarakan dan memilih, yaitu:

1. A.A. Tarmana ( Petahana ) : Fraksi ABR  
Hilman Djuani : Fraksi PPP
2. Dada Rosada : Fraksi Partai GOLKAR  
Josef Purwasuganda : Fraksi PDIP
3. H.R.M. Sugih Wiramikarta : Fraksi Keadilan Bulan Bintang  
Iwan Abdurahman : Fraksi Keadilan Bulan Bintang

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Jumlah Kursi Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bandung 1999-2004**

No	Fraksi	Jumlah Kursi
1	PDIP	14
2	PAN	8
3	P Golkar	6
4	TNI-Polri	5
5	PPP	4
6	PKP	1
7	Keadilan Bulan Bintang	5
8	PKB	2

*sumber: Daftar Riwayat Hidup Dada Rosada yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, pada 17 April 2012*

Pemilihan yang berlangsung pada 9 September 2003 dan dimulai pukul 09.00 WIB, menghasilkan Walikota Bandung terpilih, yaitu Dada Rosada dan pasangan Walikotanya Jusep Purwasuganda, yang memperoleh dukungan 26 suara dari total 45 anggota DPRD Bandung. Secara presentasi, Dada Rosada mendapat dukungan sekitar 57,77% dari keseluruhan Anggota DPRD Kota Bandung. Lewat keputusan Mendagri No. 131. 32-553 Tahun 2003 yang disahkan pada 9 Oktober 2003 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Walikota Bandung Jawa Barat, Dada Rosada dilantik sebagai Walikota Bandung periode 2003-2008 pada 16 Oktober 2003.

**Tabel 2.4**  
**Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Periode 2003-2008**

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Fraksi	Hasil
1	H. Dada Rosada, SH.,M.Si KabagWalikota)	Golkar	26 Suara (57,77%)
	H. Jusep Purwasuganda (Wakil Walikota)	PDIP	
2	H. A.A. Tarmana (Walikota)	TNI-Polri	16 Suara (35,55%)
	Drs. H. Hilman,MH (Wakil Walikota)	PPP	
3	Drs. H.R.M. Sugih (Walikota)	KBB	3 Suara (6,66%)
	Ir. H. Iwan Ridwan A (Wakil Walikota)	KBB	

*Sumber: Daftar Riwayat Hidup Dada Rosada yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, pada 17 April 2012*

Dada Rosada setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Walikota Bandung 2003-2008, maju pada pencalonan Walikota Bandung 2008-2013. Dengan sistem Pemilukada yang langsung dipilih oleh masyarakat Kota Bandung, Dada Rosada bersama pasangannya, Ayi Vivananda mampu menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bandung pertama yang dipilih langsung oleh masyarakatnya, dalam hal ini masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 32-688 Tahun 2008 Tanggal 30 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Bandung dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat, maka Dada Rosada resmi dilantik menjadi Walikota Bandung periode 2008-2013, bertempat di Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika Bandung, pada 16 September 2008.

### 2.2.2 Karir Dada Rosada di Persib

Kegiatan serta karir Dada Rosada ternyata tidak hanya pada wilayah birokrasi dan politik praktis di wilayah Kota Bandung. Dada Rosada juga aktif di organisasi olahraga, salah satunya di Persib. Mengurus Persib merupakan sebuah impian bagi seorang Dada Rosada. Dada Rosada kecil merupakan seorang Bobotoh yang selalu mengikuti perkembangan Persib disetiap pertandingannya lewat radio.<sup>74</sup> Memulai karir sebagai pengurus Persib, ketika Dada Rosada menjadi Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian Pemerintahan Kotamadya D.T. II Bandung pada tahun 1988-1992. Ateng Wahjudi, selaku Walikota Bandung serta Ketua Umum Persib sering mengajak Dada Rosada untuk berdiskusi masalah Persib. Dada Rosada selalu mendampingi Ateng Wahjudi di setiap laga kandang Persib atau sesekali di laga tandang. Ateng Wahjudi juga sering meminta tolong Dada Rosada untuk membantu mencari penggalangan dana dari pihak ketiga untuk membantu masalah keuangan Persib.<sup>75</sup> Keberlanjutan karir di Persib, pada tahun 1993, Dada Rosada duduk sebagai pengurus yang membidangi Bidang Dana dan Sarana.

Selama kurang lebih 5 tahun tepatnya hingga tahun 1998, Dada Rosada menduduki posisinya di Persib sebagai Kepala Bidang Dana dan Sarana. Pada kurun waktu yang sama, Dada Rosada juga sedang menjabat sebagai Kadispenda (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) Kotamadya D.T. II Bandung. Dada Rosada dengan posisinya sebagai Kadispenda, beberapa kali mengutarakan ide kepada Ketua Umum Persib sekaligus Walikota Bandung ketika itu, Wahyu Hamijaya, untuk membuat stadion baru bagi Persib. Tapi sayangnya pendapat Dada Rosada ini tidak terlalu diperhatikan oleh Ketua Umum, karena dianggap yang terpenting bagi Persib ketika itu adalah prestasi, bukan stadion.<sup>76</sup>

Jabatan Dada Rosada sebagai Kadispenda Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, berakhir di tahun 1998, saat itu pula Dada Rosada tidak lagi menduduki posisi Bidang Dana dan Sarana Persib. Posisi Dada Rosada mencapai puncaknya

---

<sup>74</sup> Pitoyo, *Dada Rosada: Hidup adalah Pilihan dan Proses*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 127.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Isu stadion ini masih kalah dengan isu agar Persib menjadi juara. Hal ini terbukti pada musin kompetisi Liga Indonesia I 1994/1995, Persib menjadi juara I. *Ibid.*, hlm. 58.

di Persib ketika dilantik menjadi Walikota Bandung periode 2003-2008. Pada saat dilantik sebagai Walikota Bandung pada tanggal 16 Oktober 2003, tidak otomatis Dada Rosada menjabat sebagai Ketua Umum Persib. Merujuk pada AD/ART Persib, memang tidak tercantum bahwa Walikota Bandung *ex officio* sebagai ketua umum Persib.<sup>77</sup> Dada Rosada menjadi Ketua Umum Persib pada 9 November 2003, lewat Mustasus (Musyawarah Anggota Khusus) Persib yang diselenggarakan di Bale Pakuan, Bandung. Legalitas Dada Rosada sebagai Ketua Umum Persib tertuang dalam Surat Keputusan Mustasus Nomor 26/Mustasus/IX/2003 yang berisi, Dada Rosada dipilih secara aklamasi oleh seluruh Pengurus Harian Persib dan perwakilan dari 36 klub yang bernaung di bawah bendera Persib.<sup>78</sup> Sebelum Dada Rosada dipilih sebagai Ketua Umum Persib periode 2003-2007, Persib masih diketuai oleh AA Tarmana, Walikota Bandung sebelum Dada Rosada. Sebenarnya AA Tarmana masih menjabat sebagai Ketua Umum Persib hingga kepengurusan tahun 2006. Sesuai dengan akhir jabatan sebagai Walikota Bandung 1998-2003, AA Tarmana akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Persib pada 4 November 2003. Menurut AA Tarmana, jabatan Ketua Umum Persib haruslah dijabat oleh seseorang yang masih mempunyai *power*, yaitu Walikota Bandung, Dada Rosada, agar Persib lebih mudah berjalan dan tidak mengalami stagnansi dalam keberlangsungannya.<sup>79</sup>

Periode Ketua Umum Persib yang dijabat Dada Rosada adalah dari tahun 2003 hingga 2007. Pada kenyataan di lapangan, Dada Rosada menjabat Ketua Umum Persib hingga akhir tahun 2008. Di penghujung tahun 2008, atau tepatnya pada Sabtu 22 November 2008, Musta (Musyawarah Anggota) Persib memutuskan bahwa pengurus Persib yang seharusnya berakhir pada 19 Desember 2007, dilanjutkan. Lewat Musta juga dihasilkan beberapa keputusan, yaitu menyetujui pembentukan badan hukum bagi Persib dan menetapkan Dada Rosada sebagai Mandataris Pembentukan Badan Hukum Persib.<sup>80</sup> Keputusan ini

---

<sup>77</sup> Tony, *Dada Siap Bangkitkan Persib*, Harian Pikiran Rakyat, edisi 21 September 2003.

<sup>78</sup> Tony, *Dada Rosada, S.H. Akhirnya Menjadi Ketua Umum Persib*, Harian Pikiran Rakyat, edisi 10 November 2003.

<sup>79</sup> Tony, *Aa Tarmana Mundur dari Ketua Persib*, Harian Pikiran Rakyat, edisi 5 November 2003.

<sup>80</sup> Pitoyo, *Op. Cit.*, hlm. 200-201.

merupakan tindak lanjut atas keputusan BLI (Badan Liga Indonesia) yang mengharuskan tim-tim sepakbola profesional saja yang boleh mengikuti LSI (Liga Super Indonesia), sebagai terusan dari Permendagri No. 13/2008 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hasil dari kerja Mandataris Pembentukan Badan Hukum Persib, selain menyelesaikan sisa pertandingan Persib pada LSI 2008/2009, juga menetapkan terbentuknya PBB (PT Persib Bandung Bermartabat) pada 24 Juli 2009.<sup>81</sup> Terbentuknya PT PBB, juga sebagai penanda berakhirnya segala bentuk jabatan Dada Rosada di Persib, yaitu sebagai Ketua Umum dan Mandataris. Persib telah menjadi PT (Perseroan Terbatas) yang berbadan hukum, ini adalah penanda era profesionalisme Persib. BLI juga mengapresiasi Persib menjadi tim perserikatan yang mampu menjadi tim profesional, dengan bentuk barunya, serta tidak lagi mempunyai ikatan struktural dengan pegawai negeri ditingkat manapun, termasuk dengan Walikota Bandung terpilih, Dada Rosada.<sup>82</sup> Terpilihnya Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008, juga diikuti dengan berbagai data dan fakta lapangan yang menyertainya. Sub-bab berikutnya adalah penjelasan lebih mendetail atas hasil dari Pemilukada Kota Bandung 2008.

### 2.3 Pemilukada Kota Bandung 2008

Pemilihan pimpinan eksekutif tertinggi di Kota Bandung dalam penelitian ini, berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2008 sekaligus menjadi pemilihan langsung pertama bagi masyarakat Kota Bandung. Pada pemilihan walikota Bandung sebelumnya, tahun 2003, dipilih oleh DPRD Kota Bandung. Ada tiga calon pasangan yang mengikuti Pemilukada Kota Bandung 2008. Tiga pasangan ini, 2 calon pasangan berasal dari parpol dan gabungan parpol, satu pasangan lainnya berasal dari independen.

Calon-calon pasangan berdasar nomor urut adalah:

1. H. Dada Rosada, SH., M.Si – Ayi Vivananda, SH.
2. Dr. H. Taufikurahman – H. Abu Sauqi
3. Drs. H. E Hudaya Prawira – Nahadi, S.Pd., M.Pd., M.Si.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 2003.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Pasangan nomor urut 1, yaitu Dada – Ayi didukung oleh sekitar gabungan enam gabungan partai politik, yaitu Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PPP, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Selain dari enam partai yang mempunyai kursi di DPRD Kota Bandung 2004 – 2009, pasangan Dada – Ayi ini juga didukung 17 partai non – parlemen, serta 23 organisasi. Koalisi pendukung Walikota *incumbent* ini, bernama Koalisi Saladri.<sup>83</sup> Calon pasangan yang ketika itu mempunyai jargon “Membangun Dengan Pengalaman”, merupakan pasangan calon dengan dukungan presentasi terbanyak dari partai yang mempunyai kursi di DPRD Kota Bandung. Pasangan Dada – Ayi didukung oleh 21 kursi anggota DPRD Kota Bandung. 21 Kursi ini terdiri dari 6 kursi dari Partai Golkar, 7 Kursi dari PDIP, 6 kursi dari Partai Golkar, 6 kursi dari Partai Demokrat, 4 kursi dari PPP, 6 kursi dari PAN, dan 1 kursi dari Partai Bulan Bintang.

Kubu PKS pada Pemilukada Kota Bandung 2008, , mengusung pasangan nomor urut 2, Dr. H. Taufikurahman – H. Abu Sauqi. Pasangan yang mempunyai julukan Trendi, sebelumnya sempat akan didukung oleh koalisi poros tengah DPRD Kota Bandung 2004 – 2009, yaitu Partai Demokrat dan PAN.<sup>84</sup> Menjelang pendaftaran ternyata kubu Partai Demokrat lebih mendukung calon pasangan Dada – Ayi. PAN yang sebelumnya sukses berkoalisi dengan PKS pada Pemilukada Jawa Barat 2008, di mana kader PKS, Ahmad Heryawan dipasangkan dengan kader PAN, Dede Yusuf, berhasil menjadi Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008 – 2013.<sup>85</sup> Duet Dosen Ilmu Biologi, Institut Teknologi Bandung – Ketua Rumah Zakat Indonesia, pada akhir masa pendaftaran Bakal Calon Walikota – Wakil Walikota Bandung 2008 – 2013, hanya diusung oleh satu

<sup>83</sup> Berita Indonesia, “Kemenangan Dada, Kemenangan Bandung”, diunduh dari <http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/kemenangan-dada-kemenangan-bandung>, pada 24 Maret 2012, pukul 17.41 WIB.

<sup>84</sup> Andri Haryanto, “PKS Ultimatum Poros Tengan Segera Tentukan Sikap”, diunduh dari <http://bandung.detik.com/read/2008/06/17/150605/957855/486/pks-ultimatum-poros-tengah-segera-tentukan-sikap>, pada 28 Maret 2008, pukul 19.46 WIB.

<sup>85</sup> Pasangan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf, terpilih menjadi Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2008 – 2013, setelah mendapat perolehan suara sebesar 41,8082% atau 475.923 suara dari 1.585.027 suara masyarakat Jawa Barat yang memilih pada Pemilukada Jawa Barat 2008. KUPD Kota Bandung, “Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2008”, diunduh dari <http://kpu-bandungkota.go.id/index.php?pilih=hal&id=15>, pada 28 Maret 2008, pukul 19.38 WIB.

partai, yaitu PKS. Hal ini dikarenakan PAN memindahkan dukungannya kepada pasangan Dada – Ayi. Meski hanya didukung oleh satu partai, pasangan ini tetap melaju karena PKS memiliki jumlah kursi di DPRD Kota Bandung 2004 – 2009, sebanyak 11 kursi, atau melebihi syarat minimal 15% kursi di DPRD untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah.<sup>86</sup>

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2004-2009**

No	Partai	Jumlah Kursi
1	PKS	11
2	PDIP	7
3	P. Golkar	6
4	PAN	6
5	P. Demokrat	6
6	PPP	4
7	PDS	3
8	PBB	2

*Sumber: Daftar Riwayat Hidup Dada Rosada yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, pada 17 April 2012*

Pasangan nomor urut 3 pada Pemilu Kota Bandung 2008 adalah pasangan dari calon perseorangan atau biasa dikenal dengan pasangan independen. Pasangan independen ini adalah Drs. H. E Hudaya Prawira – Nahadi, S.Pd., M.Pd., M.Si. Calon pasangan independen pada Pemilu di Indonesia, berlandaskan hukum atas putusan MK (Mahkamah Konstitusi). MK mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-U/2007 tentang pasangan independen/perseorangan didasarkan pada pengaduan Lalu Ranggalawe dkk, tentang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap UUD 1945. Hudaya – Nahadi, sebagai pasangan yang berasal dari jalur independen, tidak serta merta dapat langsung mengikuti proses Pemilu Kota Bandung 2008. Syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan ini, yaitu memenuhi syarat minimum mendapat dukungan dari 3% masyarakat Kota Bandung yang berbentuk

<sup>86</sup> Peraturan ini dapat dilihat di Pasal 59, Ayat 2 pada UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

KTP (Kartu Tanda Penduduk).<sup>87</sup> Jumlah 3% dari masyarakat Kota Bandung (kurang lebih 2,3 juta jiwa), berarti pasangan independen harus mengumpulkan minimal kurang lebih 69.000 KTP dari warga Kota Bandung. Pasangan independen ketika pendaftaran bakal calon Walikota – Walikota Bandung 2008 – 2013, tidak hanya pasangan Hudaya – Nahadi, tetapi tercatat ada beberapa calon pasangan independen lainnya. Verifikasi atas jumlah KTP terkumpul dan KTP yang dianggap sah oleh KPUD Kota Bandung, merupakan keputusan yang pada akhirnya menetapkan pasangan Hudaya – Nahadi sebagai pasangan independen pada Pemilu Kota Bandung 2008. Beberapa bakal calon pasangan independen lainnya, dianggap oleh KPUD Kota Bandung tidak berhasil mengumpulkan syarat minimal yang telah ditetapkan.<sup>88</sup> Hudaya – Nadi ternyata menjadi pasangan calon independen yang lolos verifikasi pada Pemilu Kota Bandung 2008 setelah mendapat dukungan 72.613 KTP sebelum didaftarkan ke KPUD Kota Bandung.

Pada Minggu, 10 Agustus 2008, Pemilu Kota Bandung 2008 dilaksanakan. KPUD menyediakan 3.843 unit TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di seluruh Kota Bandung. Tercatat, sekitar 1.521.362 orang dari masyarakat Kota Bandung yang mempunyai hak untuk memilih pada Pemilu Kota Bandung 2008. Sementara itu juga terdapat 6.873 orang yang tercatat oleh KPUD Kota Bandung sebagai pemilih yang berasal dari TPS Lain.

Berjalan sekitar lima hari setelah setelah pemungutan suara, dilakukan rekapitulasi suara oleh KPUD Kota Bandung, tepatnya tanggal 15 September 2008. Hasil rekapitulasi tersebut memberikan beberapa data, terutama tentang hasil perolehan suara untuk masing – masing pasangan calon, serta presentasi atau hasil perbandingan antara masyarakat Kota Bandung yang menggunakan hak

<sup>87</sup> Diperkirakan pada tahun 2008, jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2,3 juta jiwa. Berdasarkan dari jumlah penduduk tersebut, maka syarat minimum bagi calon kepala daerah jalur perseorangan di Kota Bandung merujuk pada Pasal 59 Ayat 2b Urutan d UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi, "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%.

<sup>88</sup> terdapat 3 bakal calon pasangan independen yang tidak lolos verifikasi KPUD Kota Bandung, yaitu Synar Budhi Arta – Arry Akhmad Arman, Achamd Setiawan – Mamat Rachmat, dan Sugih Wiramikarta - Djono Garyana. Erna Mardiana, "Hanya Satu Pasang Calon Independen yang Berlaga", diunduh dari <http://bandung.detik.com/read/2008/06/19/102039/958908/486/hanya-satu-pasang-calon-independen-yang-berlaga>, pada 28 Maret 2012, pukul 22.35 WIB.

pilihnya dengan yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kota Bandung. Dari total 1.528.235 pemilih, 69,49 % atau sekitar 1.062.934 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan suara yang tidak sah akibat kesalahan teknis pemilih ketika sedang memilih di bilik suara. Sementara itu, jumlah pemilih yang tidak hadir di TPS mencapai 466.301 pemilih atau 30,51% dari total jumlah pemilih. Data ini menunjukkan bahwa jumlah Golput (Golongan putih) istilah bagi pemilih yang tidak memilih masih tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan target KPUD Kota Bandung yang sebelum pemilihan berlangsung menyatakan bahwa ditargetkan akan ada sekitar 80% pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan datang ke TPS.<sup>89</sup>

Hasil Rekapitulasi perolehan suara yang didapat KPUD Kota Bandung pada Pemilu Kota Bandung 2008, memutuskan bahwa Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bandung Periode 2008 – 2013, adalah pasangan no urut 1, yaitu H. Dada Rosada, SH., M.Si – Ayi Vivananda, SH. Pasangan ini mendapat dukungan suara sebanyak 667.026 suara atau 64,9828% dari total keseluruhan suara sah yang masuk. Sementara itu pasangan nomor urut 2, Dr. H. Taufikurrahman – H. Abu Sauqi, memperoleh dukungan sebesar 263.711 suara atau 25,6912%, sedangkan pasangan independen, Drs. H. E Huda Prawira – Nahadi, S.Pd., M.Pd., M.Si, yang bernomor urut 3, mendapat dukungan hanya 95.728 suara atau 9,3260%.

Kemenangan pasangan Dada – Ayi, membuat Dada Rosada kembali melanjutkan jabatannya sebagai Walikota Bandung, sementara itu posisi Wakil Walikota Bandung ditempati oleh orang baru, Ayi Vivananda. Bagi Dada Rosada, keberhasilan menjalankan jabatan sebagai Walikota Bandung untuk periode kedua, merupakan jabatan tertinggi bagi seorang birokrat yang mampu menjadi pemimpin kekuasaan administratif tertinggi di Kota Bandung.

---

<sup>89</sup> Andri Haryanto, “KPU Bandung Gagal Capai Target Partisipasi dalam Pilwalkot”, Diunduh dari <http://bandung.detik.com/read/2008/08/15/192731/989508/486/kpu-bandung-gagal-capai-target-partisipasi-dalam-pilwalkot>, pada 28 Maret 2012, pukul 22.20 WIB.



**Gambar 2.2**  
**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilukada Kota Bandung 2008**  
sumber: <http://kpud-bandungkota.go.id/index.php?pilih=hal&id=16>

Penjabaran mengenai berjalannya Pemilukada Kota Bandung 2008, pada akhirnya mampu menjelaskan secara mendetail tentang data dan fakta tentang perolehan suara yang terjadi. Penjabaran tentang karir Dada Rosada di Persib memberikan sebuah gambaran bahwa meski Dada Rosada sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Persib saat tulisan ini dibuat, tetapi kejadian yang penulis angkat, yaitu pada Pemilukada Kota Bandun 2008, Dada Rosada masih menjabat sebagai Ketua Umum Persib. Lewat kampanye dan berbagai komunikasi dalam mempertahankan hubungan dengan para Bobotoh, Dada Rosada saat itu mengingatkan, meski Persib sedang mengalami dinamika perubahan bentuk dari milik Pemkot Bandung menjadi perseroan terbatas, Dada Rosada tetaplah sebagi Ketua Umum Persib. Sementara itu, penjelasan mengenai Persib dan suporternya secara sekilas, setidaknya bisa sedikit menggambarkan dinamika yang ada di Persib. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam penjelasan mengenai Persib sebagai sebuah ikon dan dinamika politik yang dihadapi Persib di Kota Bandung.

### **BAB 3**

## **PERSIB SEBAGAI IDENTITAS MASYARAKAT KOTA BANDUNG DAN DINAMIKA POLITIK YANG DIHADAPINYA**

Dibuatnya bab mengenai Persib sebagai sebuah identitas masyarakat Kota Bandung dan dianggap sebagai bagian dari budaya Sunda untuk mengungkapkan mengapa Persib bisa mengakar pada masyarakat di Kota Bandung. Analisa ini tidak hanya melihat dari pengaruh budaya itu sendiri, tetapi juga konteks sosio-historis Persib sebagai sebuah tim sepakbola dari dulu hingga kini. Pentingnya analisa awal ini, karena setiap tim sepakbola mempunyai ciri atas daya tarik masing-masing pada hingga mengakar pada masyarakatnya. Contoh pembandingnya adalah dengan Persik Kediri, di Kota Kediri, karena tanpa diduga, tim ini yang tidak diunggulkan sama sekali, mampu menjadi Juara I Liga Indonesia XI 2004/2005 (diteliti oleh Rosa Badrul Munir (2006)). Hal tersebut yang membuat Persik menjadi kebanggaan masyarakat Kota Kediri. Sementara itu meski gelar juara Liga Indonesia belum pernah didapat lagi selama 18 tahun terakhir, Persib tetap melekat dan mengakar pada masyarakat Kota Bandung khususnya. Untuk itulah analisa awal tentang Persib sebagai ikon Kota Bandung serta konteks sosio historisnya, perlu peneliti tulis.

### **3.1 Persib sebagai Sebuah Bagian dari Budaya Sunda**

Persib sangat melekat bagi masyarakat Kota Bandung khususnya, dan juga pada masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Persib dikatakan menjadi bagian dari budaya Sunda karena didasari oleh filosofi permainan yang dianggap mencerminkan Ke-Sunda-an, yaitu sifat kekeluargaan. Hal ini juga diutarakan oleh Tisna Sanjaya, seorang budayawan Sunda yang juga merupakan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Intitut Teknologi Bandung. Menurutnya:

“Kalau Persib itu mempunyai sejarah yang kuat, karena pemain-pemain waktu jaman perserikatan (Liga Perserikatan-penulis), banyak pemain-pemain dari Jawa Barat, tidak hanya Bandung, tapi memang fokus atau banyaknya dari Bandung, seperti Adat Sudrajat, Iwan Sunarya, Encas Tonif, Kosasih Abdul, itu tuh pemain-pemain bola yang menyangga kebudayaan. Mereka adalah aset budaya yang kuat sekali, sehigga melekat di hati para suporter, terutama di tahun 70-an, 80-an, 90-an, karena

pemain-pemain sepakbola tersebut yang saya sebutkan tadi, merupakan era-nya. Mereka bermain sepakbola sangat kultural. Main sepakbola yang kultural itu adalah main sepakbola yang lahir dari budaya setempat. Karena waktu itu banyak sekali lapangan-lapangan sepakbola yang hidup. Jadi jaman sekarang mau main sepakbola harus bayar lapangan, futsal dan segala macam. Dulu itu di Brimob, ada lapangan bebas (dipakai-penulis), di UPI ada lapangan bebas untuk main sepakbola, di Tegalega juga (bebas bermain sepakbola-penulis), sehingga pemain-pemain sepakbola yang hidup di sana itu hidup dari tanahnya, dari lingkungannya yang bebas. Sehingga para pemain itu akrab dan mempunyai ciri khasnya dalam bermain bola, lebih dekat, lebih kekeluargaan seperti dengan operan-operan pendek seperti Barcelona sekarang. Nah itu kalau menurut saya juga mempengaruhi pada strategi budaya, strategi politik yang bisa seperti ini. “

Keterkaitan antara Persib dan masyarakat Bandung, telah terjadi sejak awal berdirinya Persib di tahun 1933. Seperti yang telah dideskripsikan di bab sebelumnya tentang sejarah Persib. Sejarah Persib yang membuat masyarakat Bandung merasa terikat dengan Persib, dan Persib dianggap lebih dari sekedar tim sepakbola. Dari sisi teknis Persib diawal berdirinya sangat mencerminkan permainan sepakbola indah yang kemudian berujung prestasi. Sebuah prestasi olahraga pastinya akan berpengaruh pada masyarakat yang merasa terwakili dengan olahraganya. Persib telah melalui dua hal tersebut, yaitu sebagai bentuk perjuangan dan berprestasi di ajang nasional.

Tidak adanya tokoh nasional yang berasal dari Jawa Barat, dari era kemerdekaan hingga kini, membuat Persib menjelma menjadi sebuah tokoh bagi masyarakat Bandung dan Jawa Barat itu sendiri. Seperti yang diketahui, tidak ada tokoh Jawa Barat di kancah politik nasional sekarang ini yang begitu besar perannya. Hanya ada dua nama tokoh Sunda dalam kancah elit politik nasional selama ini, yaitu Karto Suwiryo dan mantan Wakil Presiden RI ke-4, Wirahadi Kusumah. Fakta ini dikatakan oleh M. Farhan, selaku irektur Marketing PT. PBB, yang berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh PT. PBB tentang Bobotoh Persib. Menurutnya:

“Persib itu identitas. Gini, Jawa Barat atau Jawa bagian barat atau orang Sunda, orang Parahyangan, punya karakter yang sangat kuat dan juga pengaruh yang sangat kuat bagi Rakyat Indonesia. Tetapi di saat yang bersamaan, terutama sejak sejarah Indonesia yang modern, Jawa Barat

tidak punya ketokohan. Maksudnya adalah ketokohan yang menggebrak, siapa? kita (orang Jawa Barat-penulis) tidak punya Bung Karno, kita tidak punya penguasa, seperti Soeharto. Jawa Barat tidak punya seorang yang brilian seperti Habibie. Kita juga gak punya orang yang pemberontak, pemberani, seperti misalnya Kemal Idris atau pun ada sih yang terkenal Karto Suwiryo (dalam pemaknaan negatif sebagai seorang pemberontak Komunis-penulis). Kita gelisah, Wirahadi Kusumah is the highest level of Sundanese in the world, di jadi RI 2 doang tapi, ya kan? Nah jadi akhirnya kita bertanya-tanya sebetulnya orang Jawa Barat ini, setiap orang Jawa Barat itu perlu identitas yang menunjukkan the greatest, kekuasaan, ke-powerfull-an. Dan kita menemukannya di klub sepakbola yang bernama Persib ini..“

Kekosongan tokoh Sunda ini, mampu diisi lewat hadirnya Persib dan prestasi di awal berdirinya. Di era awal berdirinya Persib, pada tahun 1933 sampai dengan kemerdekaan di tahun 1945, Persib mampu menjuarai kompetisi sepakbola resmi di bawah PSSI tepatnya di tahun 1937, setelah mengalahkan kekuatan sepakbola Solo, Peris Solo. Di era 1960-an hingga 1970-an. Persib mempunyai pemain berdarah Maluku, tetapi kelahiran Cimahi, Max Timisela. Beliau merupakan pemain Timnas Indonesia di era 60-an, yang sempat mengikuti pertandingan persahabatan ke beberapa klub di daratan Eropa, salah satunya Werder Bremen, klub sepakbola asal Jerman yang baru saja memenangi *Bundesliga* (Liga Sepakbola Jerman) musim kompetisi 1964/65. Dalam pertandingan persahabatan tersebut, meski Timnas Indonesia kalah 6-5, tetapi Max Timisela mampu mencetak dua dari lima gol Timnas ke gawang Werder Bremen. Kehebatan Max Timisela sebagai pemain gelandang inilah yang membuat pelatih Warden Bremen ketika itu, Uwe Seler sangat berminat meminang Max Timisela dan rekannya Soetjipto untuk merumpuk di Jerman bersama tim tersebut. Minat dari Warden Bremen ini ternyata tidak bisa terlaksana. Surat resmi yang ditunjukkan kepada PSSI tersebut, dimentahkan oleh Menteri Olahraga saat itu, Muladi. Alasannya Max Timisela dan Soetjipto masih harus bertanding di beberapa kompetisi bersama Timnas Indonesia, dan keputusan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Indonesia saat itu, Soekarno.<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Ari Syahril Ramadhan, "Tanpa Restu Presiden, Gagal ke Werder Bremen", diunduh dari <http://www.persibholic.com/3292/tanpa-restu-presiden-gagal-ke-werder-bremen>, pada 5 Mei 2012, pukul 13.24 WIB.

Prestasi lainnya dari Persib yang merupakan momentum keberhasilan masyarakat Bandung dan Jawa Barat adalah ketika Persib memenangkan Liga Indonesia I di tahun 1995. Liga Indonesia I yang merupakan liga profesional pertama di bawah PSSI. Ketika itu semua pemain Persib merupakan warga Bandung dan Jawa Barat. Tidak ada satu pun pemain asing (internasional) dalam tubuh Persib. Prestasi ini berlanjut ketika Persib di tahun 1996, mewakili Indonesia diajang Liga Champion Asia. Tak disangka, ternyata Persib yang hanya bermaterikan pemain lokal Bandung dan Jawa Barat mampu menembus babak perempatfinal, sebelum akhirnya tersingkir setelah kalah bersaing dengan tiga tim Asia lainnya, yaitu Verdy Kawasaki (Jepang), Ilhwa Chunma (Korea), dan Thai Farmers Bank (Thailand).<sup>91</sup> Tisna Sanjaya, sekali lagi mengutarakan bahwa Persib bisa menjadi kebanggaan warga Bandung lewat cara bermain dan prestasinya<sup>92</sup> (lihat prestasi Persib di Tabel 2.1).

Data yang dirilis oleh PT. PBB menunjukkan bahwa dari 5.3 juta Bobotoh di Pulau Jawa bagian barat, kurang lebih 70% dari mereka mengatakan dan merasa bahwa Persib merupakan sebuah budaya orang Sunda.<sup>93</sup> Persib dianggap sebagai sebuah simbol kehebatan dan kegagahan dari pangeran Sunda,<sup>94</sup> pengganti dari era keemasan tanah Pasundan di bawah kerajaan Padjajaran yang dikalahkan oleh Majapahit. Farhan mengatakan:

“Karena Persib memiliki karakter jagoannya Sunda, elegan tapi mematikan, ya kan kalo orang Sunda itu kan gitu. Gak kaya orang misalkan orang Ambon yang berwatak keras. Orang Jawa aja kan diem-

<sup>91</sup> Ketika itu untuk menentukan tim mana yang lolos ke babak semifinal Liga Champion Asia 1996, tidak menggunakan sistem gugur seperti sekarang ini. Sistem yang digunakan adalah *home tournament*, dimana Persib ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Di saat yang bersamaan, seselasainya Liga Champion Asia 1996, pelatih Persib ketika itu, Indra Thohir, dianugrahi sebagai Pelatih Terbaik Liga Champion Asia 1996. Ari Syahril Ramadhan, "Sejarah Ada di Tangan Thohir", diunduh dari <http://www.persibholic.com/3856/sejarah-ada-di-tangan-indra-thohir>, pada 5 Mei 2012, pukul 14.27 WIB.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Tisna Sanjaya, Dosen di Jurusan Seni Grafis, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, sekaligus Budayawan pemerhati seni, kebudayaan, dan sepakbola di Jawa Barat. Wawancara dilaksanakan pada 14 Maret 2012, pukul 12:19 WIB, bertempat di Laboratorium Seni Grafis, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan, irektur Marketing PT. PBB (Persib Bandung Bermartabat), pada 21 Maret 2012, pukul 16:11 WIB, bertempat di Starbucks Coffe Kemang (Depan Kem-Chick Kemang), Jakarta

<sup>94</sup> Karena dianggap sebagai Pangeran Sunda, Persib selain memiliki julukan Maung Bandung, juga memiliki julukan lain, yaitu Pangeran Biru.

diem tapi gitu.. Nah itu kita gak punya. Nah Persib itu menjadi personifikasi, harapan, dan identifikasi dari sosok impian kita terhadap *the Hero of Jawa Barat*, *the Hero of Parahyangan*, *the Hero of Sunda* yang dibunuh *literally* oleh Gajah Mada. Jadi Sentimen ini sudah ada sejak Majapahit menguasai Padjajaran. Dan Padjajaran sebagai awal identitas kita, sudah dibubarkan sejak awal. Jadi kita ngeliat Persib sebagai titisannya Prabu Siliwangi“

Sebuah konflik atas dasar sejarah yang mendera warga Sunda ini, membuat para Bobotoh datang ke stadion untuk menonton Persib bukan hanya sekedar untuk menonton atau mendukung Persib. Setiap Persib bermain dianggap sebagai sebuah pertempuran yang sangat mewakili harga diri Sunda yang merupakan nilai Jawa Barat yang luhur. Pendapat ini setidaknya senada dengan pendapat Goodhart dan Chataway dalam bukunya *War Without Weapon*, bahwa pertandingan sepakbola yang dipenuhi dan didukung banyak suporter, bukan sekedar bentuk dukungan semata. Penonton datang ke stadion karena merasa terwakili oleh tim yang sedang bertanding.<sup>95</sup> Pada akhirnya fanatisme atau kecintaan sebuah masyarakat pada tim sepakbola bisa menjadikan tim tersebut menjadi sebuah simbol atau *icon*.<sup>96</sup> Tim sepakbola tersebut akan menjadi simbol bahwa masyarakat ini berbeda dengan masyarakat lainnya, dan tim sepakbola mereka adalah kebudayaan mereka.<sup>97</sup> Kecintaan masyarakat Bandung khususnya kepada Persib, membuat Persib menjadi sebuah simbol kebanggaan dan pembeda dari Kota Bandung khususnya. Terlebih Bobotoh pun tidak hanya terkonsentrasi di Kota Bandung, tapi juga berbagai daerah khususnya pada masyarakat di Jawa Barat.

Persib sebagai sebuah identitas bagi masyarakat Bandung dan Jawa Barat, juga diutarakan oleh Manajer Persib tahun 2005-2007, Yossi Irianto. Menurut beliau Persib menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya. Yossi menyatakan bahwa jika dirinya pergi keluar Bandung,

<sup>95</sup> Goodhart and C. Chataway, *War Without Weapons*, London: 1968, hlm. 20.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Yossi Irianto, Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung 2004-sekarang; Manajer Persib 2005-2007. Wawancara dilaksanakan pada 24 April 2012, pukul 15.25 WIB, bertempat di Savoy Homan Cafe, Jl. Asia Afrika Bandung.

<sup>97</sup> Tidak hanya dalam sepakbola, olahraga yang dipertandingkan dan menghasilkan kompetisi, bisa kemudian menjadi sebuah simbol keterwakilan atas daerah atau wilayahnya yang diwakili oleh olahraga tersebut dalam sebuah pertandingan dan kompetisi, dapat dilihat dalam Allison Lincoln, (ed.), *Op. Cit.*, hal. 70 - 71.

misalkan Jakarta, meski menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sejak 2004 hingga kini, lebih banyak yang mengenalnya sebagai Manajer Persib yang hanya dijabatnya selama dua tahun.

" Satu hal yang membanggakan kita, Persib itu menjadi icon Bandung dan icon Jawa Barat. Bicara Persib, tidak segan orang-orang mengatasnamakan kelompok mereka sebagai Bobotoh Cimahi, Bobotoh Ciamis, Bobotoh Sumedang, dan lainnya, itu sebagai contoh. Saya menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah sudah 8 tahun di Kota Bandung, tetapi popularitas saya kalah sebagai Manajer Persib yang hanya 2 tahun. Saya berangkat ke Jakarta, minimal tukang parkir, dan OB di hotel, menyapa saya, bukan saya sebagai Kadispenda Kota Bandung, tapi sebagai Manajer Persib. Ini menandakan keberadaan Persib itu bersenyawa dengan masyarakat Bandung dan Jawa Barat, makanya tadi Persib itu adalah icon, jadi kebanggaan Bandung dan Jawa Barat. "

Sebuah fakta bahwa sepakbola menjadi identitas atau kebudayaan suatu masyarakat, juga terjadi di Inggris. Berawal dari penunjukan FIFA kepada FA (PSSI-nya Inggris), yang menetapkan Inggris menjadi tuan rumah Piala Eropa 1996. Panitia penyelenggara dan FA akhirnya menyetujui bahwa tema Piala Eropa 1996 adalah "*football's coming home*".<sup>98</sup> Penentuan tema ini didasari bertepatan dengan 30 tahun yang lalu Inggris menjuarai Piala Dunia 1966. Ada hasrat yang diinginkan oleh seluruh warga Inggris bahwa sepakbola yang diklaim berasal dari Inggris, dan sudah menjadi budaya masyarakat Inggris, dapat kembali berjaya di tanah Inggris Raya.<sup>99</sup> Meski akhirnya Jerman yang menjadi juara pada Piala Eropa 1996 tersebut, slogan "*football's coming home*" ternyata menjadi sebuah momen menarik atas klaim bahwa sepakbola adalah budaya dari masyarakat Inggris, yang kemudian diiyakan oleh banyak politisi menjelang pemilu Inggris tahun 1997.<sup>100</sup>

Sepenggal contoh tentang kondisi sepakbola sebagai kebudayaan di Inggris, merupakan sebuah bukti bahwa institusi olahraga, terutama sepakbola bisa sangat melekat dan menarik perhatian masyarakat, termasuk Persib di

<sup>98</sup> Ben Carrington, "Football's Coming Home: But Whose Home? And Do We Want It", dalam Adam Brown (ed.), *Fantastics! Power, Identity & Fandom in Football*, London: Routledge, 1998, hlm. 110 – 111.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 114 – 115.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

Bandung. Karl Marx, mengatakan bahwa sebuah institusi olahraga bisa saja menjadi sangat terkenal atau menarik perhatian masyarakat. Institusi olahraga tersebut haruslah mempunyai sejarah panjang dan berkaitan dengan dinamika politiknya yang ada ketika itu.<sup>101</sup> Dari pendapat Marx ini, maka Persib sebagai sebuah institusi olahraga di Kota Bandung, memang telah melewati sejarah panjang. Sejarah yang dilewati oleh Persib juga terus berkaitan dengan dinamika politik nasional, yaitu dalam perjuangan mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan, serta dinamika politik di Kota Bandung itu sendiri, dahulu hingga kini dalam era desentralisasi lewat Pemilukada.

Persib sebagai tim sepakbola bisa dikatakan sangat identik dengan kaum laki-laki. Selama ini berbagai acara pertandingan sepakbola yang dikenal masyarakat, lebih banyak menyiarkan pertandingan sepakbola laki-laki. Dominasi pria pada sepakbola, tidak serta merta meniadakan sepakbola wanita. Dalam kompetisi olahraga *multi event* internasional ataupun nasional, juga dipertandingkan cabang sepakbola perempuan.

Persib dalam sejarahnya serta saat ini, tidak pernah mendirikan atau mempunyai tim sepakbola perempuan. Hal ini juga tidak lepas dari tidak berjalannya liga sepakbola perempuan secara profesional dan berkala. Tidak adanya Persib perempuan, bukan berarti tidak adanya suporter atau Bobotoh perempuan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh PT. PBB, lewat Direktur Marketing-nya, M. Farhan, diketahui bahwa dari 5.3 juta Bobotoh di Jawa bagian barat, 26% nya adalah perempuan. Sekitar 1.378.000 Bobotoh perempuan ini mempunyai demografi, yaitu berkisar pada umur 21-40 tahun, terutama sudah menikah, dan kecenderungannya menyukai Persib akibat dari pengaruh suami dan anak.<sup>102</sup>

Pendukung perempuan Persib ini disurvei oleh PT. PBB tahun 2011 di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan 19 Kota di Jawa Barat. Secara psikografi, Bobotoh perempuan ini masuk ke dalam kelompok *enthusiat* dan lebih toleran dan terbuka kepada kelompok suporter tim lain. Ciri-ciri dari Bobotoh perempuan

---

<sup>101</sup> Levon Chorbajian, "Toward A Marxist Sociology of Sport: An Assessment and A Preliminary Agenda", dalam *Op. Cit.*, 2002, hlm. 60.

<sup>102</sup> Hasil survey dilakukan oleh PT. PBB pada tahun 2011 di Jakarta, Surabaya, Bandung dan 19 Kota lainnya di Jawa bagian barat.

adalah terbuka, loyal dan sangat memperhatikan kabar-kabar terbaru dari Persib itu sendiri.<sup>103</sup>

Data-data mengenai pendukung perempuan Persib memang menandakan adanya perempuan dalam sepakbola. Daya tarik sepakbola dirasa masih mampu mendapat perhatian dari perempuan. Survey yang dilakukan oleh PT. PBB, menunjukkan relasi antara Persib dan perempuan. Kaitan yang terjadi dengan politisasi Persib dalam Pemilu Kota Bandung 2008 oleh Dada Rosada, seharusnya menjadi perhatian bagi suporter perempuan Persib. Ciri utama dari suporter perempuan Persib yang mengikuti terus kabar berita terbaru tentang Persib, menjadikan mereka memperhatikan permasalahan politisasi Persib ini. Mengetahui variabel pengaruh Bobotoh perempuan dalam melihat politisasi Persib oleh Dada Rosada, haruslah dilihat dengan menggunakan penelitian lebih mendalam. Meski belum adanya penelitian mengenai hal ini, setidaknya data-data yang menunjukkan hubungan Persib dan perempuan, menunjukkan bahwa di kalangan suporter Persib, tidak sepenuhnya milik laki-laki tetapi juga para perempuan.

### **3.2 Interaksi Persib Dengan Dinamika Politik di Kota Bandung**

Penjelasan tentang sedikit sejarah Persib sudah dijabarkan oleh penulis pada bab sebelumnya. Analisis yang terdapat dalam penjabaran Persib di masa berdirinya adalah Persib ternyata berdiri atas adanya dinamika politik yang berlangsung ketika itu. Tidak berhenti sampai di situ, perjalanan Persib selanjutnya, termasuk di era-era rezim kekuasaan yang berlangsung di Indonesia, Persib tak pernah lepas dari dinamika politik di Kota Bandung, maupun sesekali dengan dinamika politik nasional. Oleh karenanya penulis akan memberikan analisis Persib dengan dinamika politik di Kota Bandung berdasar rentang waktu atau rezim kekuasaan yang sedang berlangsung di Indonesia.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

### 3.2.1 Persib di Era Awal Berdirinya hingga Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945

Sebelum Persib lahir, di tahun 1923, berdiri BIVB (*Bandung Inlandsche Voetbal Bond*), yang merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis, di bawah pimpinan tokoh wanita pejuang, R. Atot.<sup>104</sup> Meski pada akhirnya BIVB menghilang, tapi ini adalah indikasi pertama atas interaksi sepakbola di Bandung dengan dinamika politik, dalam hal ini adalah gerakan perjuangan kemerdekaan. Setelah BIVB bubar, ada dua perkumpulan sepakbola di Bandung yang lahir, yakni PSIB dan NVB, di mana pada 14 Maret 1933 kedua perkumpulan itu sepakat melakukan fusi dan lahirlah perkumpulan yang bernama Persib yang merupakan singkatan dari Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung.<sup>105</sup>

Lahirnya Persib di Kota Bandung, bukan berarti Persib adalah satu-satunya tim yang menaungi perkumpulan sepakbola di Kota Bandung. Di saat yang sama, terdapat pula perkumpulan sepakbola lainnya di Bandung yang didirikan oleh perkumpulan orang-orang Belanda di Bandung, yaitu VBBO (*Voetball Bond Bandung & Omstreken*). Di saat itu, lebih banyak masyarakat Bandung yg menonton pertandingan VBBO karena dilaksanakan di dalam Kota, seperti di UNI atau Sidolig, sementara pertandingan-pertandingan Persib dilaksanakan di pinggiran Kota, seperti di Tegalega dan Ciroyom.<sup>106</sup> Seiring berjalannya waktu, karena Persib mewakili kaum pribumi dan perjuangan nasional, maka masyarakat berbondong-bondong mulai menyaksikan pertandingan Persib, dan VBBO mulai kehilangan pamor, hingga akhirnya VBBO bubar.<sup>107</sup> Meski Persib harus terlibat dalam berbagai dinamika politik yang ada, di tahun 1937, Persib mampu menjuarai kompetisi Perserikatan yang diselenggarakan oleh PSSI di Solo. Persib mengalahkan Persis Solo di final dengan kedudukan akhir 2-1.

<sup>104</sup> R. Risnandar Soendoro, *Persib Maung Bandung: Lintas Sejarah Persib*, Bandung: CV Soendoro, 2001 hlm. 20.

<sup>105</sup> Koran Jakarta, *op. cit.*

<sup>106</sup> R. Risnandar Soendoro, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>107</sup> Bubarnya VBBO, juga diikuti dengan penyerahan lapangan UNI dan Sidolig bagi Persib. Hal lainnya adalah klub-klub yang bernaung di bawah VBBO akhirnya berpindah haluan dengan berada di bawah Persib, *ibid.*

Datangnya Jepang ke Nusantara pada tahun 1942, tidak hanya berpengaruh pada kondisi Nusantara secara keseluruhan, tetapi juga persepakbolaan yang sedang berkembang. Awal kedatangan Jepang yang menggantikan Belanda menjajah Nusantara, ternyata tidak membawa kehidupan di Nusantara menjadi lebih baik. Sebaliknya keadaan semakin memburuk. Kondisi ini juga berimbas pada persepakbolaan Nusantara yang sedang dalam kondisi perkembangan. Banyak organisasi termasuk organisasi olahraga dihentikan paksa oleh Jepang. Penjajah Jepang hanya mengakui satu organisasi olahraga, yaitu Rengo Tai Iku Kai.<sup>108</sup> Hal ini juga berpengaruh pada Persib dan berbagai perkumpulan sepakbola di daerah lainnya di Nusantara. Pada kurun waktu penjajahan Jepang di Nusantara, bisa dikatakan Persib vakum dari dunia persepakbolaan nusantara. Kompetisi sepakbola di bawah PSSI pun vakum karena termasuk organisasi yang dibredel oleh Jepang. Pembredelan atau penghapusan paksa organisasi olahraga termasuk PSSI oleh Jepang, membuat literatur mengenai kondisi olahraga Nusantara di saat itu sangat sulit didapatkan, begitu pula tentang kondisi Persib karena pemberedelan politik ini.

### **3.2.2 Persib di Era Awal Kemerdekaan dan Rezim Orde Lama**

Merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, membawa harapan baru bagi semua lini dalam kehidupan masyarakatnya. Sepakbola termasuk ke dalam salah satu lini tersebut. Meski telah merdeka, tetapi tidak serta merta kompetisi sepakbola nasional bisa berlangsung dengan cepat. Ada proses konsolidasi antar tim-tim perserikatan yang vakum ketika Nusantara dijajah Jepang, untuk kembali membangun kembali kompetisi sepakbola nasional. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendirikan kembali PSSI.

Persib, bersama Persija Jakarta, PSIM Yogyakarta, Persebaya Surabaya, membangun kembali PSSI di awal Kemerdekaan.<sup>109</sup> Di saat yang bersamaan, Indonesia sedang mengalami revolusi fisik, setelah NICA (*Nederlansch Indische Civiv Administration*) datang ke Indonesia sebagai kesatuan yang bertanggung

<sup>108</sup> Yosef Tor Tulis (ed.), *Sepakbola Indonesia: Alat Perjuangan Bangsa Dari Soeratin Hingga Nurdin Halid (1930 – 2010)*, Jakarta: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), 2010, hlm. 74.

<sup>109</sup> R. Risnandar Soendoro, *Op. Cit.*, hlm. 27.

jawab atas wilayah bekas jajahan negara-negara Perang Dunia 2. Revolusi fisik terjadi akibat Belanda membonceng NICA, dalam usahanya untuk menjajah kembali Republik Indonesia.<sup>110</sup> Di situasi ingin menguasai Indonesia kembali, Belanda tidak hanya melakukannya dengan cara pertempuran fisik, tetapi juga lewat sepakbola.

Meski PSSI telah berdiri kembali sebagai satu-satunya organisasi sepakbola resmi di Indonesia, Belanda mencoba membuat persatuan sepakbola tandingan. Maksud dari pembuatan persatuan sepakbola tandingan ini tentu saja untuk mencoba merebut hati masyarakat atas datangnya kembali Belanda ke Indonesia. Organisasi sepakbola tandingan yang didirikan oleh Belanda di awal masa revolusi fisik, bernama NIVU (*Nederlandsche Indische Voetbal Unie*), yang menaungi perkumpulan-perkumpulan sepakbola di Indonesia milik masyarakat Belanda yang pernah ada, salah satunya adalah menghidupkan kembali VBBO di Bandung.<sup>111</sup>

Belanda lewat NIVU mulai dikembangkan tahun 1949 – 1950. Sepanjang kurun waktu tersebut, Persib dan PSSI berjuang untuk melawan pengaruh NIVU di persepakbolaan Inonesia,<sup>112</sup> perjuangan ini sejalan dengan perjuangan di medan pertempuran dan meja perundingan. Hingga di era itu, muncul istilah dari insan olahraga sepakbola nasional: “Senjata di tangan, bola di kaki”.<sup>113</sup> Seiring berjalannya waktu, posisi Republik Indonesia dalam perjuangan dan perundingan untuk mengusir Belanda, akhirnya berhasil di tahun 1950 lewat Konferensi Meja Bundar.<sup>114</sup> Di saat yang bersamaan, PSSI juga menjadi satu-satu organisasi sepakbola di Indonesia. Lewat momentum yang sama, akhirnya Persib juga menjadi satu-satunya tim sepakbola di Kota Bandung.

Berdirinya Republik Indonesia secara penuh tanpa adanya gangguan atau invasi dari negara lain, membuat kompetisi sepakbola nasional bisa kembali bergulir. Dalam persiapan menghadapi kompetisi, ternyata bagi Persib tidak

<sup>110</sup> Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta: LKis, 2005, hal. 46-52, yang dikutip oleh Connie Rahakundii Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 79.

<sup>111</sup> R. Risnandar Soendoro, *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Yosef Tor Tulis (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>114</sup> Connie Rahakundini Bakrie, *Op. Cit.*, hlm. 80.

semulus yang dibayangkan. Pada periode 1953 – 1956, permasalahan utama Persib adalah mempersiapkan tim, terutama kesiapan pengurus Persib ketika itu dalam mempersiapkan Persib. Pengurus Persib saat itu dihadapkan pada masalah karena Persib yang tidak mempunyai *home base* atau sekretariat yang tetap, sehingga dapat dikatakan, Pengurus Persib harus berpindah-pindah tempat untuk bekerja. Solusi ditemukan ketika Ketua Persib saat itu, R. Soendoro, bertemu dengan Walikota Bandung, R. Enoch, pada akhir 1956 untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi Persib. Pada akhirnya, R. Enoch, membangun Sekretariat Persib di Jl. Gurame, Cilentah, Bandung.<sup>115</sup> Sekretariat Persib ini, masih tetap ada sampai sekarang. Adanya Sekretariat Persib di Jl. Gurame, memberi sebuah contoh, bagaimana seorang Walikota Bandung, sebagai jabatan politik tertinggi di Kota Bandung, dapat mengeluarkan sebuah kebijakan politik yang bertujuan untuk membantu perjalanan Persib. Hal ini juga menjadi sebuah bukti bahwa sepakbola terutama Persib di Kota Bandung, sejak awal perjalanannya, telah berinteraksi dengan dinamika politik yang ada. Meski saat itu Sekretariat Persib didirikan oleh Walikota Bandung, tetapi Ketua Umum Persib belum secara otomatis dijabat oleh Walikota Bandung. Pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru, di mana peran negara diperbesar hingga ke pelosok daerah oleh Presiden Soeharto, juga membawa pengaruh terhadap kepemimpinan Persib kurun waktu tersebut.

### 3.2.3 Persib di Era Orde Baru

Era Orde Baru dapat diidentikkan dengan sentralisasi, di mana segala urusan daerah harus dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Segala kebijakan di Pemerintah Daerah diputuskan serta dijalankan sepengetahuan Pemerintah Pusat, dengan kata lain birokrasi di daerah dikontrol dari Pusat.<sup>116</sup> Birokrasi di daerah digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk mengontrol keadaan serta situasi yang ada di daerah. Hubungan yang tumbuh kemudian antara Pemerintah Pusat dan

---

<sup>115</sup> R. Risnandar Soendoro, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>116</sup> Berdasarkan pengamatan yang ada maka penggunaan/berjalannya proses kebijakan birokrasi di era Orde Baru, dapat dikatakan masuk ke dalam kategori Orwellisasi, yaitu birokrasi dijadikan alat atau perpanjangan tangan oleh negara untuk mengontrol masyarakat, lihat M. Mas'ud Said, *Birokrasi Di Negara Birokratis (Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia)*, Malang: UMM Press, 2007.

Pemerintah Daerah bersifat *patron-client*, sehingga pengaturan situasi di daerah lebih mudah.<sup>117</sup> Pemerintah Pusat juga tidak saja mengontrol situasi di daerah lewat kontrol birokrasi, tetapi juga lewat tangan militer, yaitu Kodam (Komando Daerah Militer). Pengaruh Kodam di daerah-daerah dapat dilihat dengan dipilihnya pemimpin tertinggi daerah di institusi birokrasi dari kalangan militer yang bertugas di Kodam-kodam yang ada.<sup>118</sup> Tujuan dari digunakannya militer serta birokrasi di daerah-daerah, untuk menciptakan stabilitas di masyarakat sehingga stabilitas nasional bisa tercapai dan segala faktor pembangunan nasional tidak terganggu.

Sebuah sistem yang dibangun oleh rezim Orde Baru ini, juga berpengaruh bagi Persib itu sendiri. Kodam III Siliwangi, merupakan Kodam yang bertugas di wilayah Jawa bagian Barat dan berpusat di Bandung.<sup>119</sup> Hal ini berpengaruh pada tempat di mana Persib bertanding di era ini. Stadion Siliwangi yang digunakan oleh Persib untuk menjamu tim lawan di Bandung adalah stadion milik Kodam III Siliwangi. Penggunaan Stadion Siliwangi oleh Persib dikarenakan memang tidak adanya stadion lain di Kota Bandung yang bisa dikatakan memenuhi standar nasional. Fakta bahwa Persib menggunakan Stadion Siliwangi juga dikomentari oleh M. Farhan, Direktur Makreking PT. PBB. Menurutnya:

“ Sepakbola lahir di Indonesia sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme, kemudian dijadikan alat untuk mempersatukan diawal-awal kemerdekaan, kemudian di awal era modern awal tahun 1980-an sebetulnya, waktu itu Pak Harto sudah mendesain bahwa sepakbola ini harus menjadi salah satu alat pembinaan kebangsaan. Itu sebabnya ketua , pengurus cabang provinsi add-officio pasti. Add-officio profinsi dengan gubernur, pengurus kota atau kabupaten, karena ini satu jalur pembinaan. Dan tentara dipaksa untuk membangun infrastruktur sepakbola. Oleh karena itu stadion terkenal di Kota Bandung itu adalah Stadion Siliwangi milik Kodam III Siliwangi “

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 204.

<sup>118</sup> Pada November 1980, tercatat ada 19 Gubernur di Indonesia yang berasal dari militer (70.3% dari total Gubernur yang ada di Indonesia). Sementara itu, juga terdapat 137 Bupati di Indonesia yang berasal dari militer (56.6% dari total Bupati yang ada di Indonesia). David Jenkins, *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983*, New York : Cornell University, 1984, hlm. 198.

<sup>119</sup> Ada sembilan Kodam yang ada di Indonesia, Kodam: I Medan, II Palembang, III Bandung, IV Semarang, V Surabaya, VI Balikpapan, VII Ujungpandang, VIII Jayapura, X Denpasar.

Secara khusus Kodam III Siliwangi membangun Stadion Siliwangi, bukan untuk membuat *home base* atau stadion kandang bagi Persib. Stadion Siliwangi, dibuat untuk sarana olahraga bagi tentara dan pegawai di Kodam III Siliwangi. Selain itu, stadion yang berkapasitas 25.000 tempat duduk, juga didirikan sebagai sebuah monumen atau tempat untuk menghargai bagi kurang lebih 20.000 warga Bandung, yang telah rela membakar tempat tinggalnya dalam peristiwa Bandung Lautan Api.<sup>120</sup> Mulai dikerjakan pada tahun 1954, tepat dua tahun kemudian atau lebih tepatnya 24 Maret 1956, Stadion Siliwangi selesai dibangun. Pembukaan stadion Siliwangi, dibuka oleh Panglima Kodam III Siliwangi saat itu, Kolonel Infantri AE Kaliwarang. Sebagai acara hiburan, digelar pertandingan persahabatan antara Persib melawan Persija Jakarta.<sup>121</sup> Mulai dari hari itulah maka Persib diperbolehkan menggunakan Stadion Siliwangi untuk menjamu tim lawan, meski kepemilikan Stadion Siliwangi tetap milik Kodam III Siliwangi, bukan milik Persib atau pun Pemkot Bandung.

Pengaruh militer di Persib bukan hanya dari Stadion Siliwangi semata. Persib dalam perjalanannya pernah juga diketuai oleh tentara aktif di era tahun 1960-1970-an. Militer aktif yang pernah menjadi Ketua Umum Persib adalah Kol. Adella dan Kol. D. Hanafiah. Keduanya tercatat sebagai anggota di satuan Kodam III Siliwangi dan statusnya adalah militer aktif ketika menjabat Ketua Umum Persib.<sup>122</sup> Selain itu kedekatan Persib dan Kodam III Siliwangi, membuat adanya relasi yang terus berjalan antara dua organisasi ini, yaitu Pangdam III Siliwangi adalah *ex-officio* organisasi dalam Persib.<sup>123</sup>

Kedekatan Persib tidak hanya organisasi militer di Bandung, tetapi juga dengan birokrasi kota Bandung itu sendiri. Di era Orde Baru, ada satu hal yang membuat Persib menjadi lebih dekat dengan birokrasi di Kota Bandung, yaitu posisi Ketua Umum Persib dijabat oleh Walikota Bandung yang sedang dalam masa tugasnya. Hal ini sebenarnya juga terjadi di beberapa tim sepakbola perserikatan lainnya di Indonesia ketika itu. Dengan berlakunya sistem ini, maka

---

<sup>120</sup> Kusmayanto Kadima, "PSSI dan Jas Merah Siliwangi", diunduh dari, <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/02/21/pssi-dan-jas-merah-siliwangi/>, pada 7 April 2012, pukul 11.34 WIB.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> R. Risnandar Soendoro, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>123</sup> Kusmayanti Kadima, *op. cit.*

segala urusan Persib berada di wilayah Pemkot Bandung. Persib mejadi sebuah institusi olahraga di bawah arahan Pemkot Bandung. Meski begitu, secara sturktur manajemen tim, Persib tidak diisi/dijabat oleh pegawai negeri di Pemkot Bandung, melainkan orang-orang yang dipilih oleh ketua umum untuk menjadi tim manajemen Persib. Berikut adalah beberapa nama Ketua Umum Persib yang juga merupakan Walikota Bandung,

**Tabel 3.1**  
**Daftar Nama Ketua Umum Persib yang Merupakan Walikota Bandung**

No	Nama/Masa Jabatan	Walikota Bandung	Ketua Umum Persib
1	R. Otje Djundjuna	1976-1978	1972-1979
2	H. Ateng Wahyudi	1983-1993	1985-1993
3	H. Wahyu Hamijaya	1993-1998	1994-1998
4	H. AA Tarmana	1998-2003	1998-2003
5	H. Dada Rosada	2003-2013	2003-2008

*Diolah dari berbagai sumber*

Ada kesan lebih mudah ketika Walikota Bandung menjadi Ketua Umum Persib. Segala urusan yang terkesan lebih mudah yang dimaksud adalah banyak urusan pendanaan Persib yang menjadi tanggungan Pemkot Bandung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Persib dan tim-tim perserikatan lainnya, dijalankan oleh dana hibah dari APBD masing-masing daerah. Persib mendapatkan dana untuk menjalankan Persib berkompetisi adalah lewat dana hibah dari APBD Kota Bandung.<sup>124</sup>

Pada tahun 1978, lahirlah kompetisi Galatama, yaitu kompetisi tim-tim sepakbola Indonesia yang kepemilikannya adalah milik para pengusaha, bukan milik pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Galatama lahir atas prakarsa pengusaha-pengusaha Indonesia yang merasa gerah terhadap kondisi sepakbola nasional. Ada kekhawatiran bahwa tim-tim sepakbola perserikatan, penuh potensi atas praktik penyelewangan dana di daerah, serta sulitnya para pengusaha untuk berkontribusi kepada tim-tim sepakbola daerah

<sup>124</sup> Lihat Pitoyo, *Op. Cit.*, hlm. 187-206.

kesayangannya.<sup>125</sup> Akhirnya lewat audiensi dan komunikasi dengan PSSI, dibuat sebuah kompetisi yang bernama Galatama, yang merupakan kompetisi semi-profesional di Indonesia. Di saat yang bersamaan, Liga Perserikatan tetap dijalankan.

Bergulirnya kompetisi Galatama merupakan pertanda bahwa kekuatan negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi sedang melemah. Di sisi yang lain, kekuatan perekonomian swasta ketika itu sedang dalam kondisi yang sangat baik. Secara nasional, hal ini dapat dilihat ketika negara sedang dalam proses pembangunan ekonomi yang sangat digadangkan oleh rezim Orde baru. Langsung maupun tidak langsung, para pengusaha swasta, terkenda dampak positif atas pembangunan ekonomi.<sup>126</sup> Efek dari dua hal yang berkaitan ini tentu saja berimbas pada persepakbolaan nasional, yaitu dengan munculnya berbagai macam tim sepakbola di luar tim-tim perserikatan.

Kompetisi Galatama berakhir di tahun 1994, di mana pada musim 1994/1995, PSSI memutuskan untuk menggabungkan tim-tim dari Galatama dan dari Perserikatan untuk berkompetisi bersama, dengan nama Liga Indonesia. Alasan utamanya adalah tim-tim Galatama mulai kesulitan dalam masalah pendanaan untuk operasional tim. Jika ditarik pada kondisi nasional ketika itu, Indonesia berada pada kondisi mulainya gejala krisis ekonomi, dan faktor-faktor negara mulai menguat lagi dalam persepakbolaan nasional, karena adanya persaingan gengsi antara tim Galatama dan tim perserikatan di Liga Indonesia I.<sup>127</sup> Tentu saja bagi Persib, keadaan ini tentu bisa dikatakan positif, karena posisi Pemkot Bandung mulai kembali menguat, sehingga keberadaan Persib terjamin lewat hibah APBD Pemkot meski memasuki gejala krisis ekonomi nasional. Pengaruh dari kondisi ini langsung terasa pada kompetisi Liga Indonesia I yang pertama kali diselenggarakan, dimana Persib mampu menjadi juara I.

---

<sup>125</sup> Yosef Hilarius Timu Pera, *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>126</sup> Pengusaha-pengusaha papan atas yang lahir di era Orde baru ini, kemudian berkontribusi kepada sepakbola nasional, dengan cara mendirikan tim-tim sepakbola mereka. Berepada pengusah yang membuat tim sepakbola hingga berada di level atas kompetisi sepakbola nasional adalah Bakrie Group, Salim Group, Yanita Group, atau BUMN seperti Semen Padang, Semen Gresik, Pupuk Kaltim Bontang, PT Psuri, dan sebagainya. *Ibid*, hlm. 104-105.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 106.

### 3.2.4 Persib di Era Reformasi

Tidak kondusifnya situasi di Indonesia akibat peristiwa Mei 1998, membuat Liga Indonesia ke IV dihentikan di tengah kompetisi. Kompetisi Liga Indonesia baru dilanjutkan pada edisi ke V, yaitu di musim kompetisi 1999/2000. Pasang surut prestasi Persib di era Reformasi ini juga mulai bergejolak seiring wacana atas profesionalisme tim sepakbola di Indonesia. Dalam kurun waktu di awal era Reformasi hingga muncul wacana profesionalisme ini, Persib masih diketuai oleh Walikota Bandung.<sup>128</sup>

Saat euforia reformasi, muncul wacana dikalangan pemerhati sepakbola di Indonesia, bahwa tuntutan transparansi terhadap jalannya pemerintahan termasuk pemerintah daerah. Hal ini memberi dorongan agar adanya perbaikan manajemen tim-tim sepakbola, terutama tim-tim eks-Liga Perserikatan, termasuk Persib di dalamnya. Seperti yang diketahui, hal ini dikarenakan adanya indikasi penggunaan uang APBD yang cukup besar untuk tim-tim sepakbola berlaga di kompetisi Liga Indonesia. Sosok kepala daerah yang menjadi ketua umum tim-tim sepakbola, termasuk Persib, membuat penggelontoran dana APBD untuk tim sepakbola masing-masing semakin mudah. Kesulitan yang mengarah pada tidak adanya kejelasan tersebut adalah sulitnya untuk mendapatkan laporan atas penggunaan APBD yang dihibahkan kepada tim-tim sepakbola tiap tahunnya.

---

<sup>128</sup> AA Tarmana menjabat Ketua Umum Persib pada periode 1998-2002. Sedangkan Dada Rosada menjadi Ketua Umum Persib pada tahun 2002-2009.

**Tabel 3.2**  
**Keterlibatan Para Pimpinan Daerah**  
**dalam Pembinaan Sepakbola di Indonesia setelah era Orde Baru (periode**  
**1999 – 2000-an)**

No	Tim Sepakbola	Ketua Umum	Alokasi Dana APBD
1	PSMS Medan	Walikota Medan, Abdillah	15 Milyar
2	Persib Bandung	Walikota Bandung, Dada Rosada	12 Milyar
3	Persija Jakarta	Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso	20 Milyar
4	PSIS Semarang	Walikota Semarang, Sukawi Sutarip	12 Milyar
5	PSM Makassar	Walikota Makassar, Ilham Arif S.	10 Milyar

*Sumber: Rosa Badrul Munir, "Terpilihnya Kembali Walikota Kediri H.A Maschut Untuk Periode 2004-2009 dan Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri", Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Depok, 2006.*

Desakan atas perubahan yang lebih baik atau profesionalisme tim-tim sepakbola di Indonesia, serta pengalihan alokasi dana APBD untuk sektor yang lebih membutuhkan. Hal ini direspon oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemuda Olahraga di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski pembahasan dilakukan oleh dua kementerian, tetapi peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dikarenakan terkait pada penggunaan APBD. Di tahun 2006, Mendagri saat itu Mardiyanto, mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 dan PP No 58 Tahun 2006, yang mengatur masalah penggunaan alokasi APBD.<sup>129</sup> Meski tidak tertulis langsung, tetapi dua keputusan ini sangat mengejutkan para insan sepakbola nasional.<sup>130</sup> Dikarenakan secara tak langsung, terhitung sejak tahun 2008, APBD tidak bisa digunakan untuk tim-tim sepakbola.

<sup>129</sup> Selama ini, APBD kepada tim-tim sepakbola daerah, alokasinya berasal dari hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga kelompok masyarakat, secara berkala tiap tahunnya. Lewat Permendagri No. 13 tahun 2006, tepatnya di pasal 44, ayat 1, tertulis, "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah." Inilah yang dianggap sebagai larangan pengalokasian APBD untuk tim-tim sepakbola di daerah.

<sup>130</sup> Haris Maulansyah, "Pusing Gara-gara Permendagri No. 13 Tahun 2006", diunduh dari <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=20919>, pada 8 April 2012, pukul 15.11 WIB.

Berjalannya waktu, belum semua tim sepakbola yang berlaga di kompetisi nasional mengikuti peraturan ini. Untuk memperkuat keputusan ini, Gamawan Fauzi, Mendagri pada Kabinet SBY jilid II, mengeluarkan peraturan yang baru dalam rangka merevisi peraturan sebelumnya. Permendagri No. 22 tahun 2011 dan Permendagri No. 32 tahun 2011, diterbitkan. Dengan terbitnya dua peraturan ini, maka otomatis terhitung sejak 1 Januari 2012, semua tim sepakbola yang berlaga di kompetisi nasional harus bisa mandiri dalam soal pendanaan dan lepas dari ketergantungan APBD. Larangan dalam dua Permendagri tersebut tercantum di Bagian IV nomor 23 dalam Permendagri No. 22 tahun 2011.

“Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga”;

Dan di Pasal 6 Ayat 4 dalam Permendagri No. 32 tahun 2011.

“Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.”

Bagi Persib, perubahan kepemilikan bisa dikatakan terjadi cukup cepat. Pada Juli 2009, Walikota Bandung yang baru terpilih kembali Dada Rosada mengadakan pertemuan dengan para elemen sepakbola Bandung di Pendopo Kota Bandung.<sup>131</sup> Isi dari pertemuan ini adalah membicarakan serta berdiskusi untuk menentukan langkah ke depan bagi Persib untuk menjadi tim sepakbola yang mandiri dan mampu lepas dari ketergantungan APBD. Hasil diskusi memutuskan

<sup>131</sup> Diunduh dari <http://persib.co.id/main/in/klub/informasi-klub>, pada 8 April 2012, pukul 16.03 WIB.

bahwa Persib secara legal formal, akan dipindahkan kepemilikannya dari milik Pemkot Bandung menjadi milik PT PBB (Persib Bandung Bermartabat).

Pada awal pembentukannya, banyak masyarakat Bandung dan Bobotoh ragu bahwa Persib bisa bertahan tanpa APBD.<sup>132</sup> Keraguan para pecinta Persib adalah mampukah konsorsium Persib menyediakan pendanaan bagi Persib dengan kuantitas yang banyak dan konstan. Sebagai perbandingan, dalam kurun 2003-2008, diperkirakan Persib mendapat total hibah dari APBD Kota Bandung sebanyak Rp. 100 miliar.<sup>133</sup> Tetapi setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, secara organisasi dan institusi, Persib mampu menjadi tim sepakbola yang betul-betul lepas dari ketergantungan APBD. Kemandirian Persib lewat PT PBB, diapresiasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai tim sepakbola yang mampu lepas dari APBD dan bebas dari korupsi.<sup>134</sup> Mandiriya persib belum berbanding lurus dengan prestasi karena masih belum bisa didapatkan meski sudah menjadi tim sepakbola profesional di Indonesia.

<sup>132</sup> Eka Noer Kristiyanto, "Persib Itu...", diunduh dari <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/03/14/persib-itu/>, pada 8 April 2012, pukul 16.04 WIB.

<sup>133</sup> Haryadi, "PERSIB: Aset atau Beban Publik?" <http://bigfound.org/artikel/9-umum/2-persib-aset-atau-beban-publik>, diunduh pada 24 Maret 2012, pukul 11.00 WIB.

<sup>134</sup> Menurut Staf Bidang Pencegahan KPK, Dian Patra, selain Persib, ada tiga klub sepakbola lainnya yang bersih dari pendanaan APBD, yaitu Semen Padang, Pelita Jaya, Arema Malang. Didi Purwadi, "KPK: Persib Klub Bersih APBD di Indonesia", diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/11/02/10/163529-kpk-persib-klub-bersih-apbd-di-indonesia>, pada 8 April 2012, pukul 16.05 WIB.

## **BAB 4**

### **POLITISASI PERSIB OLEH DADA ROSADA DENGAN MENJADIKAN PERSIB SEBAGAI MODAL SOSIAL PADA PEMILUKADA KOTA BANDUNG 2008**

Dada Rosada telah membangun hubungan dengan Persib sejak tahun 2003. Tidak hanya sekedar menjadi pengurus Persib, tapi Dada Rosada mampu membuat jaringan sosial yang baik dengan para Bobotoh. Di sinilah awal mula Dada Rosada membangun modal sosialnya di Persib, yaitu dengan dekat dengan para Bobotoh dan menjadi pengurus Persib sejak awal.

#### **4.1 Dada Rosada Membangun Modal Sosial di Persib**

Tanggapan atas kedekatan Dada Rosada dengan para Bobotoh dikatakan oleh tokoh Bobotoh itu sendiri. Hal tersebut dibenarkan oleh Heru Joko, selaku Ketua *Viking* bahwa perkenalannya dengan Dada Rosada sudah lama terbentuk, bahkan ketika Dada Rosada masih menjadi Sekda Pemkot Bandung, di sekitar tahun 2000.<sup>135</sup> Semenjak perkenalan itu Heru Joko menyatakan bahwa komunikasi antara dirinya dengan Dada Rosada terus berjalan. Dada Rosada dianggap sangat memperhatikan Persib meski posisinya ketika itu bukan sebagai Walikota Bandung. Perhatian kepada Persib yang dilakukan terutama adalah sebagai penyambung antara Bobotoh dengan Pengurus Persib saat itu. Dada Rosada sering berdiskusi dengan Heru Joko dan Bobotoh lainnya dan kemudian mengantarkan pendapat para Bobotoh kepada Pengurus Persib yang sedang bertugas. Kedekatan antara Dada Rosada dengan Heru Joko juga disampaikan oleh Heru Joko dalam wawancaranya dengan penulis.

" Ya dulu Persib kan, Ketua Umum nya Pak Dada. Terus stadionnya kecil (Stadion Siliwangi), mau buat baru, terus sering ngomong di koran, terus mengurus Persib, jadikan... gitu. Jadi Pak Dada itu dekat bukan sama saya saja, tapi dekat sama orang Bandung aja gitu, karena Persib, gara-gara Persib. "

---

<sup>135</sup> Pitoyo, *Op. Cit.*, hlm. 156.

Sebagian Bobotoh kemudian melihat Dada Rosada adalah sosok yang sangat baik atau pas untuk Persib. Hal ini terlihat ketika pelantikan Dada Rosada sebagai Walikota Bandung 2003-2008, pada 16 Oktober 2003 di Gedung DPRD Kota Bandung. Pelantikan tersebut tidak hanya dihadiri oleh para pejabat, anggota dewan, tokoh masyarakat, keluarga dan kerabat di seputaran Kota Bandung, tapi juga dihadiri oleh ratusan Bobotoh yang menunggu di luar Gedung DPRD Kota Bandung. Mereka menunggu dan menggunakan baju-baju beratribut Persib dan mengibarkan bendera Persib.<sup>136</sup>

Hubungan yang terjalin antara Dada Rosada dan Bobotoh adalah sebuah hubungan emosional sehingga terciptanya modal sosial. Yana Bool, Dirijen *Viking*, menyatakan bahwa hubungan emosional antara Dada Rosada dan Bobotoh sudah terbentuk karena kontribusi Dada Rosada terhadap Persib itu sendiri. Dada Rosada sering menghadiri berbagai acara yang diselenggarakan oleh *Viking*, dan selalu melibatkan Bobotoh dalam berbagai hal mengenai Persib, termasuk pembahasan pembangunan SUS (Stadion Utama Sepakbola) Gede Bage.<sup>137</sup>

Dada Rosada membangun modal sosialnya dengan kelompok suporter Persib, terutama dengan *Viking*. Hal selanjutnya yang coba dibahas adalah mengenai interkasi yang terjadi menjelang atau berlangsungnya Pemilukada Kota Bandung 2008, antara Dada Rosada dan para Bobotoh dan kelompok suporter Persib, juga dengan Pengurus Persib yang sedang menjabat ketika itu.

Di saat menjelang Pemilukada Kota Bandung 2008, Dada Rosada merupakan calon *incumbent*, sekaligus masih menjabat sebagai Ketua Umum Persib. Meski telah didukung oleh sekitar 8 Partai Politik, Dada Rosada tetap menggunakan modal sosial yang dimilikinya untuk meraih dukungan suara yang lebih banyak, salah satunya Persib. Penulis mencoba mencari adanya interaksi khusus antara Dada Rosada dengan Persib, baik dengan pengurus maupun dengan kelompok suporter. Heru Joko selaku Ketua *Viking*, menyatakan adanya komunikasi untuk mendukung Dada Rosada di Pemilukada Kota Bandung 2008. Heru Joko menyatakan bahwa bentuk komunikasi ini bukanlah seperti yang dibayangkan, yaitu bersifat tertutup dan ada uang-uang yang diberikan kepada

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm.130.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

Heru Joko. Komunikasi yang terjadi lebih ke arah yang sifatnya terbuka & santai karena Heru Joko merasa sudah biasa jika berdiskusi dengan Dada Rosada. Heru Joko mengatakan:

" Ada dan karena saya aslinya bukan politikus, ya saya kaya membantu saudara gitu, kaya kenal dekat gitu, gak kaya ngomong kontrak politik. Orang pada bilang ini kontrak politik, ini harus ada gini, harus ini ini ini, anak buah Heru harus dapat kerja gini gini, saya gak, saya gak lewat situ gak. Saya yang kenal hanya Pak Dada saja yang mencalonkan jadi Walikota gitu. "

Adanya interaksi antara Dada Rosada dan Heru Joko, tentu saja ditindak lanjuti oleh Heru Joko sebagai Ketua *Viking*. Heru Joko kemudian memberikan himbauan dan arahan kepada distrik-distrik *Viking* yang ada di Kota Bandung untuk mendukung dan memilih Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008. Menurutnya:

" Ya dulu Pak Dada janjinya hanya Stadion (mendirikan stadion baru untuk Persib, yaitu SUS Gede Bage-penulis) gitu. Ya saya mengerahkan, mengarahkan kepada distrik (di Kota Bandun-penulisg). Sempat ada kumpulan banyak gitu untuk memilih Pak Dada, ya saya dulu dan saya anggap itu bukan politik. Saya anggap itu membantu Persib. "

Yossi Irianto, Kadispenda Kota Bandung dari tahun 2004 hingga kini, yang juga adalah Manajer Persib pada tahun 2005-2007. Meski ketika pada Pemilukada Kota Bandung 2008, Yossi tidak lagi menjadi Manajer Persib, tetapi beliau menyatakan bahwa para pengurus mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Dada Rosada bagi Persib selaku Ketua Umum Persib. Pengurus Persib tidak perlu diberi komunikasi khusus oleh Pak Dada Rosada sebagai Ketua Umum Persib. Menurutnya Pengurus Persib sudah mengetahui kiprah Dada Rosada di Persib sejak lama.

" Sejak jaman Pak Ateng Wahyudi dulu, Pak Dada sudah jadi pengurus, sampai Pak Dada jadi Walikota dua periode. Apalagi ketika menjadi Walikota, beliau betul-betul berkontribusi positif bagi Persib dari awal. Makanya tidak salah jika Bobotoh sekarang cenderung memilih beliau. Jadi Pak Dada itu bukan sosok yang tiba-tiba untuk Persib. "

Perjalanan Dada Rosada di Persib yang panjang merupakan awal dari terbangunnya modal sosialnya di tim sepakbola asal Ibu Kota Jawa Barat. Dada

Rosada bukanlah sosok yang tiba-tiba ingin merebut hati para pendukung Persib. Para Pengurus pun tahu betul latar belakang Dada Rosada di Persib. Hal inilah yang membuat Dada Rosada mampu membangun modal sosialnya di Persib.

#### **4.2 Ketertarikan Aktor Politik Lain di Bandung terhadap Persib**

Persib secara institusi maupun sebagai kelompok suporter, tentunya sebuah segmen yang menarik untuk didekati. Logika dasarnya adalah, Persib menghasilkan sebuah kerumunan atau kelompok-kelompok yang jumlah anggotanya sangat banyak. Ketika ada kelompok yang mampu menghasilkan kerumunan orang dalam jumlah yang banyak, para politisi atau praktisi akan memperebutkan dukungan dari kerumunan atau kelompok tersebut. Sesuai dengan konteks tempat, Persib mampu menghasilkan kerumunan ini di Kota Bandung khususnya dan di Jawa Barat umumnya.

Lawan dari Dada Rosada ketika Pemilukada Kota Bandung 2008 adalah calon yang diusung oleh PKS dan calon dari jalur perseorangan. PKS yang mengusung Taufikurrahman - Abu Sauqi sebenarnya juga mencoba mendapatkan suara dari Persib, terutama dari kelompok suporternya. Hal ini disampaikan oleh Toharudin, Ketua Bapliu (Badan Pemenangan Pemilu) DPP PKS Kota Bandung, dengan mengatakan:

"Sebenarnya kalau kita tidak memanfaatkan Persib dalam tanda kutip pas Pemilukada kemarin juga tidak. Kita juga berusaha memanfaatkannya. Bahkan sebenarnya, dedengkot-dedengkot Bobotoh, cukup dekat dengan calon-calon kita. Hanya mungkin posisi bergaining itu masih kalah dengan Pak Dada, apalagi secara sejarah dan emosional. Jadi kita juga sudah berusaha untuk memakai ketika itu."

Ketertarikan PKS waktu itu dengan Persib memang tidak bisa dipungkiri. Persib jika bisa didekati atau dijalin komunikasi yang baik, bisa saja menghasilkan dukungan suara yang banyak bagi calon pasangan Walikota-Wakil Walikota dari PKS ketika itu. Toharudin juga tidak memungkiri bahwa Persib itu memiliki sebuah kekhususan di kota Bandung. Hal ini terkait dengan konteks sosial dan historis Bandung itu sendiri, sehingga Persib bisa begitu mengakar di masyarakat Kota Bandung. Hal inilah yang diungkapkan oleh Toharudin, mengapa PKS Kota Bandung waktu itu juga berusaha mendekati Persib, terutama

kelompok suporternya untuk mendapat dukungan dari mereka di Pemilukada Kota Bandung 2008.

"Kalau saya melihatnya sebagai sesuatu yang wajar sih. Kalau dalam politik, apa lagi menjelang pemilu atau Pemilukada, para kontestan, partai politik atau yang perseorangan yang maju, akan mencari simpul-simpul massa, akan mencari simpatisan sebanyak mungkin, akan mencari dukungan sebanyak mungkin. Semakin banyak kelompok mempunyai banyak orang atau anggota, semakin solid kelompok itu, maka akan semakin menarik bagi kontestan untuk mendekati kelompok-kelompok tersebut. Dan menurut saya itu berlaku umum, tidak hanya Persib sebenarnya. Hanya karena kalau di Kota Bandung, Persib mempunyai karakteristik yang besar dan sudah melekat di warga Kota Bandung, bobotoh yang begitu fanatik, maka orang-orang yang dekat dengan Persib, orang-orang yang mungkin mempunyai kontribusi bagi Persib, bisa jadi punya kedekatan emosional dengan para bobotoh dan warga Bandung."

Toharudin melihat bahwa ketika pada akhirnya PKS Kota Bandung tidak mampu meyakinkan kelompok-kelompok suporter Persib untuk mendukung calon Walikota-Wakil Walikota yang diusung PKS, itu adalah sebuah hal yang wajar.<sup>138</sup> Menurutnya sosok Dada Rosada yang merupakan calon incumbent dan waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Persib, merupakan alasan utamanya. Modal sosial Dada Rosada dari Persib terbentuk akibat faktor sosio historis yang tidak bisa dielakkan dan juga akhirnya memberikan ikatan emosional pada suporter Persib itu sendiri yang juga merupakan warga Kota Bandung, yang mempunyai hak pilih di Pemilukada Kota Bandung 2008.<sup>139</sup>

Ketertarikan akan dukungan dari Persib juga dikatakan oleh Indra Perwira, bakal calon independen Walikota Bandung di Pemilukada Kota Bandung 2008. Indra Perwira merupakan seorang akademisi, yang menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, yang kemudian mencoba terjun ke politik praktis di Pemilukada Kota Bandung 2008. Meski sebenarnya Indra Perwira tidak berlatar belakang sepakbola, melainkan berolahraga Karate, tetap saja Persib dari kelompok suporternya bisa saja menarik suara. Indra Perwira

<sup>138</sup> Usaha untuk mendapat dukungan dari suporter Persib untuk mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung dari PKS, diberitakan oleh Syamsul Bachri, *Viking Meminta Dada Merealisasikan SOR*, Harian Pikiran rakyat, edisi 10 Agustus 2008.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Toharudin, Ketua Badan Pemenanga Pemilu (Bapilu) DPP PKS Kota Bandung. Wawancara dilakukan pada 17 Maret 2012, pukul 12:58 WIB, bertempat di Kantor DPD PKS Kota Bandung, Jl. Jendral Katamso No. 19 Bandung.

membuat komunikasi awal dengan suporter Persib adalah dengan mengeluarkan komentar atau pendapat ketika bertemu dengan kelompok suporter Persib terkait pernyataannya yang kontroversial tentang Persib itu sendiri. Menurut Indra

"Karena saya itu dulu pengurus FORKI, dan saya pernah buat statement di koran dan di televisi. Saya berkata, bagaimana Pemkot, karena saya FORKI, telah menyumbang 9 emas, tapi tidak ada perhatiannya. Persib tidak pernah ada satu pun emas di Asean games nya, tapi terus dibiayai. Ini kan tidak fair, padahal kan yang membanggakan Kota Bandung kan banyak, ada tenis meja, ada bulutangkis, segala macam. Rupanya dicatatlah oleh mereka (kelompok bobotoh-penulis), sehingga saya dipanggil untuk bertemu."

Adanya kontroversi ini, menyebabkan adanya komunikasi awal dengan para suporter Persib yang ingin menanyakan pertanggung jawaban atas komentar tersebut dan langkah-langkah serta kebijakan terhadap Persib jika nantinya terpilih menjadi Walikota Bandung. Indra Perwira pun langsung memberikan penjelasan kepada suporter Persib. Di saat yang sama, beliau pun memberikan visi misinya di depan beberapa aktor-aktor utama suporter Persib tentang bagaimana nantinya Persib jika dirinya mampu terpilih menjadi walikota Bandung.

Ketertarikan kedua pesaing Dada Rosada di Pemilukada Kota Bandung 2008, tidak dilihat sebagai sebuah kepastian. Benang merah dari informasi yang diberikan oleh dua narasumber ini adalah, ternyata sebagai sebuah kelompok, organisasi yang dimiliki oleh kelompok suporter Persib, tidak bisa diandalkan atau diharapkan mampu mengikuti instruksi dari Ketua kelompok sepenuhnya. Indra Perwira pernah mencoba mendapat jaminan atas dukungan dari salah satu kelompok Persib. Beliau meminta jaminan mendapat 10.000 suara dari kelompok suporter Persib tersebut, kepada Ketuanya. Tapi jawaban yang di dapat oleh Indra Perwira adalah jawaban ketidak sanggupannya. Indra Perwira mengatakan:

" Saya bertanya kepada salah satu kelompok suporter Persib, apakah sanggup memberikan jaminan dukungan bagi saya 10.000 suara? tetapi mereka bilang tidak sanggup. Jadi kembali lagi, buat saya Persib itu tidak bisa mengontrol massanya, dan hanya bisa dikontrol kalau ada events sepakbola atau perbandingan. Tapi kalau untuk mobilisasi politik agak sulit. Yang bisa dikontrol ya elit-elitnya saja, itu kan hanya beberapa persen aja ."

Melihat fenomena tidak solidnya kelompok suporter Persib untuk mengikuti instruksi dari elit-elit atau ketua-ketua kelompok suporter Persib, tidak hanya dirasakan oleh Indra Perwira dari jalur perseorangan. Toharudin selaku Ketua Bapilu DPP PKS Kota Bandung juga menyatakan bahwa kelompok suporter Persib memang besar dan banyak massanya, tetapi ketika ada perintah secara garis hierarki oleh para ketuanya, belum tentu dijalankan oleh seluruh anggotanya.

" Terkait dengan komunitas dan kelompok pendukung Persib, kita akan mengukur dari soliditas kelompok tersebut dalam artian ketika ada kebijakan dalam kelompok tersebut dan kelompok itu akan sepenuhnya ikut, itu akan menjadi berbeda. Masalahnya kalau di komunitas bobotoh Persib, kalau dari pengamatan saya selama ini, itu tidak kemudian menjadi satu. Misalkan elit-elit di kelompok bobotoh itu kemudian menetapkan pilihannya pada kelompok-kelompok tertentu dalam artian di pilihan politik, belum tentu kemudian mengikuti instruksi tersebut. Hal ini karena belum terkelola sedemikian rupa hingga menjadi kelompok yg solid."

Toharudin tetapi tetap memberi catatan atas ketidaksolidan ini. Hal ini paling berlaku dalam masalah preferensi politik, tetapi tidak ketika ada keputusan yang berkaitan dengan teknis atau masalah ketika kelompok-kelompok tersebut ingin menonton pertandingan Persib. Berkaitan dengan masalah menonton Persib, suara dari ketua kelompok-kelompok Persib bisa dikatakan dijalankan oleh anggota-anggotanya. Dalam preferensi politik, bisa dikatakan ada sebuah kesolidan para kelompok suporter Persib, atau pun yang hanya sekedar menjadi suporter Persib (Bobotoh), untuk mendukung Dada Rosada. Tak dipungkiri oleh Toharudin, bahwa hal ini bisa terjadi karena keterkaitan Dada Rosada dengan Persib yang dianggap sudah sangat dekat secara sosio historis, sebagai Ketua Umum Persib semenjak 2002. Toharudin berpendapat bahwa sebenarnya Persib itu adalah potensi untuk dijadikan dukungan dalam Pemilu, tetapi dengan syarat, para politisi dan partai politik yang ingin mendekati Persib, baik secara institusi maupun kelompok suporter, harus telah berkontribusi positif terhadap Persib itu sendiri. Hal ini agar tidak terlihat sekedar pemanfaatan Persib menjelang Pemilu. PKS Kota Bandung, menurut Toharudin akan terus menjalin hubungan dengan kelompok suporter Persib dan diharapkan dari jaringan

sosial ini, mampu menjadi sebuah modal sosial potensial bagi PKS menghadapi Pemilu pada berikutnya di Kota Bandung maupun Jawa Barat.<sup>140</sup>

### **4.3 Faktor-faktor Kemenangan Dada Rosada pada Pemilu Kota Bandung 2008**

Pada sub-bab ini, penulis mencoba melihat kemenangan Dada Rosada dan Pasangannya Ayi Vivananda pada Pemilu Kota Bandung 2008. Analisis yang penulis coba kemukakan lebih melihat sumber-sumber kekuatan yang dimiliki oleh Dada Rosada untuk menarik suara pemilih di Kota Bandung, walaupun tanpa mengesampingkan peran pasangannya, Ayi Vivananda. Jika mencoba melihat Persib dalam kemenangan Dada Rosada, berarti juga harus melihat faktor-faktor kemenangan lainnya selain Persib. Lewat berbagai sumber data dan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis ketika melakukan penelitian dan pencarian data, bahwa ternyata memang Persib adalah salah satu modal sosial Dada Rosada dalam Pemilu Kota Bandung 2008. Dari beberapa sumber data dan narasumber, memang ditemukan bahwa ada beberapa faktor lain selain Persib, yang mampu membawa Dada Rosada menjadi pemimpin eksekutif tertinggi di Kota Bandung. Oleh karena itu mengapa pada penjelasan pertama penulis mencoba menjabarkan, faktor-faktor apa saja yang mampu memenangkan Dada Rosada. Pada bagian selanjutnya Penulis mencoba melihat bagaimana berbagai faktor tersebut, seperti peran Dada Rosada ketika itu sebagai Ketua Umum Persib, menjadikan Persib sebagai modal sosialnya, yang kemudian dipolitikasi pada saat kampanye.

Kemenangan Dada Rosada yang mampu meraih suara pemilih di Kota Bandung hampir 65 % membuktikan bahwa beliau merupakan sosok yang sudah dikenal luas masyarakat Kota Bandung. Hal ini disampaikan oleh Denny JA, Ketua Lingkaran Survei Indonesia, bahwa Dada Rosada memang sosok yang sudah dikenal oleh masyarakat Bandung, dan kurang dikenalnya lawan-lawan dari

---

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Toharudin, Ketua Badan Pemenangans Pemilu (Bapilu) DPP PKS Kota Bandung. Wawancara dilakukan pada 17 Maret 2012, pukul 12:58 WIB, bertempat di Kantor DPD PKS Kota Bandung, Jl. Jendral Katamsa No. 19 Bandung.

calon Dada Rosada ketika itu.<sup>141</sup> Tanggapan positif lainnya atas kemenangan Dada Rosada, disampaikan oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono, sebagai pakar pemerintahan IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri). Menurut beliau, kemenangan Dada menunjukkan bahwa masyarakat Bandung menilai Dada Rosada sebagai *incumbent*, mampu menjalankan pemerintahan Kota Bandung di periode sebelumnya dengan baik. Ditambahkan, jika Dada Rosada dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai Walikota Bandung 2003-2008, maka masyarakat Bandung tidak akan memenangkan Dada Rosada ketika itu.<sup>142</sup> Selama periode pertama Dada Rosada menjabat Walikota Bandung, ada beberapa acara penting berskala internasional serta pembangunan infrastruktur yang dianggap sebagai mega proyek yang mampu diselesaikan. Di tahun 2005, Kota Bandung sukses menyelenggarakan Peringatan 50 tahun KAA (Konferensi Asia Afrika) yang dihadiri oleh banyak pemimpin serta perwakilan dari negara-negara sahabat. Sementara itu, beberapa infrastruktur yang berskala besar juga berhasil diselesaikan oleh Pemkot Bandung di bawah pimpinan Dada Rosada, yaitu *Flyover* Pasupati, Tol Cipularang serta perluasan Bandara Husein Sastranegara.<sup>143</sup>

Kemenangan Dada Rosada ini tidak serta merta bernuansa positif seperti yang sudah dijabarkan pada paragraf berikutnya. Yayasan BIGS (*Bandung Institute of Governance Studies*) Foundation di *website* resminya, menulis berita tentang analisis kemenangan Dada Rosada sebagai sebuah *pork barrel*. Yang dimaksud dengan *pork barrel* adalah penggunaan kekuasaan sebagai pejabat publik dengan cara menggunakan anggaran pembelanjaan untuk melebarkan serta memperbanyak pemilih yang akan memilih pejabat publik tersebut menjelang dan saat pemilihan umum atau daerah.<sup>144</sup> Menurut BIGS Foundation, pada anggaran Pemkot Bandung tahun 2008 atau bertepatan dengan akan diselenggarakan Pemilukada Kota Bandung 2008, dari total anggaran hibah Pemkot Bandung

<sup>141</sup> Berita Indonesia, "Kemenangan Dada, Kemenangan Bandung", <http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/kemenangan-dada-kemenangan-bandung>, diunduh pada 24 Maret 2012, pukul 10.31 WIB.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Diana Evans, "Policy and Pork: The Use of Pork Barrel Projects to Build Policy Coalitions in the House of Representative", dalam *American Journal of Political Science*, Vol 38, No. 4, 1994, hlm. 894 - 917.

sebesar Rp. 217 miliar, tercatat 53,78% nya atau sebesar Rp. 116,59 miliar, sangat terindikasi sebagai *pork barrel* bagi Dada Rosada.<sup>145</sup>

**Tabel 4.1**  
**Anggaran Hibah Pemkot Bandung yang Diduga Kuat Terindikasi *Pork Barrel* Dada Rosada**

No	Hibah Terindikasi <i>Pork Barrel</i>	Jumlah Anggaran (miliar)
1	Bantuan Khusus Persib	Rp 29,5
2	Bantuan Khusus Walikota Bidang Kemakmuran	Rp 22,12
3	Bantuan Khusus Walikota Bidang Pendidikan	Rp 43,48

Sumber: BIGS Foundation

Dalam rilis tersebut juga diutarakan apa alasan dari anggaran-anggaran hibah tersebut diindikasikan sebagai *pork barrel* dari Dada Rosada untuk memenangkan Pemilukada Kota Bandung 2008. Ada empat alasan utama atas hal tersebut yang diutarakan oleh BIGS Foundation.

Pertama, *jelas politik pork barrel ini merupakan upaya* menempatkan kepentingan politik pribadi dan golongan diatas kepentingan publik. Manfaat yang diperoleh sebagian konstituen dan tentu saja manfaat yang didapat para politisi diperoleh dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Kita tahu bahwa dana APBD itu diperoleh dari pajak dan retribusi yang dibayarkan warga.

Kedua, ini mencerminkan tata kelola pemerintahan –lebih spesifik keuangan daerah—yang tidak transparan dan akuntabel. Sangat aneh belanja hibah puluhan milyar ini tidak disertai dengan laporan kegiatan dan keuangan yang jelas. Anggota DPRD secara perorangan, atau fraksi atau DPRD secara kelembagaan tidak menerima dan tidak meminta laporan keuangan dan kegiatan Bawaku Cerdas, Bawaku Sehat dan Bawaku Makmur.

Ketiga, pengelolaan dana hibah untuk politik *pork barrel* ini cenderung tidak efektif dan efisien. Beberapa penerima bantuan Bawaku Makmur misalnya, tidak menggunakan uang itu untuk mengembangkan usaha. Malah mereka

<sup>145</sup> Dedi Haryadi, "Politik Barrel Dada Rosada", <http://www.bigsfound.org/artikel/9-umum/31-politik-pork-barrel-dada-rosada>, diunduh pada 24 Maret 2012, pukul 17.34 WIB.

menganggap ini sebagai uang “pamere” dari walikota. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diamanatkan oleh UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Keempat, dilihat dari sisi ini, sebenarnya persaingan pilwalkot yang lalu sangat tidak adil. Pasangan Taufikurrahman-Abu Syauqi dan Hudaya-Nahadi sebenarnya dirugikan. Lawan politiknya telah menggunakan belanja publik untuk meraih dukungan politik yang lebih luas dari publik. Semestinya ini menjadi agenda Badan Pengawas Pemilu ke depan untuk memonitor praktek politik pork barrel dalam pemilihan kepala daerah. <sup>146</sup>

Adanya tiga calon pasangan yang bertarung di Pemilukada 2008, membuat Dada Rosada tidak perlu bersusah payah untuk memenangi perubutan kursi Bandung 1 ini. Ada kemungkinan bila tidak adanya calon independen, di mana Dada Rosada akan bersaing dengan calon dari PKS, diperkirakan perolehan suaranya tidak akan menang dengan selisih jauh. Kejadian ini seperti pertarungan pada Pemilukada DKI Jakarta, di mana pasangan Adang Daradjatun - Dani Anwar yang hanya didukung PKS, kalah tidak terlalu jauh oleh pasangan Fauzi Bowo - Prijanto yang didukung oleh banyak partai politik.<sup>147</sup> Analisis atas kemenangan Dada Rosada ini diberikan oleh Indra Perwira, yang merupakan Bakal Calon Walikota Bandung dari jalur perseorangan. Menurut Indra Perwira, masuknya calon independen, sebenarnya atas desakan dirinya kepada KPUD Kota Bandung. Dengan masuknya calon independen, suara PKS akan pecah, karena menurutnya, banyak kader PKS yang menjadi relawan bagi dirinya untuk mencalonkan Walikota Bandung. Tindakan ini adalah bentuk sakit hati Indra Perwira karena gagal menjadi calon Walikota Bandung dari PKS hanya karena alasan kedekatan almamater ITB antara calonnya ketika itu, Taufikurrahman, dengan petinggi di DPD PKS Kota Bandung.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> Fauzi Bowo dan pasangannya, Prijanto didukung oleh kurang lebih 20 partai politik, menang dengan memperoleh suara 57,87 % suara. Sementara itu lawannya, Adang - Dani memperoleh suara yang tidak terlalu jauh, yaitu 42,13% dari total suara sah, padahal pasangan ini hanya didukung oleh satu partai politik, yaitu PKS. Diolah dari berbagai sumber.

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Indra Perwira, Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang juga mantan Bakal Calon Walikota Bandung 2008 dari jalur independen, pada 5 April 2012, pukul 10:3 WIB, bertempat di kediaman Indra Perwiran, Jl. Guntursari Wetan I No. 30, Buah Batu, Bandung.

Selaku Ketua tim sukses non-partai di kubu Dada Rosada, Ishak Soemantri, mengatakan bahwa kemenangan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meski Pasangan Dada-Ayi didukung oleh banyak partai politik, tapi menurutnya, koordinasi atau perintah dari partai tidak bisa terlaksana dengan baik hingga ke akar rumput.<sup>149</sup> Suara bagi Dada Rosada harus coba digarap lewat modal sosial yang dimilikinya selain dari partai politik pendukungnya. Dada Rosada dikatakan memang bukan hanya sebagai Ketua Umum Persib ketika itu, tetapi mempunyai berbagai modal sosial lainnya. Dada Rosada memang aktif diberbagai organisasi sosial lainnya sehingga juga sudah memupuk modal sosial diberbagai segmen di Kota Bandung. Ishak Soemantri mengatakan:

" Kalau Pak Dada dari awal sudah di setting untuk dari berbagai segmen, dari segmen ulama, segmen olahraga dan Persib, segmen perempuan, segmen pegawai. Nah kantong-kantong masyarakat ini yang bergerak, dari RT/RW, PKK, Posyandu, Pengajian-pengajian, Ustad-ustad, santri-santri, tokoh-tokoh agama, itu penting karena bergema terus-terusan di mesjid. Itu yang harus dipegang dan itu juga yang dipegang oleh Pak Dada dulu, sama dengan kelompok-kelompok PKK. Dulu itu kan Ibu Dada Ketua PKK Bandung. Kalau mahasiswa itu kita lepas karena mereka itu suara mengambang. Juga geng motor itu kita rangkul di Bandung. Sebenarnya geng motor itu kan positif ya. Cuma itu dia tidak ada pembinanya, karena geng-geng motor itu tidak terikat dengan IMMI (Ikatan Motor Mobil Indonesia-penulis). Ini kan karena IMMI terlalu elitis, hanya motor-motor besar yang mahal, tidak pakai motor-motor yang butut. Nah itu dia yang kita garap, geng-geng motor, Harley Davidson juga tapi, jadi semua kalangan. "

Adanya penggarapan pemilih yang dilakukan oleh tim sukses Dada Rosada hingga tingkat RT/RW diutarakan oleh Ishak sebagai sebuah pertempuran yang sebenarnya. Pertempuran perebutan suara ini, harus dilakukan karena menurutnya, lawan Dada Rosada dari PKS sangat efisien dalam menggarap suara di akar rumput. Efisiensi PKS ini karena mereka mendatangkan massa yang terkesan sangat banyak padahal berasal dari luar Bandung, untuk mempengaruhi suara dengan cara *door to door*. Gerakan dari PKS inilah yang harus dipotong oleh tim sukses non-partai yang diketuai oleh Ishak Soemantri.

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Ishak Soemantri, Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, juga sebagai mantan Ketua Tim Sukses Non-Partai Pasangan Dada Rosada - Ayi Vivananda, pada 25 April 2012, pukul 12.34 WIB, bertempat di Gedung IX lantai 6, Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbeuluit Bandung.

" Yah jadi kami lebih menggarap suara suara dari tokoh-tokh masyarakat, ustad-ustad, jadi pertempuran sebenarnya itu lawan PKS. Karena lawan PKS itu kan head to head di malam hari. Artinya gini, PKS itu kan pandai, efisien sekali mereka. Karena mereka bisa mengerahkan massa dengan sangat mobile. Mengarahkan massa dari mana-mana seolah banyak, padahal dari luar Bandung. Itu yang saya potong malam hari. Jadi begitu masuk ke kantong-kantong, kita potong, karena itulah yang mempengaruhi pemilih. Nah kita bendung itu di RT/RW. Jadi ada yang masuk ke situ, lewat RT/RW kita usir. Karena mereka itu bawa pesan ke rumah-rumah itu. Mereka sistem door to door tapi bukan dari Bandung. "

Praktik ini menjadi terkesan sangat negatif, lebih dikarenakan transparansi atas hibah-hibah ini sulit untuk didapatkan. Hibah ataupun anggaran yang sudah lama diberikan setiap tahunnya kepada Persib, juga sulit didapatkan laporan pertanggungjawabannya.

#### **4.4 Politisasi Persib oleh Dada Rosada**

Dada Rosada, memiliki sejarah keorganisasian masyarakat yang panjang dan bisa juga dikatakan sangat banyak.<sup>150</sup> Karir yang dibangun Dada Rosada di Persib memang telah lama. Mampu menjadi Ketua Umum Persib, sehingga bagi para Bobotoh tidak merasa asing lagi dengan Dada Rosada terutama di Kota Bandung. Meski telah aktif diberbagai organisasi politik maupun masyarakat seperti Golkar, Kosgoro, Angkatan Muda Silwangi, SOKSI, KNPI dan beberapa lainnya,<sup>151</sup> Dada Rosada tetap berkarir di Persib dan membangun relasi dengan para tokoh-tokoh Persib. Selain hal tersebut, Dada Rosada juga lebih menonjolkan posisinya sebagai Ketua Umum Persib pada kampanyenya, yang akan dijabarkan pada bagian selanjutnya. Hal ini menandakan Persib merupakan

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Ishak Soemantri, Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, juga sebagai mantan Ketua Tim Sukses Non-Partai Pasangan Dada Rosada - Ayi Vivananda, pada 25 April 2012, pukul 12.34 WIB, bertempat di Gedung IX lantai 6, Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbeuluit Bandung.

<sup>151</sup> Dari Daftar Riwayat Dada Rosada yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, pada 17 April 2012.

variabel yang tidak bisa begitu saja dilupakan di antara variabel-variabel lainnya dalam dinamika di Kota Bandung. Implementasinya adalah penggunaan Persib sebagai salah satu modal sosial di antara modal sosial lainnya oleh Dada Rosada.

Disebutkan sebelumnya, Dada Rosada sebagai Ketua Umum Persib ketika itu, tidak hanya berkomunikasi dengan manajemen atau pengurus Persib lainnya. Dada Rosada juga melakukan komunikasi serta membuat jaringan sosial dengan para Bobotoh. Jaringan sosial yang telah lama dengan para Bobotoh, membuat jaringan sosial ini berubah menjadi sebuah modal sosial. Dada Rosada ketika itu dan kini, mempunyai hubungan dekat, terutama dengan kelompok suporter Persib terbesar, yaitu *Viking Persib Fans Club*.<sup>152</sup>

Melihat di sisi yang lainnya, memang tidak semua bobotoh di Kota Bandung tergabung dalam *Viking Persib Fans Club*, tapi keterikatan emosional antara bobotoh itu sendiri dengan Ketua Umum Persib, dalam hal ini Dada Rosada di Kota Bandung sudah sangat mengikat. Yossi Irianto mengatakan bahwa.

" Tentu saja posisi Pak Dada sebagai Ketua Umum Persib ketika itu, jelas berimplikasi terhadap kontribusi suara politiknya. Karena sebagai Ketua Umum Persib itu kan menjadi sebuah fenomena yang mengakar di antara Bobotoh dengan simpul-simpul yang di atasnya. Tapi yang saya tahu, sosok Pak Dada selaku Walikota, selalu memberikan fasilitas terhadap berdirinya PT. PBB sehingga Persib sekarang bisa mandiri dan pada saat itu Persib sedang bagus-bagusnya karena ada Bekamenga, sehingga sosok Pak Dada tampil juga menjadi figur yang memang fundamental bagi Persib. Dan ini jelas berpengaruh pada raihan suara. Karena kalau membicarakan Bobotoh, inikan mayoritas pemuda jadi tingkat pemilih pemula, jadi itu kan rata-rata masuk pada tingkat pemilih aktif. "

Tim sukses dari pasangan Dada Rosada-Ayi Vivananda, menyadari bahwa Persib merupakan salah satu modal sosial yang baik dan besar yang dimiliki oleh Dada Rosada. Kelanjutan atas keuntungan dan kesadaran ini, selain dengan komunikasi khusus kepada Ketua Umum *Viking Persib Fans Club*, untuk memobilisasi massa, tetapi juga harus ada realisasi secara simbolik pada atribut kampanye Dada Rosada, maupun yang memuat foto berpasangan dengan Ayi

---

<sup>152</sup> Setelah kini Persib tidak lagi milik Pemkot dan Walikota bukanlah Ketua Umum Persib, Dada Rosada tetap mempunyai posisi strategis di antara kelompok suporter Persib, yaitu sebagai Ketua Dewan Pembina *Viking*.

Vivananda. Selain itu Dada Rosada juga sering menonton pertandingan Persib, di stadion Siliwangi. Dada Rosada sering meluangkan waktunya untuk menonton pertandingan Persib, terutama yang diselenggarakan di Bandung. Adanya kesempatan Dada Rosada di Stadion menonton Persib, membuat tim sukses lebih mudah untuk mengatur hubungan Dada Rosada dengan Bobotoh yang hadir di stadion maupun yang menonton lewat televisi.<sup>153</sup> Penjaringan suara Bobotoh yang ada di Kota Bandung untuk memilih Dada Rosada juga disadari bahwa jumlah Bobotoh itu sangat banyak meski tidak terorganisir. Jumlah Bobotoh di Jawa Bagian Barat ada sekitar 5,7 jiwa, sementara Bobotoh di Kota Bandung ada sekitar 506.774 jiwa<sup>154</sup>, dan kemudian Dada Rosada mampu menang dengan meraih 667.067 suara.

Realisasi atas pemikiran lebih menonjolkan Dada Rosada dengan Persib dan Bobotoh, kemudian dibuat dalam atribut kampanye Dada Rosada bersama pasangannya Ayi Vivananda. Tetapi dari gambar-gambar yang ada, dapat dilihat meski sedang bersama Ayi Vivananda, tim sukses tidak menyematkan atribut Persib pada Ayi, hanya kepada Dada Rosada seorang. Ishak Soemantri mengatakan bahwa hal ini merupakan sebuah keharusan karena memang yang kuat dengan Persib adalah Dada Rosada, bukan ayi Vivananda. Simbol Persib dalam atribut kampanye Dada Rosada juga sekaligus memberikan petunjuk bagi Bobotoh bahwa hanya Dada Rosada yang terikat dengan Persib. Untuk Bobotoh, calon-calon lawannya adalah orang yang asing bagi Persib.

" Tanpa intervensi pun para Bobotoh sudah terikat dengan Pak Dada sebagai Ketua Umum Persib. Memang ada penggunaan simbol-simbol Persib dalam atribut kampanyenya. Yang lebih mendalam adalah bukan saat kampanye tetapi juga pada saat Persib bertanding di Bandung. Di situ

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Ishak Soemantri, Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, juga sebagai mantan Ketua Tim Sukses Non-Partai Pasangan Dada Rosada - Ayi Vivananda, pada 25 April 2012, pukul 12.34 WIB, bertempat di Gedung IX lantai 6, Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbeuluit Bandung.

<sup>154</sup> Jumlah-jumlah Bobotoh tersebut dapat dilihat di Rivan Mandala Putra, "Bobotoh di Jakarta Lebih Banyak Dibanding Surabaya", diunduh dari <http://m.inilah.com/read/detail/1840253/bobotoh-di-jakarta-lebih-banyak-dibanding-surabaya>, pada 24 Maret 2012, pukul 5.38 WIB. Jika digabungkan dengan data dari KPUD Kota Bandung, Dada Rosada memperoleh suara sebanyak 667.026 suara. Memang sangat signifikan jumlah Bobotoh di Kota Bandung dengan jumlah suara yang diperoleh Dada Rosada, tetapi harus ada penelitian lebih lanjut untuk melihat dan mencari korelasinya lebih mendalam.

Pak Dada harus hadir, ya selaku Ketua Umum Persib, juga sebagai calon Walikota Bandung 2008-2013. Jadi sebenarnya kerja keras saya dan tim sukses non-parpol itu lebih menggarap masyarakat yang di bawah. Kita tidak perlu menggarap para Bobotoh atau kelompok suporter Persib, karena buat kita ya mereka sudah pasti milih Pak Dada. Jadi dengan latar belakang Pak Dada di Persib sejak lama, tidak ada pilihan lain bagi Bobotoh selain memilih Pak Dada. Buat Bobotoh itu yang dari PKS dan independen itu asing. "

Selain dalam atribut kampanyenya yang terdokumentasi secara visual, beberapa berita cetak maupun elektronik, mendokumentasikan kampanye Dada Rosada yang menggunakan atau membawa Persib secara verbal. Pada hari pertama kampanye Pasangan Dada - Ayi pada Kamis (24/7/2008), di Lapangan Tegalega, salah satu Kyai yang menjadi juru kampanye, mengatakan kepada para pendukung pasangan ini. Kyai tersebut dalam orasi kampanyenya mengatakan, "*Kalau pendukung Persib tidak dukung Dada Rosada, kwalat hukumnya*".<sup>155</sup>

Pemberitaan lainnya terkait dengan adanya Dada Rosada terkait kapasitasnya sebagai Ketua Umum Persib adalah ketika dilaksanakannya nonton bareng pertandingan final Piala Eropa 2008, pada 28 Juni 2008. Pada acara tersebut Dada Rosada mengundang sekitar 55.000 anggota *Viking*, untuk nonton bareng. Hal ini sempat diawasi oleh Panwaslu Kota Bandung karena Dada Rosada dianggap mengadakan acara dengan massa yang sangat banyak dan sangat besar terdapat kemungkinan pelanggaran atas pencurian *start* kampanye Pemilukada Kota Bandung 2008, yang baru dimulai pada 23 Juli 2008.<sup>156</sup> Harian Pikiran Rakyat juga memberitakan mengenai simbol-simbol Persib dalam atribut kampanye Dada Rosada. Dalam beritanya, dimuat bahwa memang terlihat bahwa dalam beberapa atribut kampanye Dada Rosada, ada simbol-simbol Persib di dalamnya. Hal ini kemudian langsung dikonfirmasi oleh Dada Rosada sendiri

<sup>155</sup> Andri Haryanto, "Bobotoh Harus Dukung Dada - Ayi Agar Tidak Kualat", <http://bandung.detik.com/read/2008/07/24/152156/977278/486/tv/index.html>, diunduh pada 24 Maret 2012, pukul 10.30 WIB.

<sup>156</sup> Adi Supriadi, "Dianggap Melanggar, Dada Rosada Ditegur Panwaslu Kota Bandung", <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20080721180725>, diunduh pada 24 Maret 2012, pukul 10.35 WIB.

sebagai hal yang wajar karena di saat itu Dada Rosada adalah Ketua Umum Persib.<sup>157</sup>

Posisinya sebagai Ketua Umum Persib ketika itu memang sebagai konsekuensi sejarah serta budaya persepakbolaan Indonesia, termasuk di Bandung, di mana Walikota Bandung merupakan Ketua Umum Persib. Toharudin, Ketua Bapilu DPD PKS Kota Bandung, menyatakan bahwa posisi Dada Rosada yang ketika itu menjadi Ketua Umum Persib, merupakan sebuah keuntungan sendiri dari Dada Rosada untuk mengikat secara emosional bagi bobotoh di Kota Bandung. Terkait penggunaan simbol-simbol Persib pada atribut-atribut kampanye Dada Rosada ini, Toharudin memberikan mengatakan:

" Kalau pemakaian simbol Persib, itu kan tergantung dari lembaga yang bersangkutan. Kalau kita lihat secara kelembagaan, dan kemudian Persib akhirnya akan memutuskan pada pilihan tertentu, toh tidak ada aturan yang melarang itu. Kemudian ketika melihat perjalanan sebelumnya, Dada Rosada mau tidak mau memang ada ikatan sejarah yang cukup kuat dengan Persib, dan ketika itu juga sedang menjadi Ketua Umum Persib. Hal ini harus diakui sebagai realitas bahwa ini adalah potensi yang memang dimiliki oleh Dada Rosada saat itu, ya itu adalah realitas politis yang ada saat itu dan menjadi modal sosialnya saat itu. Mungkin kalau pun itu dimiliki oleh calon yang lain, akan melakukan hal yang sama. Sama dengan institusi dengan kelompok yang lain, misalkan paguyuban pedagang kaki lima menyatakan deklarasi mendukung si A, saya rasa hal yang wajar. Hanya kemudian bila kelompok itu memang secara aturan boleh atau tidak boleh berpartisipasi, untuk kasus kelompok sepakbola ini saya belum tau, dan saya rasa memang tidak ada. "

Melihat simbol-simbol Persib pada atribut-atribut kampanye Dada Rosada, M. Farhan selaku Direktur Marketing PT. PBB, mengatakan ini adalah sebuah hal yang wajar karena memang kedekatan Dada Rosada dan Persib di mana bahwa Persib ketika itu dimiliki oleh Pemkot Bandung dan Dada Rosada menjadi Ketua Umum Persib.<sup>158</sup> Persib sebagai modal sosial Dada Rosada memang membawa

<sup>157</sup> Syamsul Bachri, *Beragam Sikap Balon Tanggapi Reklame*, Harian Pikiran Rakyat, edisi 6 Juli 2008.

<sup>158</sup> M Farhan mengistilahkannya Persib sebagai modal sosial dalam kemenangan Dada Rosada di Pemilu Kota Bandung 2008 sebagai "*the factor, but not the only one*". Hasil wawancara dengan M. Farhan, Direktur Marketing PT. PBB (Persib Bandung Bermartabat), pada 21 Maret 2012, pukul 16:11 WIB, bertempat di Starbucks Coffe Kemang (Depan Kem-Chick Kemang), Jakarta.

beliau menjadi Walikota Bandung untuk periode kedua kalinya, tetapi keduanya juga sepakat bahwa "*Persib is the factor but not the only factor*".<sup>159</sup>

Penggunaan simbol Persib untuk menggerakkan Persib sebagai modal sosial Dada Rosada, di Pemilukada Kota Bandung 2008, juga diutarakan oleh Tisna Sanjaya, Budayawan Sunda. Sejatinya jika melihat ketika itu Persib milik Pemkot Bandung, dan di Ketuai oleh Dada Rosada, secara hukum memang tidak ada peraturan yang melarangnya. Konsekuensinya adalah ketika kemenangan telah diraih oleh Dada Rosada, selanjutnya adalah pembuktian janji kampanyenya terhadap Persib itu sendiri.<sup>160</sup>

Dada Rosada menggunakan simbol-simbol Persib dan juga mengangkat Persib dalam kampanyenya dilihat oleh Sekjen Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika, Tata S. Wirasmita, dalam kerangka kewajaran tapi lebih mengarah pada pemanfaatan Persib itu sendiri. Kecenderungan ini karena Persib memang berpotensi untuk menghasilkan banyak suara, terutama dari pemuda-pemuda yang mempunyai ikatan emosional dengan Persib.

" Saya melihatnya ini tren. Dilihat dari sisi politik. Politisi biasa menggunakan apapun untuk mencapai keinginannya. Kebanyakan yang terjadi, sebelum jadi apa-apa dia mendekati golongan tertentu, tapi kalau sudah jadi kan suka lupa. Saya melihatnya Persib itu hanya dimanfaatkan saja, apakah setelah itu akan memberi perhatian lebih kepada Persib, saya tidak yakin.... Saya melihatnya ini tren. Dilihat dari sisi politik. Politisi biasa menggunakan apapun untuk mencapai keinginannya. Kebanyakan yang terjadi, sebelum jadi apa-apa dia mendekati golongan tertentu, tapi kalau sudah jadi kan suka lupa. Saya melihatnya Persib itu hanya dimanfaatkan saja, apakah setelah itu akan memberi perhatian lebih kepada Persib, saya tidak yakin. "

Kedekatan Dada Rosada dengan Persib perlu diakui begitu kuat. Persib mampu menjadi modal sosialnya, tetapi kemudian menggunakan Persib dalam atribut-atribut kampanyenya ketika itu hanya menimbulkan politisasi. Kesan yang

<sup>159</sup> Atas adanya tanggapan serta informasi ini, maka penulis pada bagian sebelumnya, telah menuliskan serta menjabarkan beberapa faktor yang mampu memenangkan Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008.

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Tisna Sanjaya, Dosen di Jurusan Seni Grafis, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, sekaligus Budayawan pemerhati seni, kebudayaan, dan sepakbola di Jawa Barat. Wawancara dilaksanakan pada 14 Maret 2012, pukul 12:19 WIB, bertempat di Laboratorium Seni Grafis, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung.

muncul kemudian adalah pemanfaatan Persib oleh Dada Rosada pada waktu itu. Kesan politisasi Persib oleh Dada Rosada makin terasa lewat dua hal, yang pertama adalah janjinya tentang percepatan penyelesaian stadion Persib<sup>161</sup> dan pencalonannya menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat 2013 dari Partai Demokrat. Di beberapa tempat di Kota Bandung dan juga di beberapa daerah di Jawa Barat, banyak ditemui poster Dada Rosada yang menggunakan simbol-simbol Persib, sebagai calon gubernur Jawa Barat 2013-2018.<sup>162</sup>

Dada Rosada memang telah membangun modal sosial di Persib. Penggunaan simbol-simbol Persib ketika itu hanya menjadikan Dada Rosada terkesan mempolitisasi dan memanfaatkan Persib. Dada Rosada menarik Persib yang merupakan institusi olahraga, yang tidak terkait langsung pada politik praktis, pada pemilihan umum, disinilah politisasi terjadi. Orasi kampanye yang sebelumnya juga telah dituliskan, menunjukkan adanya politisasi dengan mengajak pendukung Persib untuk memilihnya dengan ancaman dari orator. Modal sosial yang dibangun Dada Rosada kemudian terkesan tidak terlihat dengan politisasi Persib ini. Seharusnya Dada Rosada yang sudah sangat terikat dengan Persib tidak perlu menonjolkan Persib dalam kampanyenya, karena para pendukung Persib pun sudah mengetahui keterikatan Dada Rosada dan Persib.

Melihat sebuah kondisi atas apa yang dilakukan Dada Rosada terhadap Persib dalam kampanyenya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Pareto dan Marx dalam menanggapi institusi olahraga dalam kehidupan sosial politik. Pareto mengatakan bahwa penggunaan simbol-simbol tertentu yang berpengaruh di masyarakat, akan coba digunakan oleh penguasa atau elit untuk menarik perhatian masyarakat. Sementara itu, Marx mengatakan bahwa sebenarnya olahraga tidak berbeda dengan institusi sosial lainnya seperti kesehatan, media massa, dan lainnya, di mana dalam dinamika perjalanannya bersinggungan dengan banyak hal, termasuk politik. Sebagai sebuah institusi, olahraga yang banyak dilihat oleh

<sup>161</sup> Penjelasannya pada Sub-bab 4.5.

<sup>162</sup> Penggunaan Persib dalam atribut kampanye pada Pilgub Jabar 2013, ternyata tidak hanya dilakukan oleh Dada Rosada saja, tetapi juga oleh Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat 2008-2013) dan juga oleh Dede Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013). Hasil wawancara dengan Tata S. Wirasmita, Sekjen Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika Universitas Padjddjaran. Wawancara dilakukan pada 23 Juni 2012, pukul 13.41 WIB, di FMIPA Universitas Padjajaran, Jl. Ir H. Juanda No. 4 Bandung.

banyak orang, diliput oleh media massa, akan dipengaruhi oleh elit politik yang ada di sekitarnya. Relasi terbaik dan paling terasa adalah ketika elit politik yang mempengaruhi institusi olahraga tersebut, mencitrakan dirinya lewat media dalam hal pembangunan infrastruktur olahraga, dan hal ini akan menyedot perhatian publik.<sup>163</sup> Analisa ini digunakan bukanlah untuk mendeterminasi atau melegitimasi Persib sebagai salah satu faktor kemenangan Dada Rosada ketika itu. Fakta di lapangan memang terjadi interaksi antara Dada Rosada dan Persib menjelang dan di saat Pemilihan Kota Bandung. Pengesahan atas Persib sebagai faktor kemenangan Dada Rosada haruslah diteliti lebih lanjut lewat penelitian yang bersifat kuantitatif.

#### **4.5 Kebijakan Dada Rosada sebagai Walikota Bandung 2008-2013 sebagai Realisasi Janji Kampanye Terhadap Persib**

Bourdieu lewat konsep modal sosialnya menyatakan bahwa seseorang yang telah berinvestasi sosial lewat jaringan-jaringan sosial, nantinya bisa terakumulasi menjadi modal sosial. Seseorang atau individu tersebut mampu menggerakkan atau memobilisasi modal sosialnya untuk melakukan sesuatu hal, tetapi yang harus diingat adalah harus adanya timbal balik individu tersebut kepada modal sosialnya setelah tujuan individu tersebut tercapai.<sup>164</sup> Politisasi Persib sebagai modal sosial oleh Dada Rosada, mencoba menggunakan timbal balik ini lewat janji pembangunan stadion baru untuk Persib.

Janji kampanye stadion baru Persib oleh Dada Rosada dikarenakan Persib tidak mempunyai stadion atau kandang yang layak. Mendesaknya Persib untuk memiliki stadion baru juga dikatakan oleh Ketua *Viking Persib Fans Club*, Heru Joko. Menurutnya sudah tidak lagi nyaman bagi Stadion Siliwangi untuk menyelenggarakan pertandingan Persib. Animo Bobotoh untuk menonton Persib selalu tinggi. Sementara lokasi Stadion Si Jalak Harupat dikatakan masih sangat jauh.<sup>165</sup> Heru Joko menyatakan bahwa ketika itu hanya Dada Rosada yang

<sup>163</sup> Levon Chorbajian, "Toward A Marxist Sociology of Sport: An Assessment and A Preliminary Agenda", dalam Ander Yiannakis, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

<sup>164</sup> SP. Varma. (1999). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 202.

<sup>165</sup> Dari hasil pengamatan penulis, menuju Stadion Si Jalak Harupat, diperlukan 1 jam hingga 2 jam dari Bandung, tergantung keadaan dan situasi arus lalu lintas, serta masih kurang baiknya infrastruktur pendukung arus lalu lintasnya.

mampu menjanjikan dibangunnya stadion baru bagi Persib, di antara calon lawannya. Pernyataan Heru Joko sebagai Ketua *Viking* yang sangat menginginkan stadion baru Persib nantinya bisa dibuat oleh Walikota Bandung Terpilih, diberitakan oleh harian *Pikiran Rakyat*. Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa Heru Joko dalam jumpa persnya, Sabtu (9/8/2008) atau satu hari sebelum pencoblosan di Pemilukada Kota Bandung, sangat berharap Dada Rosada terpilih menjadi Walikota Bandung untuk yang kedua kalinya, serta mampu merealisasikan pembangunan SUS Gede Bage.<sup>166</sup> Harapan pada Dada Rosada yang telah menjadi Walikota Bandung untuk periode yang kedua, diharapkan stadion baru Persib akan bisa selesai sebelum masa jabatan Dada Rosada berakhir di tahun 2013.<sup>167</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Toharudin, selaku Ketua Bapilu DPD PKS Kota Bandung. Beliau menyatakan bahwa memang pembangunan SUS Gede Bage merupakan janji kampanye Dada Rosada bagi Persib. Mendesaknya pembangunan stadion baru untuk Persib dikarenakan Stadion Siliwangi di Bandung, sudah tidak mampu menampung kapasitas penonton yang terus datang ke stadion untuk menonton pertandingan Persib di Stadion Siliwangi. Selain itu kerap sulitnya panitia pelaksana pertandingan Persib mendapat izin dari Kapolretabes Bandung, karena Stadion Siliwangi yang berada tepat di tengah Kota Bandung, dan akan menyulitkan pihak Kepolisian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa kali pertandingan Persib juga diselenggarakan di Stadion Si Jalak Harupat, tetapi stadion ini milik Pemerintah Kabupaten Bandung, dan akses jalan ke sana cukup jauh dan kurang memadai. Penjelasan ini juga diutarakan oleh Toharudin.

" Mungkin yaitu untuk segera untuk menyelesaikan SUS Gede Bage, salah satu upaya tersebut. Yaitu upaya untuk merealisasikan janji kampanye Dada Rosada untuk Persib sebagai salah satu modal sosialnya, yang telah membawa kemenangan bagi beliau di Pemilukada Kota Bandung 2008. SUS Gede Bage ini kan nantinya untuk markas Persib, untuk Persib bertanding di Bandung. Ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan

<sup>166</sup> Syamsul Bachri, *Viking Meminta Dada Merealisasikan SOR*, Harian *Pikiran Rakyat*, edisi 10 Agustus 2008.

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan Heru Joko, Ketua Viking Persib Fans Club, pada 4 April 2012, pukul 18:56 WIB, bertempat di Viking Fans Shop dan Loyal Cafe, Jl. Banda No. 5 Bandung

untuk memihak Persib, karena sampai sekarang Persib itu kan tidak punya base camp, hanya numpang di Jalak Harupat di Kab. Bandung. "

Kemenangan Dada Rosada dan pasangannya Ayi Vivananda, menjadikan keduanya sebagai Walikota & Wakil Wali Kota Bandung 2008-2013. Posisi Dada sebagai Walikota Bandung terpilih, memungkinkan beliau untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, terutama yang berhubungan dengan Persib. Kampanye utama Dada Rosada untuk Persib ketika itu adalah percepatan pembangunan Stadion Persib atau dikenal juga dengan SUS Gede Bage. Bukan janji prestasi agar Persib mampu menjuarai Liga Indonesia di musim-musim berikutnya. Hal ini lantaran mulai ada wacana perubahan bentuk serta kepemilikan Persib di tahun berikutnya, tahun 2009. Wacana tersebut yaitu Persib menjadi Perseroan Terbatas, bukan lagi milik Pemkot Bandung. Wacana ini sesuai dengan Permendagri Permendagri No 13 Tahun 2006 dan PP No 58 Tahun 2006 mengenai larangan penggunaan APBD untuk tim sepakbola daerah.

Berbagai pendapat serta informasi yang diperoleh dari naraumber dan berbagai portal berita lainnya menunjukkan bahwa SUS Gede Bage harus segera direalisasikan oleh Dada Rosada. Realisasi ini juga merupakan sebuah bukti kampanye Dada Rosada bagi Persib ketika itu. Mengingat kini posisi Dada Rosada yang sudah ada tidak ada dalam struktur internal Persib, mungkin ini adalah satu-satunya jalan untuk menjaga relasi dengan Persib secara institusi dan kepercayaan para Bobotoh. Belum selesainya SUS Gede Bage sesuai janji awal oleh Dada Rosada, yaitu pada tahun 2011, menjadi citra buruk, dan lebih terkesan pada masalah politisasi. Kampanye Dada Rosada pada Pemilu Kota Bandung 2008, menjanjikan pembangunan stadion Persib yang ketika itu diperkirakan akan selesai pada 2011. Seperti yang diberitakan oleh *Tempointeraktif*, pada saat masa kampanye Pemilu Kota Bandung 2008, antara 23 Juli - 8 Agustus 2008. Pada tanggal, 24 Juli 2008, di salah satu acara kampanye perdana bagi pasangan Dada Rosada - Ayi Vivananda, Dada Rosada waktu itu menyampaikan bahwa yang akan dilakukan untuk Persib sebagai Walikota Bandung kelak adalah mempercepat pembangunan Stadion Persib.<sup>168</sup> Tidak selesainya pembangunan

---

<sup>168</sup> Alwan Ridha Ramdani, "Dada Janji Bangun Stadion Persib", diunduh dari <http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbmQ=&media=bmV3cw==>

SUS Gede Bage sesuai yang dijanjikan Dada Rosada pada kampanyenya itu, juga dikomentari oleh Tata S. Wirasasmita.

" Terkait dengan janjinya tentang SUS Gede Bage, saya melihatnya lebih politis untuk Pilgub Jabar 2013. Target Pak Dada itu kan Desember 2012 SUS Gede Bage selesai, tapi dananya juga ada dari pemprov. Ingat ketika mencairkan dana ini siapa yang berkepentingan, Gubernur Jabar yang sekarang juga berpikir jika stadion ini jadi sekarang, nama Pak Dada yang muncul karena proyek ini lebih dikenal sebagai proyeknya Pemkot Bandung bukan Pemprov Jabar. Tapi ya ini harus dibuktikan lagi kebenarannya, indikasinya ya seperti itu."

Pembangunan SUS Gede Bage bisa dibilang sebagai mega proyek bagi Pemkot Bandung. Pendanaan mega proyek ini diperkirakan menggunakan dana dari APBD Kota Bandung Rp 400 milyar, serta tambahan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 200 milyar.<sup>169</sup> Meski ada bantuan pendanaan dari Pemprov Jabar, proyek ini tetap dilaksanakan oleh Pemkot Bandung. Sempat adanya penundaan pembangunan SUS Gede Bage pada kurun waktu 2010-2011, dikarenakan adanya masalah laporan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemkot Bandung kepada Pemprov Jabar. Hal ini diutarakan oleh Indra Perwira.

" Nah sekarang ini sedang di bangun lapangan itu (SUS Gede Bage) oleh Dada Rosada sebagai realisasi janjinya kepada Persib ketika kampanye. Tapi sebenarnya ini juga ada masalah dalam dana pembebasan lahan, juga laporannya belum dibuat, tetapi minta lagi bantuan provinsi. Tapi tidak dibantu provinsi karena laporannya belum dibuat. Di media Pak Dada ngomong seolah-olah Pemprov Jabar, lewat Gubernur Ahmad Heryawan, tidak mau membantu pembangunan ini. Hal ini juga dipolitisir akhirnya oleh Pak Dada. "

Meski terdapat masalah dalam merealisasikan janjinya, dalam kunjungan terakhirnya ke SUS Gede Bage, Dada Rosada, dijanjikan oleh Pelaksana proyek, yaitu Wika, sebagai rekanan kerja Pemkot Bandung untuk proyek ini, SUS Gede Bage akan selesai pada Desember 2012.<sup>170</sup> Jadwal ini mundur dari jadwal

---

*&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbZF0=&id=MTI4OT*  
Yz, pada 11 April 2012, pukul 15.29 WIB.

<sup>169</sup> Yulianto & Dian Prima, "Pemprov Jabar Bangun Lima Stadion Internasional: Peduli Sepakbola", *Harian Inilah Koran*, edisi Senin, 16 April 2012.

<sup>170</sup> Bhayu, "Target Stadion Gede Bage Rampung Akhir Tahun 2012", diunduh dari <http://www.hupakuan.com/fullpost/berita-utama/1325475932/target-stadion-gedebage-rampung-akhir-tahun-2012.html>, pada 17 April 2012, pukul 19.54 WIB.

sebelumnya pada Oktober 2012, karena yang dimaksud selesai pada Oktober 2012, lapangan sudah bis digunakan, tetapi atap peneduh baru ada di tribun VIP Barat dan Timur. Sementara di Desember 2012, seluruh tribun di SUS Gede Bage sudah selesai dilaksanakan, dan menutupi seluruh tribun.<sup>171</sup> Pembangunan SUS Gede Bage juga sangat diapresiasi oleh M. Farhan, selaku Dirketur Marketing PT. PBB, tetapi dengan catatan. Persib menurutnya memang membutuhkan sebuah stadion baru yang mampu membanggakan kota Bandung. Pembangunan stadion yang akan menjadi stadion internasional pertama di Jawa Barat ini, diutarakan oleh Farhan sebenarnya bisa menjadi relasi yang baik antara politisi dan sepakbola. Kekuatan finansial politisi yang menduduki jabatan publik, seharusnya mampu membuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan masyarakat, salah satunya dalam sepakbola. Catatannya jangan pembangunan tersebut dipolitisasi, karena kecenderungannya sekrankarang seperti itu, terutama untuk pencitraan.

" Pembangunan SUS Gede Bage itu harus kita apresiasi. Tapi hanya stop sampai di situ. Selebihnya biar kita (PT. PBB-penulis) yang handle. Bapak (Dada Rosada) jangan datang tiba-tiba pake kaos Persib, terus bilang, "pilih saya jadi gubernur Jabar". Politisi, ketika mereka menjadi pejabat publik tugas mereka dalam dunia sepakbola hanya satu, menyediakan infrastruktur. Di mana infrastruktur ini akan menjadi stimulan untuk orang mau nonton dan main bola. "

Seperti yang diutarakan M. Farhan, bahwa SUS Gede bage ini akan menjadi bahan politisasi selanjutnya dalam dinamika politik di Kota Bandung dan untuk Gubernur Jawa Barat. Dada Rosada yang telah berjanji menyelesaikan stadion Persib ini akhirnya terjebak pada situasi politik yang dihadapinya menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013. Pendanaan yang dilakukan bersama oleh Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar, menjadikan politisasi atas penyelesaiannya menjadi polemik. Ketidakmampuan Dada Rosada jika nantinya stadion ini tidak berhasil diselesaikan sesuai target barunya, akan menjadikan SUS Gede Bage lebih kental nuansa politisasinya dibanding kontribusinya bagi Persib, seperti yang telah dijanjikan Dada Rosada sebelumnya.

---

<sup>171</sup> Informasi ini didapati oleh penulis, ketika mengikuti kunjungan Walikota Bandung, Dada Rosada, untuk meninjau perkembangan pembangunan SUS Gede Bage, yang disampaikan oleh Wika, sebagai pelaksana proyek. Penyampaian presentasi ini, dilaksanan di Ruang Rapat Proyek SUS Gede Bage, pada 19 Maret 2012, pukul 11.52-12.12 WIB.

## **BAB 5 KESIMPULAN**

Penulisan skripsi ini berdasarkan pertanyaan pada permasalahan penelitian, yaitu "*faktor-faktor apa yang menyebabkan Persib di politisasi oleh Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008?*". Pertanyaan ini bermula ketika Dada Rosada dalam melaksanakan kampanye pada Pemilukada Kota Bandung 2008, sering sekali menggunakan simbol-simbol Persib dalam atribut kampanyenya, seperti yang sudah dijabarkan oleh penulis di Bab sebelumnya. Bahkan tidak hanya sekedar simbol-simbol Persib dalam atribut kampanye, terkadang ketika sedang melakukan kampanye tim sukses dari Dada Rosada yang sedang berorasi pun mengatakan bahwa Bobotoh haruslah memilih Dada Rosada. Berbagai data yang didapatkan oleh penulis pada akhirnya menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang dituliskan sebelumnya.

Posisi Dada Rosada sebagai Ketua Umum Persib saat itu, merupakan sebuah posisi yang menguntungkan. Selain fakta bahwa beliau adalah calon *incumbent*, dalam pemilihan Walikota Bandung untuk periode 2008-2013 ini. Bukan berarti mengecilkan atau menghilangkan faktor-faktor kemenangan Dada Rosada yang lain. Penulis telah juga menjabarkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Dada Rosada mampu menjadi Walikota Bandung untuk periode yang kedua kalinya. Dada Rosada dengan berbagai penjelasan ini bisa dikatakan telah mempolitisasi Persib sebagai salah satu modal sosialnya. Seperti yang diketahui Dada Rosada mampu membangun relasi sosial dengan Persib semenjak lama. Tetapi penggunaan simbol-simbol Persib dalam atribut kampanyenya berarti menarik sesuatu yang tidak terkait dalam politik, menjadi lebih terlibat dalam politik. Persib sebagai institusi olahraga, dibawa oleh Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008, lebih dekat dan terlibat dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedekatan Dada Rosada dengan Persib digunakan oleh beliau dan tim suksesnya untuk mencoba mendapatkan suaranya dari para pendukung Persib di Kota Bandung. Sebuah alasan

yang wajar ketika Persib dipolitisasi untuk mendapatkan suara karena Persib Persib mampu menghasilkan simpul-simpul massa yang banyak.

Dada Rosada bersama tim suksesnya tentu saja mengetahui bahwa Persib adalah sebuah potensi dan merupakan simpul-simpul massa yang harus diperebutkan suaranya. Tetapi jika harus mengukur signifikansinya, maka perlu untuk diteliti lebih lanjut. Posisi Dada Rosada sebagai Ketua Umum Persib ketika itu ikut melegalkan atas penggunaan simbol-simbol Persib dalam atribut kampanyenya. Tidak berbeda jika seorang ketua organisasi massa memasang simbol organisasinya pada atribut kampanye dalam pemilihan kepala daerah misalkan. Dengan memasang simbol-simbol Persib, maka para pendukung Persib pun seperti dingatkan untuk mendukung atau memilih Ketua Umumnya menjadi Walikota Bandung, bukan calon lainnya. Persib merupakan sebuah identitas masyarakat Kota Bandung yang tidak bisa begitu saja dilupakan dalam dinamika di Kota Bandung.

Persib pada akhirnya menjadi sebuah simbol atau identitas pada masyarakat Kota Bandung khususnya. Identitas atau keterwakilan masyarakat daerah setempat berbeda di masing-masing daerah. Hal ini lah yang seharusnya dilihat oleh para calon kepala daerah di daerah lain agar mengetahui identitas masyarakat di daerah pemilihannya. Mengetahui identitas masyarakat di daerah pemelihan akan sangat membantu para calon-calon kepala daerah, menjadi dianggap dekat dengan masyarakatnya. Dada Rosada membangun modal sosial di Persib, merupakan langkah-langkah untuk dekat dengan identitas masyarkat Kota Bandung. Penulis mengumpulkan berbagai data tentang Persib itu sendiri, hingga akhirnya mampu menjadi identitas masyarkat Kota Bandung. Penjelasananya karena Persib lahir atas sejarah panjang yang juga merupakan bagian dari bentuk perjuangan kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan di Kota Bandung, begitu pula dengan konteks yang sama atas lahirnya PSSI dalam skala nasional. Dinamika politik dan sejarah inilah yang selalu menyertai Persib dalam perjalanan panjangnya, serta pasang surutnya prestasi. Persib menjadi sebuah gambaran atas kekosongan atau simbol ke besaran masyarakat Sunda terutama yang berasal dari Kota Bandung. Sejak beberapa dekade belakangan hingga kini, masih sangat jarang tokoh-tokoh Sunda yang mampu berkiprah di panggung Nasional. Persib

mengisi kekosongan tersebut dengan prestasi. Persib juga menjadi besar ketika pada era-era tertentu mampu meraih gelar juara diberbagai kompetisi sepakbola nasional. Terakhir kali Persib menjadi juara adalah pada Liga Indonesia I musim kompetisi 1994/1995. Kemudian dilanjutkan tahun berikutnya, yaitu tahun 1996, ketika Persib mampu menembus babak perempat final Liga Champion Asia. Ketika itu tidak ada pemain asing dalam tim Persib, sehingga orang Bandung dan Jawa Barat makin bangga terhadap Persib

Mengambil sedikit contoh, tentang terpilihnya Maschut, sebagai Walikota Kediri pada tahun 2004, yang ditulis oleh Rosa Badrul Munir. Salah satu faktornya adalah Maschut yang ketika itu menjadi Ketua Umum Persik Kediri, mampu membawa Persik Kediri menadi juara Liga Indonesia 2004/2005. Hal ini lah yang kemudian menjadi daya tarik bagi Maschut untuk dipilih oleh anggota DPRD. Tidak seperti Maschut di Kediri, juga diketahui bahwa selama Dada Rosada menjadi Ketua Umum Persib, dari tahun 2003, tidak pernah sekalipun Persib mampu menjadi juara di pentas tertinggi kompetisi sepakbola nasional. Lamanya Persib tidak menjadi juara, ternyata tidak menurunkan animo Bobotoh untuk selalu mendukung Persib, termasuk Ketua Umumnya, Dada Rosada. Hal yang dibangun oleh Dada Rosada adalah mencoba berkontribusi terhadap Persib semenjak lama, bahkan ketika masih menjabat sebagai Kabag Ekonomi Kota Bandung di tahun 1988. Hingga akhirnya terpilih menjadi Walikota Bandung di tahun 2003, juga dipilih secara aklamasi oleh anggota Musta Persib sebagai Ketua Umum Persib di tahun yang sama.

Perjalanan karir Dada Rosada di Persib, membuat para Bobotoh terutama yang di Kota Bandung, tidak merasa asing ketika Dada Rosada menjadi calon Walikota Bandung di Pemilukada Kota Bandung 2008. Para calon-calon walikota Bandung lainnya pun juga melihat Persib sebenarnya mampu atau berpotensi untuk mendulang suara karena merupakan simpul-simpul kerumunan orang. Diperkirakan jumlah Bobotoh di Jawa Bagian Barat sekitar 5,7 juta jiwa, sementara Bobotoh yang ada di Kota Bandung sekitar 506.774 jiwa. Sementara itu menurut data dari KPUD Kota Bandung, Dada Rosada dan pasangannya, Ayi Vivananda, memperoleh 667.026 suara. Memang jika hanya dilihat secara kuantitas, maka sepertinya adan korelasi antara jumlah Bobotoh dan suara yang

diperoleh Dada Rosada, tetapi ini harus diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam untuk membuktikan pengaruhnya. Bobotoh Persib memang tidak terorganisir, tetapi ada beberapa kelompok suporter Persib yang berdiri, salah satunya yang terbesar karena banyak pengikutnya adalah *Viking* atau *Viking Persib Fans Club* sebagai nama resminya.

Jumlah anggota *Viking* sekitar 40.000 anggota dan terbagi atas beberapa distrik, bahkan sampai di luar Jawa dan di luar negeri, *Viking* merupakan kelompok suporter Persib terbesar. Ada kekeliruan dalam membedakan atau terkadang malah menyamakan antara Bobotoh dan *Viking*. Dada Rosada ternyata memang memiliki hubungan baik dengan Ketua *Viking*, yaitu Heru Joko. Hubungan yang terjadi bukanlah hubungan hirarki, sehingga ketika Pemilukada Kota Bandung segera dilaksanakan, komunikasi antara Dada Rosada dan Heru Joko merupakan hal yang biasa. Sehari sebelum pencoblosan, Heru Joko melakukan konferensi pers mengenai dukungannya kepada Dada Rosada untuk mendukung menjadi Walikota Bandung 2008-2013, tetapi dengan syarat Dada Rosada harus segera merealisasikan pembangunan SUS Gede Bage. Imbalan stadion lah yang diinginkan oleh Heru Joko dan kebanyakan Bobotoh lainnya, bukan transaksi politik uang atas dukungan suara.

Sesudah resmi menjabat sebagai Walikota Bandung terpilih, Dada Rosada memberikan timbal balik atas dukungan yang telah diberikan. Timbal balik yang coba diberikan kepada Persib memang ada tetapi dengan catatan. Jawaban atas timbal balik yang diberikan oleh Dada Rosada kepada Persib adalah kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk membangun SUS Gede Bage yang diperkirakan selesai pada Desember 2012 (janji Dada Rosada ketika kampanye, akan selesai pada tahun 2011). Isu stadion ini yang juga nampaknya menjadi menarik bagi para Bobotoh karena alasan stadion yang ada kini sudah tidak memadai dengan banyaknya Bobotoh yang datang untuk menyaksikan pertandingan kandang Persib.

Janji kampanye Dada Rosada tentang SUS Gede Bage merupakan sebuah pemikiran atas apa yang bisa dijanjikan kepada Persib. Di saat yang bersamaan pemikiran ini lahir atas rencana bahwa di tahun 2009, Persib sudah ditargetkan menjadi sebuah perusahaan dan tidak tergantung dari dana hibah APBD Pemkot

Bandung lagi. Adanya aturan baru ini membuat Dada Rosada tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan Persib di tahun 2009, sehingga sulit untuk menjanjikan Persib menjadi juara Liga Indonesia, di musim-musim berikutnya. Dada Rosada telah menggunakan Persib sebagai modal sosialnya, untuk mendukungnya menjadi Walikota Bandung terpilih di Pemilukada Kota Bandung 2008. Stadion yang direncanakan akan menjadi stadion bertaraf internasional ini merupakan sebuah timbal balik bagi modal sosialnya, yaitu menjaga hubungan dengan Persib sebagai modal sosialnya. Belum selesainya SUS Gede Bage sesuai kampanye Dada Rosada, yaitu seharusnya selesai pada tahun 2011, menimbulkan kesan politisasi atas pembangunan ini. SUS Gede Bage kemudian direncanakan selesai Desember 2012. Dada Rosada menjadi terjebak pada politisasi penyelesaian stadion Persib ini karena proyek ini juga didanai oleh Pemprov Jawa Barat, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang ini, bersama Dada Rosada direncanakan maju dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat 2013.

Pada akhirnya politisasi sepakbola dalam Pemilukada di Indonesia bisa menjadi *trend* baru dalam masa kampanye. Hal yang perlu dilihat adalah bagaimana melihat fenomena ini bisa lebih dilihat dan dianalisis agar sepakbola dan politik bisa dilihat dalam hubungan yang lebih positif. Ke depannya, pada tahun 2013, Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan Pemilukada. Politisasi Persib pun sudah mulia terlihat lagi pada atribut-atribut kampanye dari beberapa bakal calon Gubernur. Semoga Persib tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga bisa berprestasi. Sepakbola dalam politik pun diharapkan mampu menjadi ruang publik yang baik dan efektif dalam kontribusi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakrie, Connie Rahakundini (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bale, John, & Cronin, Mike (2003). *Sport and Postcolonialism*. Oxford: Berg.
- Brown, Adam (ed.) (1998). *Fantastics! Power, Identity & Fandom in Football*. London: Routledge.
- Castiglione, Dario., Deth, Jan W. Van., and Wolleb, Guglielmo (2008). *The Hand Book of Social Capital*. Oxford: Oxford University Press.
- Coakley, Jay (2001). *Sport in Society: Issues and Controversies (Seventh Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Deth, Jan W. Van & Wolleb, Guglielmo (2008). *The Hand Book of Social Capital*. Oxrod: Oxford University Press.
- Elison, Eddi (2000). *PSSI: Alat Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Mulia Angkasa.
- Florentini, Chay (ed.) (2006). *How To Win An Election*. Manila: ASG-CSP.
- Foer, Franklien (2006). *Melihat Dunia Lewat Sepakbola*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Furchan, Arief (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Goodhart, & Chataway, C. (1968). *War Without Weapons*. London: W.H. Allen.
- Grenfell, Michael, (2004). *Pierre Bourdieu Agent Provocateur*. London: Continuum.
- Harrison, Lisa (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Hornby, A S. (2005). *Oxford Advanced Leraner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press Oxford.
- International Olympic Committe (2011). *Olympic Charter*. Lausanne: IOC.
- Jenkins, David (1984). *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983*. New York: Cornell University.

- Lincoln, Allison (ed.) (1993). *The Changing Politics of Sports*. Manchester: Manchester University Press.
- Mangan, J. A., & Fan Hong (2003). *Sport in Asian Society: Past and Present*. London: Frank Cass.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nan Lin (2001). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Natakusumah, Arief (2008). *Drama itu Bernama Sepakbola: Gambaran Silang Sengkarut Olahraga, Politik, dan Budaya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Palupi, Srie Agustina (2004). *Politik & Sepakbola: di Jawa 1920-1942*, Jogjakarta: Ombak.
- Pitoyo (2010). *Dada Rosada: Hidup adalah Pilihan & Proses*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rowe, David (1995). *Media Information Australia : Sport! Changing The Angle*. Nort Ryde: Southwood Press.
- Said, M. Mas'ud (2007). *Birokrasi Di Negara Birokratis (Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia)*. Malang: UMM Press.
- Soendoro, R. Risnandar (2001). *Persib Maung Bandung: Lintas Sejarah Persib*. Bandung: CV Soendoro.
- Sugono, Dendy (et.al.) (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tulis, Yosef Tor (ed) (2010). *Sepakbola Indonesia: Alat Perjuangan Bangsa Dari Soeratin Hingga Nurdin Halid (1930 – 2010)*. Jakarta: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- M.F. Siregar, M.F (1978). *Peranan Olahraga dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Prisma.
- Vinokur, Martin Barry (1988). *More Than a Game: Sports and Politics*. New York: Greenwood Press.
- Wagg, Stephen (2004). *British Football and Social Exclusion*. London: Routledge.

Yiannakis, Ander; Melnick, Merrill J.; McIntyre, Thomas D, (2002). *Sport Sociology: Contemporary Themes (Fourth Edition)*. Iowa: Kendall/Hunt.

Varma, SP, (1999). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Bourdieu, Pierre (1989). "Social Space and Symbolic Power". *American Sociological Association, Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1 Spring.

Evans, Diana (1994). "Policy and Pork: The Use of Pork Barrel Projects to Build Policy Coalitions in the House of Representative". *American Journal of Political Science*, Vol 38, No. 4, November 1994.

H. E. Chehabi, H. E. (2002). "A Political History of Football in Iran". *Iranian Studies*, Vol. 35, No. 4 Autumn.

Ritchie, Jane, & Lewis, Jane (2003). *Qualitative Research Practice*. London: SAGE Publications.

Schatzberg, Michael G. (2007). *Journal of Southern African Studies*, Vol. 33, No. 1 March

Shirts, Matthew (1989). "Playing Soccer in Brazil: Socrates, Corinthians, and Democracy". *The Wilson Quarterly (1976-)*, Vol. 13, No. 2 Spring.

### **Skripsi**

Hahijary, Petra (1988). *Keterlibatan Elit Politik dalam Organisasi Olahraga di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Munir, Rosa Badrul (2006). *Terpilihnya Kembali Walikota Kediri H.A Maschut Untuk Periode 2004-2009 dan Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri*. Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Riswati, Yunia (2011). *Nilai-nilai Kohesivitas dan Fanatisme Suporter Tim Sepakbola Indonesia (Studi Pada Perilaku The Jakmania Vs Viking Bandung Dalam Film Romeo Juliet)*. Depok: Program Sarjana Ekstensi Ilmu Komunikasi FISIP UI.

**Tesis**

Alamsyah, Andi Rahman (2007). *Bantenisasi demokrasi: Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan (Studi tentang Demokratisasi Serang, Banten, Pasca-Soeharto, Tahun 2004-2006)*. Depok: Program Sarjana Sosiologi FISIP UI.

Pera, Yosef Hilarius Timu (2009). *Peran Negara dan Swasta Dalam Pengelolaan Olahraga Daerah di era Otonomi: Peran Pemerintah Kota Kediri dan Perusahaan Gudang Garam Dalam Mengembangkan Klub Persik Kediri*. Depok: Program Pasca Sarjana Sosiologi FISIP UI.

**Harian Cetak**

Bachri, Syamsul (edisi 6 Juli 2008). *Beragam Sikap Balon Tanggapi Reklame*. Harian Pikiran Rakyat.

\_\_\_\_\_. (edisi 10 Agustus 2008). *Viking Meminta Dada Merealisasikan SOR*. Harian Pikiran Rakyat.

Indra, Ade Bayu (8 Maret 2012). *Dede dan Dada Siap Bersaing*. Harian Pikiran Rakyat.

Tony (21 September 2003). *Dada Siap Bangkitkan Persib*. Harian Pikiran Rakyat.

\_\_\_\_\_. (5 November 2003). *Aa Tarmana Mundur dari Ketua Persib*. Harian Pikiran Rakyat.

\_\_\_\_\_. (10 November 2003). *Dada Rosada, S.H. Akhirnya Menjadi Ketua Umum Persib*. Harian Pikiran Rakyat.

Yulianto, & Prima, Dian (16 April 2012). *Pemprov Jabar Bangun Lima Stadion Internasional: Peduli Sepakbola*. Harian Inilah Koran.

**Dokumen Undang-undang dan Peraturan Pemerintah**

UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

### Berita Internet

- "Kemenangan Dada, Kemenangan Bandung".  
<http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/kemenangan-dada-kemenangan-bandung>. 26 September 2008.
- "Target Stadion GedeBage Rampung Akhir Tahun". <http://www.hupakuan.com/fullpost/berita-utama/1325475932/target-stadion-gedebage-rampung-akhir-tahun-2012.html>. 2 Januari 2012.
- "PERSIB: Aset atau Beban Publik?". <http://bigfound.org/artikel/9-umum/2-persib-aset-atau-beban-publik>. 1 Maret 2008.
- "PKS Ultimatum Poros Tengah Segera Tentukan Sikap".  
<http://bandung.detik.com/read/2008/06/17/150605/957855/486/pks-ultimatum-poros-tengah-segera-tentukan-sikap>. 17 Juni 2008.
- "Bobotoh Harus Dukung Dada - Ayi Agar Tidak Kualat".  
<http://bandung.detik.com/read/2008/07/24/152156/977278/486/tv/index.html>. 24 Juli 2008.
- "KPU Bandung Gagal Capai Target Partisipasi Dalam Pilwalkot".  
<http://bandung.detik.com/read/2008/08/15/192731/989508/486/kpu-bandung-gagal-capai-target-partisipasi-dalam-pilwalkot>. 15 Agustus 2008.
- "Sebutan Pilkada Jadi Pemilukada".  
<http://theglobejournal.com/kategori/politik/sebutan-pilkada-jadi-pemilukada.php>. 14 Oktober 2011.
- "Hanya Satu Pasang Calon Independen Yang Berlaga".  
<http://bandung.detik.com/read/2008/06/19/102039/958908/486/hanya-satu-pasang-calon-independen-yang-berlaga>. 19 Juni 2008
- "Pusing Gara-gara Permendagri No. 13 Tahun 2006".  
<http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=20919>. 29 Desember 2007.
- "KPK: Persib Klub Bersih APBD di Indonesia".  
<http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/11/02/10/163529-kpk-persib-klub-bersih-apbd-di-indonesia>. 10 Februari 2011.

"Bobotoh Di Jakarta Lebih Banyak dibanding Surabaya".  
<http://m.inilah.com/read/detail/1840253/bobotoh-di-jakarta-lebih-banyak-dibanding-surabaya>. 13 Maret 2012.

"Dada Janji Bangun Stadion Persib". i  
<http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpb nQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbzF0=&id=MTI4OTYz>. 24 Juli 2008.

"Dianggap Melanggar, Dada Rosada Ditegur Panwaslu Kota Bandung".  
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20080721180725>. 21 Juli 2008

"Sayembara Nama Stadion Bakal Digelar".  
<http://jabar.tribunnews.com/2012/03/19/nama-stadion-bakal-disayembarakan>. 19 Maret 2012

#### Artikel Internet

Dedi, Haryadi. "Politik Barrel Dada Rosada". <http://www.bigfound.org/artikel/9-umum/31-politik-pork-barrel-dada-rosada>. 21 April 2008.

Kadiman, Kusmayanto. "PSSI dan Jas Merah Siliwangi".  
<http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/02/21/pssi-dan-jas-merah-siliwangi/>. 21 Februari 2011.

Kristiyanto, Ekomaung Noer. "Persib Itu....".  
<http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/03/14/persib-itu/>. 14 Maret 2012.

Ramadhan, Ari Syahril. "Tanpa Restu Presiden, Gagal ke Werder Bremen".  
<http://www.persibholic.com/3292/tanpa-restu-presiden-gagal-ke-werder-bremen>. 8 Februari 2012.

Pamungkas, Nandang R. "Bobotoh". <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/359288/>. 23 Oktober 2010.

\_\_\_\_\_. "Info Klub". Dipetik pada 8 April 2012, dari  
<http://persib.co.id/main/in/klub/informasi-klub>. 2012.

\_\_\_\_\_. "Persib Bobotoh dan Bisnis Miliaran Rupiah". <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/74096>. 20 Oktober 2011.

\_\_\_\_\_. "Sejarah Ada di Tangan Thohir".  
<http://www.persibholic.com/3856/sejarah-ada-di-tangan-indra-thohir>.  
 11 April 2012.

- \_\_\_\_\_. "Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2007".  
<http://kpud-bandungkota.go.id/index.php?pilih=hal&id=15>.
- \_\_\_\_\_. "Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2008".  
<http://kpud-bandungkota.go.id/index.php?pilih=hal&id=16>. 2008.
- \_\_\_\_\_. <http://simamaung.com/sejarah-persib-bandung/ketua-umum-persib-bandung>. 2012.

### **Wawancara**

- Farhan, M. Direktur Marketing Persib. 21 Maret 2012.
- Irianto, Yossi. Ketua Dinas Pendapatan Kota Bandung. 24 April 2012.
- Joko, Heru. Ketua Viking Persib Fans Club. 4 April 2012.
- Perwira, Indra. Mantan Bakal Calon Walikota Bandung dari Jalur Perseorangan Pemilukada Kota Bandung 2008-2013. 5 April 2012.
- Sanjaya, Tisna. Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. 14 Maret 2012.
- Soemantri, Ishak. Mantan Tim Sukses Non-partai Dada-Ayi. 25 April 2012.
- Toharudin. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Kota Bandung. 17 Maret 2012.
- Wirasasmita, Tata S. Sekjen Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika Universitas Padjajaran. 23 Juni 2012.

## Lampiran 1: Surat elektronik dari M. Farhan

**Farhan** farhan@farhanmanagement.com  
to: Irham Pradipta Fadli <irham.pradipta@gmail.com>  
date: Tue, Jun 12, 2012 at 6:46 AM  
subje Re: Persib dan Perempuan  
ct:  
: Important mainly because of your interaction with messages in the conversation.

Dear Irham,

Selamat utk ujian sidang mu!

Berdasarkan survey 2011 di Jakarta, Surabaya, Bandung & 19 kota di Jawa Barat :

Total fans Persib : 5,3 juta orang

Proporsi fans perempuan : 26%

Demography : Kelompok usia fans perempuan terbesar adalah usia 21-40 tahun, terutama yg sudah menikah karena pengaruh suami & anak

Psikografi : Kelompok fans perempuan sebagian besar masuk ke kelompok enthusiast & fans yg secara pemikiran & sikap lebih terbuka serta toleran pada kelompok fans klub lain, selama mereka tidak merasa terancam. Ciri utama kelompok Enthusiast & Fans adalah : terbuka, non-fanatik tapi loyal pada klub dan sangat memperhatikan latest news about the club as well as the latest trend on the Club's apparel.

Demikian, semoga memenuhi pertanyaan dosen mu.

Farhan

Sent from my iPad

## Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup Dada Rosada

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. KETERANGAN PERORANGAN**

1. Nama Lengkap : **H. Dada Rosada, SH., M.Si.**
2. Nama Kecil : **Dada**
3. NIP : 480 069 798
4. KARPEG : No. C. 0206343
5. NPWP : 004619-4221
6. Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
7. Tempat / Tanggal Lahir : Bandung / 29 April 1947
8. Jenis Kelamin : Laki-laki
9. Agama : Islam
10. Status Perkawinan : Kawin
11. Tempat dan Tanggal Perkawinan : Ciparay, Kabupaten Bandung, 12 Januari 1975.
12. Status Kepegawaian : Pensiunan PNSD Kota Bandung Tanggal Mei 2003.
13. Alamat Tempat Tinggal : Jalan Tirtasari II No.12, Bandung 40151  
Tlp. (022) 2013579 / 081 12 24 75 2 / 081 22 03 16 10

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SR. Negeri I Ciparay Kabupaten Bandung, Lulus, Tahun 1960;
2. SMP Negeri Majalaya, Pindah ke SMP Negeri IV Bandung, Tahun 1964;
3. SMP Negeri IV Bandung, Lulus, Tahun 1964;
4. SMA Negeri III Bandung, Jurusan IPA, Lulus, Tahun 1967;
5. UNPAD, Fakultas Pertanian, Tingkat I, NRP. H. 68.069, Tahun 1968, Tidak Selesai;
6. UNPAD, Fakultas Ekonomi Ext., s.d. Tingkat III, NRP. 759, Tahun 1969 -1972, Tidak selesai;
7. UNINUS, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Perdata, Tahun 1974 - 1983, Ijazah No. 340/S.H/1983, Lulus, Tahun 1983;
8. UNPAD, Kerjasama, LAN RI-JABAR, Program Pasca Sarjana S2, BKU Kebijakan Publik, Bandung, Tahun 1995 s/d 1998 Lulus, Tanggal 15 Mei 1998;

### III. RIWAYAT DIKLAT PENJENJANGAN / KEDINASAN

1. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA) DEP DAGRI Angkatan IV, Tahun 1995;
2. Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (Diklat SPAMEN) LAN, Jakarta, Tahun 1999-2000, Angkatan V Tanggal 4 Oktober s.d. 21 Desember 1999.

### IV. RIWAYAT KURSUS / PENATARAN / LATIHAN KEDINASAN

1. UNPAD, WALAWA UNPAD, Fakultas Pertanian UNPAD, Tahun 1968;
2. Departemen Keuangan RI, Bendaharawan "A", Tahun 1976;
3. Penataran P4 Tingkat Kotamadya Type B, Angkatan II, Tahun 1980;
4. Penataran Pemantapan Kesadaran Bela Negara / LATSAR HANKAMNAS Pertahanan Sipil, Tahun 1980;
5. LAN RI Perwakilan Jawa Barat, Diklat Penyegaran Kepemimpinan dan Manajemen Angkatan IV, Tahun 1987;
6. LAN RI, Perwakilan Jawa Barat, Diklat Motivasi Berprestasi Angkatan II, Tahun 1988;
7. Pemerintah Provinsi D.T. I Jawa Barat, Kursus Penataran Pengelolaan Lingkungan, Kerjasama dengan PPLH ITB, Tahun 1991;
8. Penataran P4 Pola Terpadu Bagi Pegawai Republik Indonesia Angkatan XII, Tahun 1995;
9. Bimbingan Teknis Koordinasi dengan pendekatan Appreciation Influence Control (AIC), Tahun 1995;
10. Provinsi D.T. I Jawa Barat, Penataran Kewaspadaan Nasional (TARPADNAS) Tahun 1995;
11. Program Orientasi Pembinaan Aparat Perpajakan D.T. II Angkatan I, Tahun 1996;
12. Diklat Teknis Fungsional Bidang Pendapatan Daerah Type "B", Angkatan I, Tahun 1997;
13. Menteri Dalam Negeri R.I, Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia, Sebagai Peserta, Sertifikat No. 120/2151/SJ, Jakarta, 16 November 2006;
14. REAL ESTATE INDONESIA, Sebagai Peserta Forum Investasi Perumahan Dan Pemukiman Nasional Dalam Rangka FIABCI 61 WORLD CONGRESS, Nusa Dua Bali, 26 Mei 2010.
15. Lemhanas, Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten / Kota Angkatan III LEMHANAS RI Tahun 2010, **Peserta**, Surat Keputusan No:Skep/365/IV/2010, Jakarta 15 April 2010.

## **V. RIWAYAT KEPANGKATAN / GOLONGAN**

1. Honor Daerah, 15 Pebruari 1973;
2. CPNS, 1 Maret 1977;
3. Pengatur Muda, (II/a), 1 April 1978;
4. Pengatur Muda Tk. I, (II/b), 1 Oktober 1978;
5. Pengatur , (II/c), 1 Oktober 1982;
6. Penata Muda, (III/a), 1 April 1984;
7. Penata Muda Tk. I, (III/b), 1 April 1988;
8. Penata, (III/c), 1 April 1990;
9. Penata Tk. I, (III/d), 1 Oktober 1993;
10. Pembina, (IV/a), 1 Oktober 1997;
11. Pembina Tk. I, (IV/b), 1 Januari 2001;
12. Pembina Utama Muda, (IV/c), 1 April 2001;
13. Pembina Utama Madya, (IV/d), 1 April 2003.

## **VI. RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN**

1. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, Investment Board (Penanaman Modal),  
Tahun 1973 s/d 1977;
2. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, **Bendaharawan PUMC pada Sub Direktorat Pembangunan**, Tahun 1978 s/d 1980;
3. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, **Bendaharawan Proyek pada Bagian Pembangunan**, Tahun 1980 s/d 1981;
4. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, **Bendaharawan Gaji pada Assekotda II**, Tahun 1980;
5. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, **Bendaharawan KORPRI pada Sub Unit Kantor**, Tahun 1982 s/d 1984;
6. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, Assekotda II, **Kepala Urusan Keuangan** Tahun 1981 s/d 1984;
7. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, **Wakil Sekretaris KORPRI** Tahun 1984 s/d 1985;
8. Pemerintah D.T. II Bandung, Gelanggang Generasi Muda Bandung (GGMB), **Sekretaris** Tahun 1984 s/d 1985;
9. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, Bagian Perekonomian **Kepala Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat** Tahun 1985 s/d 1989;
10. **MPR-R.I, Anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Barat, Anggota NB-556, Tahun 1987 s/d 1992. (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 222/M Tahun 1987 Tanggal 14 September 1987);**

11. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, **Kepala Bagian Perekonomian**, Tahun 1988 s/d 1992;
12. **DPRD Tk. I Jawa Barat, Calon Anggota** No. Urut 93 pada PEMILU 1992 (Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Desember 1991);
13. **Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, Kepala Dinas Pendapatan Daerah**, Tahun 1992 s/d 1998;
14. **DPR R.I, Calon Anggota** No. urut 134 pada PEMILU Tahun 1997, asal Daerah Pemilihan Jawa Barat;
15. Pemerintah Kotamadya D.T. II Bandung, **Pembantu Walikotamadya Wilayah Bojonagara tanggal 21 April 1998 s.d. 3 Maret 2000**;
16. Pemerintah Kota Bandung, **Sekretaris Daerah Kota, (Sekdakot) Bandung**, Tanggal 5 April 2000 s.d. 25 Oktober 2002;
17. Pemerintah Kota Bandung, **Plt. Walikota Bandung**, Tanggal 11 Februari 2002 s.d. 8 Maret 2002;
18. Pemerintah Kota Bandung, **Staf Ahli Walikota Bandung**, Tanggal 25 Oktober 2002 s.d. 30 April 2003;
19. Pemerintah Kota Bandung, **Pensiun dari PNSD Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2003**.
20. **Walikota Bandung**
  - Masa Bakti 2003 – 2008  
**Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-533 Tahun 2003 Tanggal 9 Oktober 2003**
  - Masa Bakti 2008 - 2013  
**Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-668 Tahun 2008 Tanggal 30 Agustus 2008**

## **VII. RIWAYAT JABATAN WALIKOTA BANDUNG**

### **A. Masa Bhakti : 2003 – 2008**

1. Pasangan Calon Walikota:
  - 1.1. - AA Tarmana ( Incumbent ) : Fraksi ABRI
  - Hilman Djuaeni : Fraksi PPP
  - 1.2. - Dada Rosada : Fraksi Partai GOLKAR
  - Josef Purwasuganda : Fraksi PDIP
  - 1.3. - H.R.M. Sugih Wiramikarta : Fraksi Partai Keadilan  
Bulan Bintang
  - Iwan Abdurahman : Fraksi Partai Keadilan  
Bulan Bintang

Bulan Bintang

2. Komposisi Anggota DPRD Kota Bandung 45 kursi terdiri dari :

- 2.1. - PDIP : 14 Kursi
- 2.2. - PAN : 8 Kursi
- 2.3. - P. Golkar : 6 Kursi
- 2.4. - Fraksi TNI - POLRI : 5 Kursi
- 2.5. - PPP : 4 Kursi
- 2.6. - PKP : 1 Kursi
- 2.7. - Partai Keadilan Bulan Bintang : 5 Kursi
- 2.8. - PKB : 2 Kursi

3. Sistem Pemilihan

**Sistem pemilihan dilakukan melalui perwakilan di DPRD**

4. Waktu Dan Tempat **Pemilihan.**

- Tanggal : 9 September 2003
- Tempat : Gedung DPRD Kota Bandung  
JI.Aceh No.36
- Waktu : 09.00 WIB – selesai

5. Hasil Pemilihan

Pasangan

- 5.1. Walikota ( H.Dada Rosada,SH.,M.Si) – P.Golkar : 26 Suara ( 57,77% )  
Wakil Walikota ( H.Jusep Puurwasuganda )-PDIP
- 5.2. Walikota ( H.AA Tarmana ) -F.TNI – POLRI : 16 Suara ( 35,55% )  
Wakil Walikota ( Drs.H.Hilman,MH ) - PPP
- 5.3. Walikota (Drs.H.R.M. Sugih ) – F.KBB : 3 Suara ( 6,66% )  
Wakil Walikota (Ir.H.Iwan Ridwan A ) – F.KBB

6. Waktu Dan Tempat **Pelantikan**

- Tanggal : 16 Oktober 2003.
- Tempat : Gedung DPRD Kota Bandung  
JI. Aceh No.36
- Waktu : 10.00 WIB - Selesai

- 7. 1). Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32-553 Tahun 2003  
Tanggal 9 Oktober 2003  
Tentang : Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan  
Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat.

- 2). Pengangkatan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan :  
Tgl.16 Oktober 2003.

**B. Masa Bhakti : 2008 – 2013**

1. Pasangan Calon Walikota
  - 1.1. Dada Rosada : Partai Golkar  
Ayi Vivananda : PDIP
  - 1.2. Taufikurahman : PKS  
Deni Triesnahadi : PKS
  - 1.3. E.Hudaya Prawira : Independent  
Nahadi : Independent
2. Komposisi Anggota Dewan DPRD Kota Bandung Tahun 2004 – 2008
  - 2.1. PKS : 11 Kursi
  - 2.2. PDIP : 7 Kursi
  - 2.3. P.Golkar : 6 Kursi
  - 2.4. PAN : 6 Kursi
  - 2.5. P.Demokrat : 6 Kursi
  - 2.6. PPP : 4 Kursi
  - 2.7. PDS : 3 Kursi
  - 2.8. PBB : 2 Kursi
3. Sistem Pemilihan  
**Pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat**
4. Waktu dan Tempat **Pemilihan** :  
Tanggal : 10 Agustus 2008  
Tempat : TPS yang telah ditentukan oleh KPU, Se-Kota Bandung  
Waktu : 08.00 WIB – 13.00 WIB
5. Hasil Pemilihan Suara
  - 5.1. Jumlah Penduduk kota Bandung : 2.228.268 Jiwa
  - 5.2. Jumlah Hak Pilih : 1.521.362 Pemilih
6. Hasil Pemilihan Atau Raihan Suara
  - 6.1. Pasangan  
Dada Rosada dan Ayi Vivananda : 667.026 suara ( 64,98% )
  - 6.2. Pasangan  
Taufikurahman dan Deni Triesnahadi : 263.711 suara ( 25,69% )
  - 6.3. Pasangan

E.Hudaya.Prawira dan Nahadi : 95.728 suara ( 9,32% )

7. Waktu Dan Tempat **Pelantikan**

Tanggal : 16 September 2008

Tempat : Gedung Merdeka  
Jl.Asia Afrika

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

8. 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32-688 Tahun 2008

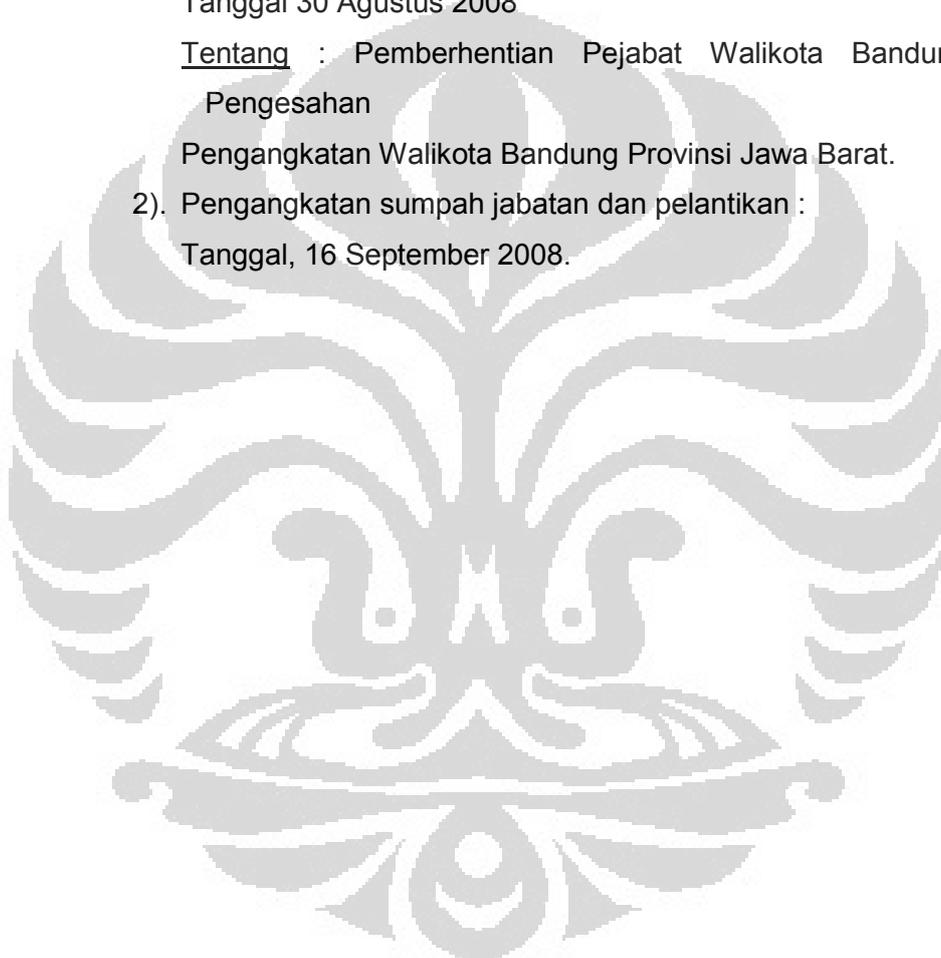
Tanggal 30 Agustus 2008

Tentang : Pemberhentian Pejabat Walikota Bandung Dan  
Pengesahan

Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat.

2). Pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan :

Tanggal, 16 September 2008.



## VIII. SIMPOSIUM / SEMINAR

1. **Judul :**  
**“ Pengembangan Kepemimpinan Institusional dalam rangka Pendayagunaan Manajemen Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Tahun 1987 “**  
  
Penyelenggara : LAN-RI Perwakilan Jawa Barat.  
Kedudukan : Anggota Kelompok Penyaji
  
2. Seminar dan Lokakarya Ketahanan Nasional, Tahun 1996.  
Penyelenggara : HASTANAS  
Kedudukan : Peserta
  
3. Seminar Nasional dengan Judul :  
**“ Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Repelita VII: Retrospek dan Prospek dalam Peningkatan dan Pendapatan Daerah Asli Daerah”, Tahun 1997.**  
  
Penyelenggara : PERSADI  
Kedudukan : Peserta
  
4. Pembicara Pada Acara Kongres Nasional Kependudukan 2010 Tema Perkembangan Kependudukan Dan Pencapaian ODG's  
Judul : Pandangan Daerah : 200 Tahun Pembangunan Dan Kependudukan Kota Bandung, Jakarta 23 – 25 November 2010;
  
5. Dan Simposium / Seminar Lainnya.

## **IX. KUMPULAN BUKU- BUKU**

1. Wagiman Dan Bandung Bermartabat Potret Perjalanan Dada Rosada Penulis  
Asep Budi Heryanto, Eko Risyanto, Deffy Ruspiyandy, Yadin Burhanudin Penerbit CV Delapan Nam 2008 ;
2. Kang Dada Pengabdian Tanpa Jeda, Editor Tjetje Hidayat Padmadinata(Konsultan), Yayat Hendayana,Dadang Bainur Penerbit Natrat 2008 ;
3. Refleksi Lingkungan Hidup Dada Rosada, Editor Tjetje Subrata dan Deny Riana Penerbit SC-19 publishing house 2010 ;
4. Aku Cinta Lingkungan Hidup, Editor Tjetje Subrata dan Deny Riana Penerbit SC-19 publishing house 2010 ;
5. Hidup Adalah Pilihan Dan Proses, Penulis Pitoyo Penerbit PT.Gramedia Utama Pustaka Jakarta 2010 ;
6. Satu Tahun Dada – Ayi, Penulis Tjetje Hidayat Padmadinata, Yayan Hendayana, Dadang Bainur ;
7. Bandung Kota Agamis, Penyusun FSOI ( Forum Silaturahmi Ormas Islam ) ;
8. Menuju Bandung Bermartabat Pengalaman Membangun Bersama Kang Dada, Penulis Merdi Hajiji 2010 ;
9. Ensiklopedia Bandung Kota Agamis, Penyusun FKUB ( Forum Komunikasi Umat Beragama ) ;

## X. RIWAYAT KELUARGA

1. Istri :
  - Nama : Hj. Nani Suryani, Bc. AN.
  - Tempat / Tgl. Lahir : Kabupaten Bandung, 23 September 1952
  - Pekerjaan : Pegawai Kanwil DEPNAKER Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pensiun Tanggal 1 Oktober 2008.
  
2. Anak :
  1. Nama : Keukeu Kaniawati Rosada
  - Tempat / Tgl. Lahir : Kota Bandung, 19 Oktober 1975.
  - Pendidikan : Sarjana ITB (S-1) Jurusan Biologi, Lulus Tahun 1999
  - Strata 2 (S-2) ITB Jurusan Biologi, Lulus Tahun 2003.
  - Pekerjaan : Dosen Jurusan Biologi Fak.MIPA UNPAD Bandung Tahun 2008.
  
  2. Nama : Rizky Rahadian Rosada
  - Tempat / Tgl. Lahir : Kota Bandung 18 Juli 1977.
  - Pendidikan : Sarjana Unpad (S-1) Bandung, Jurusan Akuntansi, Lulus Tahun 2005
  - Pekerjaan : Wiraswasta.
  
  3. Nama : Tita Herliawaty Rosada.
  - Tempat / Tgl. Lahir : Kota Bandung 20 Pebruari 1985
  - Pendidikan : Sarjana UNPAD ( S1) Bandung, Jurusan Manajemen, Lulus Tahun 2009
  - Pekerjaan : Wiraswasta
  
3. Bapak dan Ibu Kandung :
  1. Nama Bapak : H. Abas Totong Bin Endang Ahya ( Almarhum ),  
Meninggal Tgl 29 Desember 2011
  - Tempat / Tgl. Lahir : Ciparay, Bandung 16 Juli 1928
  - Pekerjaan : Petani
  - Alamat : Kp. Bojong, Desa Ciparay, Kab Bandung

2. Nama Ibu Kandung : Hj. Oyeh Binti Idi ( Almarhumah )  
Meninggal Tgl 20 April 2009  
Tempat / Tgl. Lahir : Ciparay, Bandung 5 Januari 1930  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kp. Bojong, Desa Ciparay, Kab.  
Bandung
4. Bapak dan Ibu Mertua :
1. Nama Bapak : Ana Suwarna ( Almarhum )  
Meninggal Tgl 11 Maret 1984  
Tempat/Tgl. Lahir : -  
Pekerjaan : -  
Alamat : Kp. Babakan Tarogong  
Desa Ciparay, Kab. Bandung
2. Nama Ibu Mertua : Hj. Entang ( Almarhumah )  
Meninggal Tgl 14 September 2010  
Tempat / Tgl. Lahir : Ciparay, Bandung 1910  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kp. Babakan Tarogong  
Desa Ciparay, Kab. Bandung
5. Saudara Kandung Istri :
- 5.1. Nama : H. Ano  
Tempat/Tgl. Lahir : 16 Pebruari 1940  
Pekerjaan : Pensiunan, Kepala Sekolah Dasar  
Pensiun Tgl 6 Juni 1992
- 5.2. Nama : Drs. H. Sobana, Ak., S.H  
Tempat / Tgl. Lahir : 10 Oktober 1942  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BUMN  
Pensiun Tgl 15 Oktober 2008
- 5.3. Nama : Yaya Marsia  
Tempat/Tgl. Lahir : 28 Nopember 1948  
Pekerjaan : Wiraswasta
- 5.4. Nama : Djuhana Suwarna  
Tempat/Tgl. Lahir : 10 Juli 1949  
Pekerjaan : Purnawirawan Laksamana Muda  
TNI-AL, Pensiun Tgl 1 Oktober 2004
- 5.5. Nama : Ir. Dedi Samsidi

Tempat/Tgl. Lahir : 10 Desember 1954  
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BUMN  
 Pensiun Tgl 1 Juli 2010

## **XI. RIWAYAT ORGANISASI**

### **1. ORGANISASI POLITIK**

- a. DPD GOLKAR Tk. II Kotamadya D.T. II Bandung, **Wakil Sekretaris**, Tahun 1980 s/d 1985;
- b. DPD GOLKAR Tk. I Jawa Barat, **Wakil Sekretaris**, Tahun 1988 s/d 1993;
- c. DPD GOLKAR Tk. I Jawa Barat, **Wakil Sekretaris**, Tahun 1993 s/d 1998;
- d. DPD Partai GOLKAR Provinsi Jawa Barat, **Wakil Ketua Dewan Penasehat** Masa Bhakti Tahun 2004 s/d 2009, SKEP No. Kep-07/GOLKAR/III/2005 Tanggal 28 Maret 2005;
- e. DPD Partai Golkar Kota Bandung, **Ketua Dewan Penasehat / Pertimbangan** Masa Bhakti 2009 s/d 2015, No : SKEP-001/GOLKAR/II/2010, Bandung Tanggal 14 Januari 2010.
- f. Partai Demokrat, **Anggota**, Tanggal 20 Agustus 2010, Nomor Anggota Kota Bandung : 08.32.290447.73.04.00001, Nomor Anggota Pusat : 11.32.290447.7301000595

### **2. ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

- a. DPD AMPI Tk. II Kotamadya D.T. II Bandung, **Ketua Bagian Kesiswaan**, Tahun 1980 s/d 1985;
- b. DPD AMPI Tk. I Jawa Barat, **Sekretaris**, Tahun 1985 s/d 1989;
- c. DPD AMPI Tk. I Jawa Barat, **Dewan Penasehat**, Tahun 1989 s/d 1994;
- d. Dewan Paripurna Daerah ANGKATAN 45 Jawa Barat, **Anggota**, Tahun 1991 s/d 1995 dan 1995 s/d 1999;
- e. Kwartir Cabang Pramuka Kotamadya D.T. II Bandung, **Wakil Ketua Bidang Usaha Koperasi**, Tahun 1992 s/d 1995;
- f. MPI KNPI Kotamadya D.T. II Bandung, **Ketua**, Tahun 1995 s/d 1998;
- g. PPM Kotamadya D.T. II Bandung, **Penasehat**, Tahun 1999 s/d 2004;

- h. AMS Kota Bandung, **Ketua Dewan Penasehat**, Tahun 1999 s/d 2004, dan 2004 s/d 2009;
- i. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI, **Anggota Kehormatan** Surat Keputusan Nomor: SKEP-10/PP/FKPPI/II/2007, Jakarta Tanggal 19 Februari 2007, Tahun 2007 s.d. Sekarang;
- j. Pemuda Pancasila Kota Bandung, **Ketua Majelis Pertimbangan**, Surat Keputusan No. E.2/119/KPTS/MPW.PP/JBR/VI/2002, Bandung 13 Juni 2002, Tahun 2002 s.d. 2006;
- k. Pemuda Pancasila Kota Bandung, **Ketua Majelis Pertimbangan**, Surat Keputusan No. E.2/852/KPTS/MPW.PP/JBR/VI/2006, Bandung 13 Juni 2006, Tahun 2006 s.d. 2010;
- l. KOSGORO JAWA BARAT, **Anggota Dewan Penasehat**;Tahun 2003 s/d 2011
- m. KOSGORO Kota Bandung, **Ketua Dewan Penasehat Organisasi**, Surat Keputusan No. 09/PD – KOSGORO 1957/JABAR/XI/2003;
- n. SOKSI Jawa Barat, , **KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH IX SOKSI**, Masa Bakti 2008 - 2013 Surat Keputusan No : KEP-043.16/DEPINAS SOKSI/XI/2008, Jakarta 12 September 2008;
- o. SOKSI Kota Bandung, **Ketua Dewan Penasehat**, Bandung 7 Juli 2003 Surat Keputusan No : A.011/SOKSI-JB/VII/2008;
- p. WIRA KARYA INDONESIA Kota Bandung, **Ketua Dewan Penasehat**, Masa Bakti 2005 - 2010 Surat Keputusan No : 009/WKI-JBR/VII/2008, Bandung 14 Juli 2008;
- q. KNPI Kota Bandung, **Ketua Dewan Penasehat**, Surat Keputusan No: KEP.07/KNPI-JB/XII/2007;
- r. MKGR Jawa Barat, **Anggota Dewan Penasehat** Tahun 2003 s/d 2008;
- s. MKGR Kota Bandung, **Ketua Dewan Penasehat** Tahun 2008 s/d 2013;
- t. Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat, **Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung**, Surat Keputusan No : 04 Tahun 2010, Bandung 4 Februari 2010;
- u. ANGKATAN MUDA SILIWANGI PUSAT, **Ketua Dewan Penasehat** Masa Bhakti 2010-2015;
- v. FORUM RW, **Ketua** Dewan Penasehat Masa Bhakti 2010-2013;
- w. IKATAN ALUMNI SMPN 4 BANDUNG, **Ketua Badan Pembina** Masa Bhakti 2008-2013;
- x. WI-ASGAR ( PAGUYUBAN WARGI ASAL GARUT), Pembina Periode Tahun 2010-2015;

- y. Anggota Dewan Pembina Dan Anggota Dewan Kehormatan BPC Siliwangi Pusat, Tahun 2010 s/d 2015 ;
- z. BPK 45 DHD Jawa Barat, Sekertaris Umum, Tahun 2003 s/d 2008 ;
- aa. BPK 45 DHC Kota Bandung, Ketua, Tahun 2003 s/d 2008 ;
- bb. Patriot Panca Marga Provinsi Jawa Barat, Anggota Dewan Penasehat, Tahun 2007 s/d 2012 ;
- cc. Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Anggota Dewan Pangaping Mangsa Bakti 2010-2015 No:007a/PB.SK/C/2010;
- dd. Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Pengurus Wilayah Jawa Barat, **Ketua Majelis Penasehat Wilayah**, Masa Bakti 2012-2017 No.16/KPTS/PP/03/1433;
- ee. Dan Organisasi Kemasyarakatan lain-lainnya;

### 3. ORGANISASI PROFESI

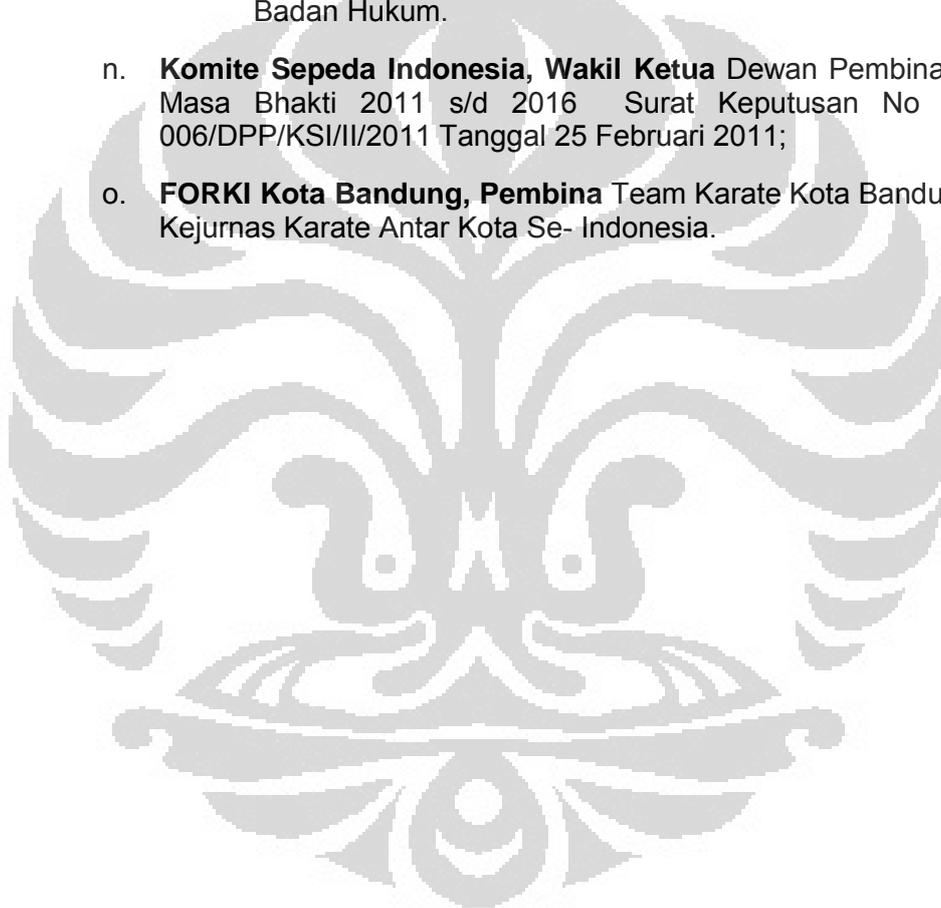
- a. PERSADI Wilayah Jawa Barat, **Ketua Bidang Organisasi**, Tahun 1995 s/d 1999;
- b. KORPRI Kota Bandung, **Ketua LBH**, Tahun 2000 s/d 2005;
- c. APEKSI:
  - **Ketua KOMWIL III APEKSI** (Banten, DKI, Jabar, Jateng) Tahun 2000 s/d 2002;
  - **Anggota Dewan Pengurus**, Tahun 2000 s/d 2004;
  - **Anggota KOMWIL III APEKSI** Tahun 2002 s.d. 2004;
  - **Anggota KOMWIL III APEKSI** Tahun 2004 s.d. 2006.
  - **Anggota APEKSI**, Tahun 2004 s/d 2008;
- d. UNINUS, **Ketua Umum IKA UNINUS**, Tahun 2008 s/d 2012, No : SKET.006/IV/2008 Tanggal 6 April 2008;
- e. Sebagai **Ketua Forum Komite Integritas/Pemantau Independent Nasional Ke 3 (Tiga) Dari Bulan November 2008 s/d Februari 2009, Diperpanjang Sejak Tanggal 1 Juli 2009 s/d 31 Oktober 2009** SK Koordinator Periodik Forum Tiga Pilar Kemitraan No : Kep-12/Koord.3pk.Ptm/2009.
- f. Gubernur Jawa Barat, **Ketua Forum Pakta Integritas Jawa Barat** Berdasarkan Polling Pemilihan Ketua **Untuk Periode Januari 2009 Sampai Dengan Januari 2010**, No:119/49/Org/2009, 13 Januari 2009;
- g. **MENDIKNAS R.I**, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2010 - 2015 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 69/MPN.A4/KP/2010, Jakarta 18 Januari 2010;

- h. UIN Sunan Gunung Djati, **Anggota Dewan Penyantun** UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2010-2011 Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati No. Un.05/II.2/KP.00.3/012.A/2010;
- i. **LEMHANAS R.I, Ketua**, Ikatan Alumni Forum Konsolidasi III Lemhanas R.I 2010;
- j. **HKTI ( Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ) Kota Bandung , Pembina** HKTI Jawa Barat Masa Bhakti 2005-2010 No. 26/HKTI-JB/VII/2006 Tanggal 20 Juli 2006;
- k. **HKTI ( Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ) Jawa Barat, Wakil Ketua**, HKTI Jawa Barat, Badan Pertimbangan Organisasi (BPO), Masa Bhakti 2009 – 2014 No: 01/Skep/BPO/HKTI-JB/III/2011 Tanggal 22 Agustus 2011.

#### 4. ORGANISASI OLAH RAGA

- a. PERSIB (Sepak Bola), **Bidang Dana dan Sarana**, Tahun 1993 s/d 1998;
- b. PENGKAB TAEKWONDO INDONESIA, Kotamadya D.T. II Bandung, **Ketua I**, Tahun 1996 s/d 2000;
- c. PENGKAB PELTI Kotamadya D.T. II Bandung, **Ketua I**, Tahun 1996 s/d 2000;
- d. PERTINA, Tinju Amatir, Kotamadya D.T. II Bandung, **Penasehat**, Tahun 1997 s/d 2000;
- e. KONI Kotamadya D.T. II Bandung, **Bidang Dana, Sarana dan Perlengkapan**, Tahun 1998 s/d 2000;
- f. KODRAT, Tarung Drajat, BOXER, Kotamadya D.T. II Bandung, **Dewan Penasehat**, Tahun 1998 s/d 2000;
- g. PENGKAB PGI (Golf Indonesia), Kotamadya D.T. II Bandung, **Wakil Ketua Umum**, Tahun 1998 s/d 2002;
- h. PERCASI, Kota Bandung, **Penasehat**, Tahun 1999 s/d 2002;
- i. PENGDA POBSI (Billiard) Jawa Barat, **Ketua Umum**, Tahun 1999 s/d 2003;
- j. IPSI Jawa Barat, **Penasehat**, Tahun 1999 s/d 2003;
- k. **PERSIB (Sepak Bola), Ketua Umum**, Tahun 2003-2007 Keputusan MUSTA, 18 Desember 2008;

- i. **PENGCAB PSSI KOTA BANDUNG, Ketua Umum** Periode 2007-2011, Hasil Musyawarah Cabang Tanggal 22 November 2007, Berdasarkan Surat Keputusan Pengda PSSI Jabar Nomor SKEP. 01/KU-FT/XII/2007, Tanggal 19 Desember 2007;
- m. **PERSIB, Mandataris Persib**, Keputusan Musta, 22 November 2008, Dengan Tugas:
  - 1) Menyelesaikan Sisa Pertandingan Kompetisi PERSIB Pada Liga Indonesia 2009.
  - 2) Mempersiapkan Pembentukan Badan Hukum PERSIB.
  - 3) Membentuk Badan Pengelola PERSIB Sebagai Institusi Transisi Untuk Mengelola PERSIB Sampai Terbentuknya Badan Hukum.
- n. **Komite Sepeda Indonesia, Wakil Ketua** Dewan Pembina Daerah Masa Bhakti 2011 s/d 2016 Surat Keputusan No : Skep-006/DPP/KSI/II/2011 Tanggal 25 Februari 2011;
- o. **FORKI Kota Bandung, Pembina** Team Karate Kota Bandung Pada Kejurnas Karate Antar Kota Se- Indonesia.



## Lampiran 3: Dokumentasi Kampanye Dada Rosada Menggunakan Simbol Persib







